

**ANALISIS *MAQASHID AL SYARIAH* TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NOMOR  
2374/PDT.G/2019/PA.KDL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Pada Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

**NUR AWALIYAH HAQ**

**1602016035**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691  
Semarang 50185

---

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Nur Awaliyah Haq

NIM : 1602016035

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS MAQASHID AL SYARIAH TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NOMOR 2374/PDT.G/2019/PA.KDL**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 13 Juni 2020

Pembimbing I

Drs. Eman Sulaeman, M.H

Pembimbing II

Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691  
Semarang 50185

---

---

**PENGESAHAN**

Nama : Nur Awaliyah Haq  
NIM :1602016035  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
Judul : **ANALISIS *MAQASHID AL SYARIAH* TERHADAP PEMBAGIAN  
HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
KENDAL NOMOR 2374/PDT.G/2019/PA.KDL**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 29 Juni 2020 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 13 Juni 2020

## MOTTO

*Fiat Justitia Ruat Caelum*

“Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh”

(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)<sup>1</sup>

*Fiat Justitia, Et Pereat Mundus*

“Keadilan akan tetap ada meskipun dunia akan musnah”

(Philipp Melanchton)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014) hlm. 83

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 83

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda tercinta Achmad Sahono, Ibunda tercinta Mutmainah, yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
2. Kakakku Mas Tofik dan mbakku Mbak Irma, serta keponakanku yang lucu-lucu Dek Fizi dan Dek Faeyza yang selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Pembimbing penulis Bu Novita Dewi Mashyithoh, S.H., M.H., dan Bapak Eman Sulaeman, S.H., M.H., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Teman seperjuangan penulis, lala. Yang telah membersamai setiap langkah penulisan skripsi ini pun dalam perjalanan perkuliahan penulis, selalu memberikan dukungan, serta banyak membantu penulis menyelesaikan karya tulis skripsi ini.
6. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya. Terimakasih.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS *MAQASHID AL SYARIAH* TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NOMOR 2374/PDT.G/2019/PA.KDL”** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2020

Deklarator,



**Nur Awaliyah Haq**

**1602016035**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	‘l	‘el
م	Mim	‘m	‘em

ن	Nun	‘n	‘en
و	Wau	w	w
ه	Ha’	h	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	y	ye

## II. Ta’marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

## III. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
ُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

## IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a’antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>‘u ‘iddat</i>

## V. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (*el*)

القران	Ditulis	<i>al-Qur’an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>



- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

#### VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami*, *Fiqh Munakahat*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## ABSTRAK

Harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami istri setelah terjadinya perkawinan. Ketentuan mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membagi seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun dalam praktik peradilan, ketentuan tersebut tidak semudah dan sesederhana bunyi pasal tersebut, terdapat beberapa hal yang sejalan dengan perkembangan hukum dan kondisi sosial yang berubah seiring dengan perkembangan kemajuan zaman, yang mana hal tersebut mempengaruhi tentang perolehan harta bersama dan juga pembagian apabila terjadi sengketa di pengadilan. Dalam hal ini diperlukan keterampilan dan kejelian hakim dalam menganalisis masalah harta bersama ini dengan penerapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perkembangan zaman. Fenomena sengketa harta bersama terjadi pada putusan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam perkara nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl, dalam putusan tersebut majelis hakim membagi harta bersama diluar ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 97 KHI. Pembagiannya yakni sebesar 2/3 bagian untuk Penggugat (istri) dan 1/3 bagian untuk Tergugat (suami). Sehingga penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan, konsep keadilan, dan penafsiran hukum oleh hakim. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis tinjauan *maqashid al syariah* terhadap putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum doktrinal. Pendekatan penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*). Tipe pendekatan normatif-terapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *judicial case study*. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode dokumentasi. Adapun teknik validitas data yang digunakan yakni triangulasi sumber data, selanjutnya data-data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim memutuskan pembagian harta bersama sebesar 2/3 bagian untuk Penggugat dan 1/3 bagian untuk Tergugat. pembagian tersebut dilakukan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa pihak Penggugat (istri) lebih banyak berkontribusi dalam pengumpulan harta bersama dari hasil kerjanya sebagai TKI di luar negeri, sedangkan pihak Tergugat berperan dalam penjagaan harta bersama saja. Majelis hakim mendasarkan pendapatnya pada keadilan distributif yang membagi kepada setiap orang berdasarkan porsinya. Selain itu, putusan majelis hakim yang berani melakukan trobosan hukum dengan tidak terbelenggu pada ketentuan perundang-undangan demi terwujudnya keadilan bagi para pihak berdasarkan membuktikan bahwa majelis hakim telah menerapkan keadilan substansial. Dalam perkara ini majelis hakim telah menerapkan penafsiran sosiologis, karena hakim dalam memutuskan perkara ini melakukan penafsiran terhadap undang-undang yang disesuaikan dengan keadaan sosial dalam masyarakat agar penerapan hukum sesuai dengan tujuannya yaitu kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat. Selain itu, analisis *maqasid al syariah* putusan ini adalah termasuk dalam menjaga harta (*hifz al mal*) dalam hal *daruriyyat* dan *hajiyyat*. Dilihat dari tingkatan *daruriyyat* pembagian harta bersama pada putusan ini memiliki tujuan yakni menjaga eksistensi harta yang kepemilikannya terjadi permasalahan. Sedangkan dilihat dari segi tingkatan *hajiyyah*, pembagian harta bersama pada putusan tersebut adalah memiliki manfaat dalam hal mempermudah para pihak untuk lebih leluasa mempergunakan haknya pada harta bersama sesuai kehendaknya masing-masing.

**Kata kunci : Harta Bersama, *Maqashid Al- Syariah*, Keadilan.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku pembimbing II dan Bapak Drs. Eman Sulaeman, M.H., yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Achmad Sahono dan Ibunda Mutmainah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak penulis Mas Tofik dan Mbak Irma, serta keponakan Penulis yang sholeh dan lucu-lucu dek Faeyza dan dek Fizi yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil terutama saat penulis menempuh studi perkuliahan.
4. Bapak Prof. Imam Taufik selaku rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.
5. Bapak Dr. Arja Imroni selaku dekan UIN Walisongo beserta segenap jajarannya.
6. Ibu Nur Hidayati Setiyani, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak Junaidi Abdilah selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
8. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam.
9. Bapak Sofangi, M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Kendal beserta jajaran staf Pengadilan Agama Kendal yang bersedia meluangkan waktunya memberikan informasi bagi penelitian skripsi penulis.
10. Saudara-saudaraku dari Lembaga Riset dan Debat (LRD), wabil khusus ibu pembimbing LRD Bu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., dan Bu Briliyan Ernawati, S.H., M.H. yang telah mengasah kemampuan penulis baik melalui diskusi-diskusi hukum maupun kompetisi-demi kompetisi perdebatan semasa penulis menjalani perkuliahan. Pengalaman berharga bersama kalian tidak akan penulis lupakan.

11. Sahabat seperjuanganku Syed Abul A'la, Yuliani, Sofhia Rahmani, Nabela Oktavia, Salwa Nida, Irma Yuliawati, Maryamul Chumairo, Candra Vira Faradillah, Elsaputri, Pingki, Zanna, Elya Khusniatul, Fauzia Rohmah, Sri Utari, mba nesa, mas Arif Khoiruddin, mas maulana, Rifai Yusuf, kholik, dan aslah terimakasih telah kebersamai setiap langkah perjuangan penulis di kampus hijau UIN Walisongo dan memberikan warna baru bagi kehidupan penulis sehingga memicu semangat penulis saat menuntut ilmu di cakrawala kampus.
12. Teman-teman HKI 2016 khususnya teman sekelas HKI-A 2016 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah kebersamai perjalanan menuntut ilmu di kampus hijau tercinta ini.
13. Teman-teman KKN Posko 21 Desa Merbuh, juga tante santi dan suami yang memberikan pengalaman bermasyarakat sewaktu penulis melaksanakan KKN dan pengalaman tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan penulis.
14. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 13 Juni 2020

Penulis,



**Nur Awalayah Haq**

**NIM:1602016035**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I</b>	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Tinjauan pustaka .....	3
F. Metode Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	9
<b>BAB II .....</b>	<b>10</b>
<b>LANDASAN TEORITIS HARTA BERSAMA, <i>MAQASID AL SYARIAH</i>, PERTIMBANGAN HAKIM DAN PENAFSIRAN HUKUM, DAN TEORI Keadilan .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Harta Bersama.....	10
1. Pengertian Harta Bersama .....	10
2. Harta Bersama Dalam Hukum Positif di Indonesia .....	12
3. Harta Bersama dalam Hukum Islam .....	15
B. TINJAUAN TENTANG <i>MAQASHID AL SYARIAH</i> .....	18
1. Pengertian <i>Maqashid Al Syariah</i> .....	18
2. Tujuan Umum <i>Maqashid al Syariah</i> .....	19
C. TINJAUAN UMUM PERTIMBANGAN HAKIM DAN PENAFSIRAN HUKUM	
25	
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	25
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim .....	26
3. Pengertian Penafsiran Hukum.....	26
4. Macam-macam Penafsiran Hukum.....	29

D. TINJAUAN UMUM TEORI Keadilan .....	32
<b>BAB III</b>	
PROFIL PENGADILAN AGAMA KENDAL .....	39
PUTUSAN PERKARA GUGATAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KENDAL .....	39
A. Profil Pengadilan Agama Kendal .....	39
1. Sekilas Sejarah Pengadilan Agama Kendal .....	39
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal .....	41
3. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Kendal .....	42
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal .....	44
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl	46
1. Keterangan Penggugat .....	46
2. Keterangan Tergugat .....	48
3. Bukti dan Saksi Penggugat .....	50
4. Pertimbangan Hukum .....	57
5. Amar Putusan .....	58
<b>BAB IV</b>	
ANALISIS <i>MAQASHID AL SYARIAH</i> TERHADAP GUGATAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KENDAL .....	60
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Gugatan Harta Bersama Nomor: 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal .....	59
1. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Fakta-Fakta Persidangan .....	60
2. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Keadilan .....	65
3. Penafsiran Hukum oleh Hakim .....	70
B. PERTIMBANGAN <i>MAQASHID AL SYARIAH</i> TERHADAP PUTUSAN NOMOR 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl .....	72
<b>BAB V</b> PENUTUP .....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	79
LAMPIRAN 82	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	111

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Jalinan suci pernikahan memiliki posisi yang strategis sekaligus menentukan banyak dampak hukum keluarga. Pernikahan bukan hanya sekedar instrumen resmi penghalalan yang haram, namun lembaga besar yang darinya dibangun banyak implikasi hukum keluarga, diantaranya munculnya kewajiban nafkah oleh suami kepada istri, munculnya kewajiban nafkah suami kepada istri dan anak-anak, dasar dari lembaga talak, salah satu sebab keberhakan dalam waris, lahirnya hubungan nasab.<sup>4</sup>

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut sudah barang tentu sangat bergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media merealisasikan syariat Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak yang akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.<sup>5</sup>

Kehidupan modern saat ini menayangkan fakta bahwa suami istri bekerja sebagai hal biasa. Baik suami maupun istri lalu memiliki peran dan partisipasi dalam perkawinan. Hubungan suami menafkahi istri sudah usang dikampanyekan dalam rumah tangga. istri-istri karier menjamur seiring tuntutan kehidupan semakin besar, dan upaya memperolehnya semakin sulit. Kenyataan itu kemudian menjadi tolak ukur bahwa harus ada ketentuan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, yang masing-masing berhak atas separohnya.<sup>6</sup>

Al-Qur'an dan hadis yang merupakan sumber utama hukum Islam tidak terdapat ketentuan yang jelas mengenai harta bersama, namun Allah SWT memberikan kewenangan bagi setiap orang (laki-laki dan perempuan) mengupayakan hak terhadap apa yang diusahakannya.<sup>7</sup> Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa:32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ  
وَسئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka*

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Erfani Aljan Abdullah, *Pembaruan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017) hlm. 119

<sup>5</sup> Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonrsia*, (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 180

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 125-126

<sup>7</sup> Rahman, “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Tahun 2008-2014)”, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2014, hlm 2-3

*usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.*” (QS An-Nisaa’ [4] : 32)<sup>8</sup>

Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ketentuan harta bersama diatur sedemikian rupa. Sebagaimana pula ketentuan pada Bab XIII Pasal 85 sampai dengan Pasal. 97 Kompilasi Hukum Islam, mengemukakan bahwa yang disebut harta bersama adalah harta yang diperoleh sebatas selama perkawinan dalam konteks membangun rumah tangga, bukan yang merupakan pemberian yang sifatnya pribadi (waris, hadiah pribadi, hibah dll) tidak peduli siapa yang memperolehnya. Dalam cerai hidup atau mati harta dibagi masing-masing separoh, besaran dan/ atau keberadaan harta bersama dalam perkawinan bersifat relatif karena dapat ditentukan secara khusus di perjanjian perkawinan. Perkawinan tidak menjadi sebab bercampurnya harta suami istri, namun dapat bercampur apabila ada perjanjian perkawinan. Peyelesaian harta bersama dilakukan menurut ketentuan hukum yang bersangkutan baik agama, adat, dll.<sup>9</sup>

Secara yuridis formal ketentuan harta bersama telah diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam praktik peradilan, ketentuan tersebut tidak mudan dan sederhana bunyi pasal tersebut, terdapat beberapa hal yang sejalan dengan perkembangan hukum dan kondisi sosial yang berubah seiring dengan perkembangan kemajuan zaman, yang mana hal tersebut memengaruhi tentang perolehan harta bersama dan juga pembagian apabila terjadi sengketa di pengadilan. Dalam hal ini diperlukan keterampilan dan kejelian hakim dalam menganalisis masalah harta bersama ini dengan penerapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sesuai dengan kemajuan zaman.<sup>10</sup>

Ketentuan hukum positif di Indonesia mengamanatkan pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai di pengadilan ketentuannya adalah dibagi separoh. Namun hakim sebagai pemutus di persidangan harus mempertimbangkan faktor-faktor lain sehingga mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Sebagaimana yang terdapat pada putusan nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl yang menetapkan bahwa pembagian harta bersama sebesar 2/3 bagian untuk Penggugat (istri) dan 1/3 bagian untuk Tergugat (suami). Dalam hal ini majelis hakim memutuskan perkara harta bersama keluar dari ketentuan hukum yang ada dikarenakan ada faktor-faktor yang menurut pandangan majelis hakim akan lebih adil apabila diputuskan demikian. Sehingga dalam hal ini penulis hendak meneliti perkara gugatan harta bersama yang ada di Pengadilan Agama Kendal tersebut dengan judul “Analisis *Maqashid al Syariah* Terhadap Harta Bersama pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/Pa.Kdl.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah antara lain :

<sup>8</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, (Semarang:Toha Putra Semarang, 1996) hlm. 66

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 126-127

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006) hlm. 103-104



1. Bagaimana pertimbangan hakim pada pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl ?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid al syariah* terhadap pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl ?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diharapkan tercapai tujuan sesuai yang penulis harapkan. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui pertimbangan hakim pada pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl
2. Menganalisis tinjauan *maqashid al syariah* terhadap pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan pengetahuan tentang tinjauan *maqashid al syariah* terhadap pembagian harta pada Putusan Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat yang akan berperkara di Pengadilan khususnya dalam perkara gugatan harta bersama
  - b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para praktisi hukum baik itu hakim maupun advokat dalam penyelesaian perkara gugatan harta bersama

### E. Tinjauan pustaka

Berdasarkan deskripsi dalam penyusunan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tentu harus melakukan tinjauan pustaka. Adapun tinjauan pustaka ditujukan untuk mengetahui secara fokus pembahasan yang diteliti oleh penulis sebagai bahan pembanding peneliti maupun sebagai bahan referensi penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rabiatal Adawiyah K, 2014, Universitas Hasanuddin Makassar, berjudul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No.871/Pdt.G/PA.Mks)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum dari harta bersama dan harta bawaan dan untuk mengetahui tata cara penyelesaian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan (studi kasus putusan no.871/Pdt.G/PA.Mks). hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh baik istri maupun suami sebelum perkawinan yang merupakan harta pribadi milik sendiri yang berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai kedudukan hukum harta bersama dan harta bawaan telah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Adapun percampuran

tata cara penyelesaian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan di Pengadilan Agama Makassar (studi kasus putusan no.871/Pdt.G/PA.Mks) adalah apabila terjadi percampuran tatacara penyelesaian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan tersebut harus dipisah terlebih dahulu kemudian harta bersama dibagi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian.<sup>11</sup>

Penelitian ini memiliki sekilas kesamaan dengan penulis yakni mengenai harta bersama. Namun terdapat perbedaan mendasar yakni penulis meneliti mengenai analisis *maqashid al syariah* terhadap pembagian harta bersama pada putusan pengadilan agama kendal nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl.

2. Jurnal yang ditulis oleh Etti Rochaeti. Jurnal Wawasan Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2013, berjudul “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penelitian ini menjabarkan tentang harta gono gini yang merupakan harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Konsep harta gono gini semula berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia, kemudian konsep ini didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta gono gini. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama diatur pada Pasal 119 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan harta gono gini dalam poligami Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 94 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Apabila salah seorang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta gono gini, Pasal 94 Ayat (1) Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa suami/istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugat cerai.<sup>12</sup>

Penelitian ini mengandung kesamaan dengan penelitian yang dibuat penulis yakni dalam hal analisis harta bersama dalam perkawinan (gono gini) berdasarkan hukum islam. Namun terdapat perbedaan pembahasan karena penelitian penulis lebih spesifik meneliti mengenai putusan sengketa harta bersama Pengadilan Agama Kendal yakni putusan nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl, yang mana putusan majelis hakim pada perkara tersebut diluar dari ketentuan pembagian harta bersama yang ada dalam KHI.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hanna Abdullah, 2008, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul “Kedudukan Harta Bersama Setelah Putus Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa putusnya perkawinan adalah lepasnya ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Dalam islam perceraian pada prinsipnya dilarang, hal ini terdapat dari pada isyarat Rasulullah SAW, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci

<sup>11</sup> Rabiatul Adawiyah K, Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawan (Studi Kasus Putusan No.871/Pdt.G/2011/PA.Mks), Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, hlm. v

<sup>12</sup> Etti Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28, No. 1, Februari 2013, hlm. 650

Allah SWT. Pada dasarnya istilah harta bersama tidak dikenal dalam Islam dikenal dengan istilah *syirkah*, adalah percampuran suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dengan yang lain. Kemudian yang dimaksud dengan harta bersama dalam KHI adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dari hasil usaha suami istri atau salah satu dari keduanya selain harta warisan, hibah maupun wasiat, baik pemberian dari orang tua masing-masing atau dari pihak lain. Pembagian harta bersama setelah perceraian dibagi menurut hukumnya masing-masing. Baik hukum agama, adat suami dan istri tersebut kalau tidak ada maka diselesaikan di depan pengadilan agama sesuai dengan Undang-Undang. Ketentuan pembagian harta bersama dalam KHI adalah 50%:50% dibagi suami istri yang perkawinannya putus baik karena cerai mati atau cerai hidup.<sup>13</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni penelitian mengenai putusan pengadilan agama tentang sengketa harta bersama. Namun, terdapat perbedaan yakni penulis lebih spesifik karena penelitian penulis meneliti mengenai tinjauan maqasid syariah dari putusan pengadilan agama kendal nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl.

4. Skripsi yang ditulis oleh Masyitha Putri Awaliyah, 2012, Universitas Hasanuddin Makassar berjudul “Harta Bersama yang Diserahkan kepada Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus No. 346/Pdt.G/2010/PA.Sgm)”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan harta bersama yang diserahkan kepada anak setelah perceraian serta pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan untuk menyerahkan harta bersama kepada anak dan juga mengenai putusan yang diputuskan oleh hakim merupakan terobosan hukum terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan harta bersama setelah perceraian yang diserahkan kepada anak bermuara kepada dua pendapat, yaitu pendapat pertama mensyaratkan adanya kesepakatan dan kerelaan hati para pihak sedangkan pendapat kedua bertumpu pada aspek formal legal pengadilan dan selama tidak ada upaya hukum, maka para pihak dianggap sepakat dengan putusan hakim meskipun dalam hati masing-masing pihak tidak sepakat. Putusan dan pertimbangan hakim pada perkara nomor 346/Pdt.G/2010/PA.Sgm juga terdapat cacat hukum.<sup>14</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam hal analisis studi putusan mengenai harta bersama, namun perbedaan karena penelitian penulis meneliti tentang analisis *maqashid al syariah* terhadap putusan harta bersama pada putusan pengadilan agama kendal nomor 2374/pdt.g/2019/pa.kdl.

5. Skripsi yang ditulis oleh M. Sapuan, 2009, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk.)”. Skripsi ini berkesimpulan bahwa alasan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk. mengenai perselisihan harta bersama telah sesuai dengan ketentuan syara’ dan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang

<sup>13</sup> Hanna Abdullah, Kedudukan Harta Bersama Setelah Putus Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan), Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hlm. 98

<sup>14</sup> Masyitha Putri Awaliyah, Harta Bersama yang Diserahkan kepada Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus No. 346/Pdt.G/2010/PA.Sgm), Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2012, hlm. v

Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, selain itu alasan hakim membagi harta bersama  $\frac{1}{2}$  adalah berdasarkan fakta-fakta di persidangan.<sup>15</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam hal analisis studi putusan mengenai harta bersama, namun perbedaan karena penelitian penulis meneliti tentang analisis pembagian harta bersama pada istri yang bekerja dan suami yang tidak mempunyai pekerjaan tetap ditinjau dari perspektif maqasid syariah (studi kasus putusan pengadilan agama kendal nomor 2374/Pdt.G/2019/Pa.Kdl) yang mana amar putusan tersebut mengandung gagasan hukum baru yang tidak sesuai dengan ketentuan KHI.

Dari telaah pustaka diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang mengandung unsur kebaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berbagai sumber yang penulis temukan, penelitian sebelumnya membahas mengenai penelitian yang hanya memiliki kesamaan dalam salah satu bahasan di penelitian penulis. Dalam hal ini penulis meneliti mengenai analisis *maqashid al syariah* terhadap putusan pengadilan agama kendal nomor 2374/pdt.g/2019/pa.kdl). Penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembagian harta bersama pada kasus putusan pengadilan agama kendal nomor 2374/pdt.g/2019/pa.kdl. putusan tersebut mengandung gagasan hukum baru yang tidak sesuai dengan ketentuan pembagian harta bersama yang ada pada ketentuan KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena amar putusan tersebut membagi harta bersama sebesar  $\frac{2}{3}$  bagian untuk Penggugat serta  $\frac{1}{3}$  untuk Tergugat, hal tersebut dilakukan hakim dengan menimbang fakta-fakta persidangan yang ada. Sehingga atas dasar landasan tersebut penulis menulis penelitian skripsi yang berjudul analisis *maqashid al syariah* terhadap putusan pengadilan agama kendal nomor 2374/pdt.g/2019/pa.kdl

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>16</sup> Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>17</sup> Metode-metode tersebut sebagai berikut:

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal bisa disebut juga penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*), atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.<sup>18</sup> Penelitian penulis merupakan jenis penelitian hukum

<sup>15</sup> M. Sapuan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk.) Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm. 92

<sup>16</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2003) hlm. 1

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 2012) hlm. 5

<sup>18</sup> Joenadi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta:Kencana, 2016) hlm. 124

doktrinal karena penelitian ini mengkaji analisis *maqashid al syariah* terhadap pembagian harta bersama pada putusan pengadilan agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.kdl.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan di dalam penelitian hukum dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>19</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*). Tipe pendekatan normatif-terapan yang digunakan dalam penelitian penulis adalah *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan, namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak tetapi tetap melalui proses pengadilan melalui putusannya.<sup>20</sup> Penelitian ini akan melakukan studi kasus (*case study*) pada putusan pengadilan agama kendal nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl.

#### **c. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian pada umumnya dibedakan antara dua data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>21</sup> Data yang akan penulis gunakan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim).<sup>22</sup> Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan menggunakan bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan agama kendal nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>23</sup> Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan antara lain buku-buku tentang hukum, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.<sup>24</sup>

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data.<sup>25</sup> Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005) hlm. 13

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 149

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta:CV. Rajawali, 1985) hlm. 14

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 82

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 82

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 82

<sup>25</sup> Suci K, "Teknik Pengumpulan Data", [http://suci\\_k.staff.gunadarma.ac.id](http://suci_k.staff.gunadarma.ac.id), diakses 30 April 2020

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>26</sup> Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian.<sup>27</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data. Studi pustaka/dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung pada subjek penelitian.<sup>28</sup>

Dokumen yang akan penulis gunakan dalam skripsi ini data sekunder, diantaranya adalah Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan harta bersama, jurnal, skripsi, tesis, disertasi yang mendukung dan bekesesuaian dengan penelitian penulis.

#### e. Teknik Validitas Data

Dalam menguji keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.<sup>29</sup>

Jenis teknik triangulasi yang akan penulis gunakan yaitu triangulasi sumber data. Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.<sup>30</sup> Penulis menggunakan triangulasi sumber karena dalam penelitian ini penulis akan menguji validitas data dengan cara menguji kebenaran data dari sumber yang berbeda, yakni data putusan pengadilan agama Kendal nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl dengan data-data dari buku-buku dan data-data dari penelitian sebelumnya yang selaras dengan penelitian yang dilakukan penulis.

#### f. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudan dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>31</sup> Analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>32</sup> Penulis menggunakan teknik deskriptif analitis karena penulis akan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap putusan pengadilan agama Kendal nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl yang kemudian diolah dan dianalisis menggunakan sudut pandang *maqashid al syariah* untuk diambil kesimpulannya.

<sup>26</sup> Sugiono, *Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2009) hlm. 224

<sup>27</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1991) hlm. 50, 57

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 217

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.30

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 217

<sup>31</sup> Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghaila Indonesia, 2003) hlm. 241

<sup>32</sup> Sugiono, *op.cit.*, hlm. 29

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Guna mempermudah dalam pembahasan dan agar mudah diketahui gambaran skripsi secara keseluruhan, maka penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematika penulisan skripsi ini. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I merupakan pendahuluan. Penulis akan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang dibahas, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.
2. Bab II merupakan tinjauan teoritis. Penulis akan membahas mengenai harta bersama, meliputi pengertian harta bersama, dasar hukum dan bentuk harta bersama, hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, harta bersama dalam Islam, harta bersama dalam hukum positif. Selain itu penulis juga akan membahas mengenai tinjauan umum mengenai maqasid syariah yang meliputi pengertian maqasid syariah, konsep maqasid syariah, kemaslahatan sebagai tujuan syariat islam.
3. Bab III berisi tentang profil pengadilan agama Kendal dan putusan harta bersama di pengadilan agama Kendal. Penulis akan menguraikan mengenai profil pengadilan agama kendal dan proses putusan perkara gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Kendal pada putusan nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl.
4. Bab IV berisi tentang analisis putusan harta bersama di pengadilan agama kendal pada perkara nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl. Penulis akan melakukan analisis tentang pertimbangan hakim terhadap putusan perkara gugatan harta bersama dalam perkara nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl yang ditinjau dari prespektif maqasid syariah.
5. Bab V merupakan penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS HARTA BERSAMA, *MAQASID AL SYARIAH*, PERTIMBANGAN HAKIM DAN PENAFSIRAN HUKUM, DAN TEORI KEADILAN

#### A. Tinjauan Umum Harta Bersama

##### 1. Pengertian Harta Bersama

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa harta bersama atau harta gono-gini secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud harta bersama atau harta gono-gini adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri.<sup>33</sup>

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan.<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini artinya terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati. Berbeda dengan harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada dibawah penguasaan masing-masing suami dan istri sepanjang para pihak tidak menentukan lain, khususnya dalam perjanjian perkawinan.<sup>35</sup>

Sejak perkawinan berlangsung dengan sendirinya terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Hal ini merupakan ketentuan umum apabila tidak diadakan perjanjian. Keadaan demikian berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan berlangsung. Jika seorang ingin menyimpang dari ketentuan tersebut maka ia harus melakukan perjanjian perkawinan.<sup>36</sup> Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Vollmar bahwa akibat-akibat perkawinan terhadap kekayaan dan penghasilan suami istri tergantung dari ada atau tidaknya dalam perjanjian perkawinan.<sup>37</sup>

Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta bersama tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri

<sup>33</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, (Jakarta:Visimedia, 2008) hlm. 2

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007) hlm. 56

<sup>35</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum perdata Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2018) hlm. 99-101

<sup>36</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:Intermasa, 2001) hlm. 31

<sup>37</sup> H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 33



atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu harus didaftarkan.<sup>38</sup>

Hukum perkawinan Islam menerangkan bahwa istri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Harta yang menjadi hak istri dalam perkawinan tersebut adalah nafkah yang diperoleh dari suami untuk keperluan hidupnya. Namun apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara suami istri, maka dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama. Besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian masing-masing bergantung pada banyak sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila usahanya sama-sama besar maka harta yang dimiliki dari perolehan tersebut seimbang. Akan tetapi apabila suami lebih besar usahanya daripada istri maka hak suami harus lebih besar daripada istri, begitu juga sebaliknya. Disamping berlakunya ketentuan umum diatas dapat pula dimungkinkan adanya percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami istri dalam bentuk suatu perjanjian atas usaha suami dan istri dengan cara bersama.<sup>39</sup>

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa sudut pandang hukum Islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami istri mestinya masuk kedalam *rubu' muamalah*, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Hal ini disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fikih adalah orang arab yang tidak mengenal adanya adat pencarian bersama suami istri itu, tetapi dibicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa arab disebut *syarikat* atau *syirkah*. Oleh karena masalah pencarian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau *syirkah*, maka untuk mengetahui hukumnya harus mengetahui lebih dahulu tentang macam-macam perkongsian sebagaimana telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab fikih.<sup>40</sup>

Pandangan hukum adat tentang harta bersama secara umum hampir sama diseluruh daerah. Yang dianggap sama adalah perihal atasnya harta kekayaan yang menjadi harta bersama (harta satuan), sedangkan mengenai hal-hal lainnya, terutama mengenai kelanjutan dari harta kesatuan itu pada nyatanya memang berbeda dimasing-masing daerah. Misalnya Lwa, pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan harta gono-gini setelah terjadi perceraian antara suami dan istri menjadi penting sekali. Hal ini berbeda dengan kondisi dari salah satu atau keduanya meninggal dunia, pembagian tersebut tidak begitu penting. Sementara di Aceh, pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan *hareuta sauhareukat* bermakna sangat penting baik ketika terjadi perceraian maupun pada saat pembagian warisanjika salah seorang pasangan meninggal dunia. Meskipun pembagian harta bersama diberbagai daerah boleh dikatakan hampir sama, tetapi ada juga yang dibedakan berdasarkan konteks budaya lokal masyarakatnya. Salah satu daerah yang cenderung tidak memberlakukan konsep harta bersama yaitu Lombok dan Nusa Tenggara Barat. Menurut hukum adat Lombok, perempuan yang bercerai pulang ke rumah orang

<sup>38</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006) hlm. 109

<sup>39</sup> Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, (Bandung:Mizan, 2010) hlm. 163

<sup>40</sup> Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 111

tuanya dengan hanya membawa anak dan barang seadanya tidak mendapat harta gono-gini.<sup>41</sup>

## 2. Harta Bersama Dalam Hukum Positif di Indonesia

Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan di langsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan di dilaksanakan dan tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak bolrh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apapun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, sauami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139-154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>42</sup>

Perjanjian sebagaimana diatas itu, haruslah dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus dibuat dalam bentuk akta autentik di muka notaris. Akta autentik ini sangat penting, karena dapat dijadikan bukti di persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing suami istri. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibentuk sebelum perkawinan dilaksanakan, maka semua harta suami istri terjadi perbauran dan dianggap harta bersama. Kemudian Pasal 128-129 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , dinyatakan bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian perkawinan itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentuan umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.<sup>43</sup>

Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang garta bersama ini suami istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan utus karena perceraian maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.<sup>44</sup>

Penyelesaian masalah pembagian harta gono-gini jarang sekali diselesaikan secara tuntas dan memuaskan karena banyak pasangan suami istri yang tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah. Padahal, perjanjian ini sangat penting sebagai pedoman jika suatu saat nanti pasangan suami istri terpaksa harus bercerai karena permasalahan rumah tangga mereka yang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai. Harta gono-gini dan

<sup>41</sup> Evi Djuniarti, "Hukum Harta bersama Ditinjau dari Prespektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, no. 4, Desember 2017, hlm. 447

<sup>42</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006) hlm. 104

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 105

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 105

perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena mereka sering menganggap perkawinan adalah suatu perbuatan yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan harta benda.<sup>45</sup>

Menurut Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa istri mempunyai hak seluruhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau mengagungkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta benda pribadi mereka. Undang-undang tidak membedakan kemampuan melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadi suami istri masing-masing. Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, dimana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran harta pribadi suami istri karena perkawinan dan harta istri tetap menjadi harta istri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai penuh olehnya.<sup>46</sup>

Ketentuan Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan hukum adat yang ada di Indonesia. Dalam konsepsi hukum adat pada harta bersama yang ada di nusantara ini banyak ditemukan prinsip bahwa masing-masing suami istri berhak menguasai harta bendanya sendiri dan ia berlaku sebagaimana sebelum mereka menjadi suami istri. Hanya saja apabila ditinjau dari pendekatan filosofis, dimana perwujudan rumah tangga yang kekal dan penuh dalam suasana kerukunan, maka hukum adat yang mengharapkan adanya komunikasi yang terbuka dalam pengelolaan dan penguasaan harta pribadi tersebut, sangat perlu dikembangkan sikap saling menghormati, saling membantu, saling bekerja sama, dan saling bergantung. Dengan demikian keabsahan menguasai harta pribadi masing-masing pihak itu jangan sampai merusak tatanan kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.<sup>47</sup>

Yahya Harahap menyatakan bahwa historis terbentuknya harta bersama telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya istri secara aktif dalam membantu pekerjaan suami. Jika istri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menganggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan.<sup>48</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat 4 (empat) macam harta dalam keluarga (*gezinsgood*) dalam perkawinan, yaitu<sup>49</sup>:

- a. Harta yang diperoleh dari warisan, baik mereka sudah menjadi suami istri maupun setelah mereka melangsungkan perkawinan. Harta ini di Jawa Tengah disebut barang *gawaan*, di Betawi disebut barang *usaha*, di Banten disebut dengan barang *sulur*, di

<sup>45</sup> Zulfikar Makodompit, "Penerapan Hukum Positif terhadap Harta Gono-Gini dihubungkan dengan Hukum Islam", *Lex Administratum*, Vol. III, No. 6, Agustus 2015, hlm. 166

<sup>46</sup> Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 105-106

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 106

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 29

<sup>49</sup> Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 106-107

- Aceh disebut dengan harta *tuha* atau harta *pusaka*, di Nganjuk disebut dengan *perimbit*.
- b. Harta yang diprtoleh dengan keringat sendiri sebelum mereka menjadi suami istri. Harta yang demikian ini di Bali disebut dengan *guna kaya* (lain dengan *guna kaya* di Sunda), di Sumatra Selatan dibedakan menjadi harta milik suami dan harta milik istri sebelum kawin, kalau milik suami disebut dengan harta *pembujangan*, sedangkan harta milik wanita/istri disebut dengan harta *penantian*.
  - c. Harta yang dihasilkan oleh suami istri setelah dilangsungkannya perkawinan. Harta ini di Aceh disebut dengan *seuhareukat*, di Bali disebut dengan *druwe gebru*, di Jawa disebut barang *gonogini*, di Mingkabau disebut harta *saurang*, di Madura disebut *ghuma ghuma*, dan di Sulawesi Selatan disebut barang *cakkar*.
  - d. Harta yang didapati oleh pengantin pada waktu pernikahan dilaksanakan, harta ini menjadi milik suami istri selama perkawinan.

Pembakuan istilah harta bersama sebagai terminus hukum yang berwawasan nasional baru dilaksanakan pada tahun 1974 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum pembakuan istilah harta bersama itu, terdapat harta bersama tersebut dalam berbagai macam istilah yang dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi telah disebutkan dengan jelas istilah harta bersama terhadap harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, tetapi dalam praktik masih saja disebut secara beragam sebagaimana sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun hal ini memengaruhi keseragaman pengertian, sebab yang dimaksud harta bersama ialah semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.<sup>50</sup>

M. Yahya Harahap menyatakan jika ditinjau dari sisi historis terbentuknya harta bersama telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya istri secara aktif dalam membantu pekerjaan suami. Jika istri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dan mencari harta benda, maka hukum adat lama menagnggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan. Dalam perjalanan sejarah lebih lanjut, pendapat tersebut mendapat banyak kritik keras dari berbagai kalangan ahli hukum sejalan dengan berkembangnya pandangan emansipasi wanita dan arus globalisasi segala bidang. Menanggapi kritik tersebut terjadilah pergeseran konsepsi nilai-nilai hukum baru, klimaksnya pada tahun 1950 mulai lahirlah produk pengadilan yang mengesampingkan syarat istri harus aktif secara fisik mewujudkan harta bersama. Syarat tersebut diubah dengan nilai baru seperti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor:K/SIP/1956 tanggal 7 November 1956.<sup>51</sup>

Nilai-nilai hukum baru yang tersebut dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan nilai-nilai tersebut dipertegas lagi

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 107

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 108

sebagaimana tersebut dalam Bab XII Kompilasi Hukum Islam dimana dikemukakan bahwa harta bersama suami istri itu adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan perolehannya itu tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Hal ini berarti bahwa harta bersama itu adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan siapa diantara suami istri yang mencarinya dan juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar. Harta bersama itu dapat berupa benda berwujud atau juga tidak berwujud. Benda berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga, sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.<sup>52</sup>

Harta gono-gini mencakup segala bentuk *activa* dan *passive* selama perkawinan. Pasangan calon suami istri yang akan menikah diperbolehkan memnentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta bawaan merupakan harta gono-gini. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing dalam perkawinan.”<sup>53</sup>

Mengenai wujud dari harta pribadi itu sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (*hewelijke voorwaarden*) sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun harta yang menjadi milik pribadi suami istri yaitu<sup>54</sup> :

- a. Harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan mereka dilangsungkan.
- b. Harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan.

Diluar dari jenis harta tersebut langsung menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.<sup>55</sup>

### 3. Harta Bersama dalam Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fikih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 108

<sup>53</sup> Zulfikar Mokodompit, *op.cit.*, hlm. 172

<sup>54</sup> Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 108

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 109

lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an Surat an Nisa ayat 32 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”*(QS An-Nisaa' [4] : 32)<sup>56</sup>

Ayat tersebut diatas mengemukakan bahwa semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.<sup>57</sup>

Para pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama sebagaimana disebut diatas. Sebagian dari mereka mengatakan dalam Islam tidak mengatur mengenai harta bersama dalam Al-Qur'an oleh karena itu terserah pada mereka untuk mengaturnya. pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Andorraoef serta diikuti oleh murid-muridnya. Sebagian pakar hukum Islam yang lain tidak mengatur tentang harta bersama ini, sedangkan hal-hal lain yang diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Tidak ada satu pun yang tertinggal, semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Jika tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, maka ketentuan itu ada dalam hadits, dan hadits ini merupakan sumber hukum Islam juga, pendapat ini dikemukakan oleh T. Jafizhan.<sup>58</sup>

Pendapat terakhir tersebut diatas adalah sejalan dengan pendapat sebagian ahli hukum Islam. Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung.<sup>59</sup> Kitab-kitab fikih bab khusus tentang pembahasan syarikat yang sah dan yang tidak sah. Di kalangan mazhab Syafi'i terdapat empat macam yang disebutkan harta *syarikat* yaitu :

- a. *Syarikat 'inan*, yaitu dua orang yang berkongsi di dalam harta tertentu, misalnya berserikat dalam membeli suatu barang dan keuntungannya untuk mereka
- b. *Syarikat abadan*, yaitu dua orang atau lebih berserikat masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya (upahnya) untuk mereka bersama menurut perjanjian yang mereka buat, seperti tukang kayu, tukang batu, mencari ikan di laut, berburu dan kegiatan yang menghasilkan lainnya

<sup>56</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, (Semarang:Toha Putra Semarang, 1996) hlm. 66

<sup>57</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006) hlm. 109

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 109

<sup>59</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2007) hlm. 117

- c. *Syarikat mufawadlah*, yaitu perserikatan dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan tenaganya masing-masing yang diantara mereka mengeluarkan modal, menerima keuntungan dengan tenaga dan modalnya, masing-masing melakukan tindakan meskipun tidak diketahui oleh pihak lain
- d. *Syarikat wujuh*, yaitu serikat atas tanpa pekerjaan ataupun harta, yaitu permodalan dengan dasar kepercayaan pihak lain kepada mereka.

Pembagian harta *syarikat* sebagaimana tersebut diatas, hanya *syarikat inan* yang disepakati oleh semua pakar hukum Islam dan juga dipakai dalam praktik pengadilan, sedangkan tiga *syarikat* lainnya masih diperselisihkan keabsahannya.<sup>60</sup>

Pakar hukum Islam dikalangan Hanafi dan Maliki dapat menerima *syarikat* ini karena *syarikat* tersebut merupakan muamalah yang harus dilaksanakan oleh setiap orang dalam rangka mempertahankan hidupnya. *Syarikat* itu dapat dilaksanakan asal tidak dengan paksaan, dan dilaksanakan dengan i'tikad baik. Jika salah satu pihak merasa tidak cocok lagi melaksanakan perkongsian yang disepakati, maka ia dapat membubarkan perkongsian itu dengan baik dan terhadap hal ini tidak dapat diwariskan.<sup>61</sup>

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa sudut pandang hukum Islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami istri mestinya masuk kedalam *rubu' muamalah*, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Hal ini disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fikih adalah orang arab yang tidak mengenal adanya adat pencarian bersama suami istri itu, tetapi dibicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa arab disebut *syarikat* atau *syirkah*. Oleh karena masalah pencarian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau *syirkah*, maka untuk mengetahui hukumnya harus mengetahui lebih dahulu tentang macam-macam perkongsian sebagaimana telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab fikih. Harta bersama dalam perkawinan itu digolongkan dalam bentuk *syarikat abadan* dan *mufawadlah*. Doktrin hukum fikih tidak ada yang membahas secara rinci tentang masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan hanya secara garis besar saja, sehingga menimbulkan penafsiran berbeda terhadap suatu masalah yang dihadapi dalam kenyataannya. namun demikian para pakar hukum Islam dalam merumuskan Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam setuju untuk mengambil *syarikat abdan* sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami istri dalam kompilasi. Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur *syarikat abdan* dengan hukum adat. Cara pendekatan yang demikian ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadi '*urf* sebagai sumber hukum dan sejiwa dengan kaidah yang mengajarkan "*al adatu muhakkamah*".<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 110

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 110

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 111

Pada dasarnya hukum islam tidak mengenal istilah pencampuran harta kekayaan antara suami atau istri karena pernikahan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri karena pernikahan. Harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta milik suami menjadi hak milik suami dan dikuasai penuh oleh suami. Jadi secara garis besar mengenai harta gono-gini atau harta bersama sebenarnya tidak dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Pada saat itu masalah harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum disentuh atau belum difikirkan (*ghair al-mufakkar*) oleh para ulama fiqh masa lalu karena masalah harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan dalam masa emansipasi wanita seperti yang terjadi pada masa ini.<sup>63</sup>

## B. TINJAUAN TENTANG *MAQASHID AL SYARIAH*

### 1. Pengertian *Maqashid Al Syariah*

*Maqashid al syariah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al syariah*. Secara etimologi *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshid* yang terbentuk dari huruf qaf, shad, dan dal yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *al- syariah* secara etimologi berasal dari *syara'a yasru'u syar'an* yang berarti membuat syariat atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna sanna yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.<sup>64</sup> Sedangkan syariah secara terminologi ada beberapa pendapat. A.A. Fyzee mengungkapkan bawa syariah adalah *conon law of islam*, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas. Sedangkan Satriia Effendi menjelaskan bahwa syariah adalah nash suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan *al-hadits al-mutawatirah* yang belum tercampuri pemahaman manusia. Sehingga cakupan syariah ini meliputi bidang *i'tiqadiyah, amaliyah, dan khuluqiyah*.<sup>65</sup> Pengertian secara etimologi *al-maqashid al-syariah* tersebut dapat membantu menemukan pengertiannya secara terminologi, yaitu maksud atau tujuan-tujuan disyariatkannya hukum dalam islam, hal ini mengindikasikan bahwa *maqashid syariah* erat kaitannya dengan hikmah dan illat.

Secara bahasa *maqashid al syariah* berarti tujuan hukum syariat. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat untuk sekalian manusia.<sup>66</sup> Mengenai pengertian *maqashid syari'ah* yang disepakati oleh para ulama' mujtahidin sesuai dengan apa yang dipaparkan dalam kitabnya Jasser Audah yang berjudul *Fiqh al-Maqashid Inathoh al-Ahkami as-Syari'ati Bimaqashidiha*,

<sup>63</sup> Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama dari Prespektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat", *Jurnal Prespektif*, Vol. XIX, No. 3, September 2014, Hlm. 204

<sup>64</sup> Ali Mutakin, "Teori Maqashid al Syariah dan hubungannya dengan metode istinbath hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 19, No. 3, Agustus 2019, hlm. 549

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 5500

<sup>66</sup> Shaipudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2011) hlm.223



*maqashid syari'ah* adalah maksud atau tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam. Itulah yang disepakati oleh Ulama' Mujtahid.<sup>67</sup>

Atas dasar penegasan ayat diatas, Syekh Muhamad Abu Zahra dalam kitabnya *Ushul Fiqh* merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum Islam<sup>68</sup>:

- a. Membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain. Untuk mencapainya adalah melalui ibadah yang telah disyariatkan seperti solat, puasa, dan haji.
- b. Menegakan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun nonmuslim.

Konsep keadilan menurut Abu Zahra adalah menempatkan manusia pada posisi yang sama di depan hukum. Maka tidak ada keistimewaan antara si kaya dan si miskin, hal itu diperkuat oleh hadis nabi yang artinya "semua kamu berasal dari adam, dan adam itu dari tanah, maka tidak ada keistimewaan bagi orang arab terhadap orang azam kecuali dengan ketakwaan". merealisasikan kemaslahatan. Tujuan ketiga ini merupakan tujuan puncak yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan. Maka tidak ada syariat yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan hadis kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki dan berlaku secara umum.<sup>69</sup>

Maslahah secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih* yang artinya mendatangkan kebaikan. Maslahah merupakan suatu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (*istinbath*) yang persoalannya tidak diatur secara ekspilisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Dalam kajian ilmu *ushul fiqh maslahah* menjadi sebuah istilah teknis yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan syar'i dalam penetapan hukum bagi hambanya yang mencaup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang mengakibatkan luputnya seorang dari kelima kepentingan tersebut.<sup>70</sup>

## 2. Tujuan Umum *Maqashid al Syariah*

Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan keaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara perkara yaitu jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.<sup>71</sup>

Dalam mengklasifikasikan *maqashid al syariah* secara umum, para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda, akan tetapi intinya tetap sama, sebagai berikut<sup>72</sup>:

<sup>67</sup> Jasser Auda, *Fiqh al-Maqashid Inathoh al-Ahkami as-Syari'ati Bimaqashidiha*, (Herndon: al-Ma'had al-'Alimi li al-Fikr al-Islamiy, 2006), hlm. 15.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 223-225

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 225

<sup>70</sup> Abdul wahab khallaf, *Ushul al-Fiqhi* (jakarta majelis aTaIndonesiyyin al-Dakwah al-islamiyah, 1973) hlm. 116

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 226

<sup>72</sup> Atika Rkminasiti Masrifah dan Achmad Firdaus, "The Framework of Maslahah Performa as Wealth Management System and its Implication for Public Policy Objectives", *Jurnal Media Syariah*, Vol. 18, No. 2, Desember 2016, hlm. 238

- a. Abu Zahrah mengklasifikasikan bahwa hukum-hukum dalam syariat Islam bertujuan untuk *tahdzib al-fard* (pendidikan bagi individu), *iqamah al-adl* (menegakan keadilan) dan *maslahah* (kemaslahatan).
- b. Imam Syatibi menyatakan bahwa kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima perkara diatas memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*
- c. Imam Ghazali menyebutkan bahwa *maqashid al syariah* yang menitikberatkan pada aspek *maslahah* terbagi menjadi tiga kategori yaitu *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Beliau juga membagi lima hal pokok yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tetapi kelima *maqashid al isyariah* ini harus berada dibawah naungan *daruriyat*. Hal ini dikarenakan kelima hal pokok tersebut adalah penjagaan terhadap perkara yang harus ada demi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, dimana apabila ia tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan stabil bahkan akan berjalan diatas kerusakan, kekacauan dan hilangnya kehidupan, sedang di akhirat akan kehilangan kemaslahatan, kenikmatan, serta kembali dengan membawa kerugian yang nyata.
- d. ‘Allal Al-Fasy menyebutkan tujuan syariah secara umum adalah kemakmuran bumi, menjaga aturan hidup, menetapkan kebaikan sesuai pada tempatnya, dan menegakan apa yang telah dibebankan dengan adil, istiqamah, mengandung kebaikan bagi akal dan pekerjaan, memperbaiki dan mewujudkan hal-hal yang baik serta mampu untuk mengatur kemanfaatan bagi orang banyak.
- e. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan basis syariah adalah hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan diakhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan sempurna, rahmat, kesejahteraan, dan hikmah.
- f. Ibnu Asyur menyebutkan bahwa secara umum tujuan dari syariat adalah menjaga aturan umat, melanjutkan kelangsungan kebaikan bagi manusia, akal, pekerjaan dan apa saja yang tampak di permukaan bumi yang ditempati.

Memlihara kelompok *daruriyat* adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan esensial (pokok) ini meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tidak terpeliharanya kelima hal pokok tersebut dalam tingkat *daruriyat* akan berakibat fatal, akan terjadi kehancuran, kerusakan, dan kebinasaan dalam hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan *daruriyat* ini menempati tempat tertinggi dan paling utama dibanding dua maslahat lainnya masing-masing *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Maka tidak dibenarkan memelihara kebutuhan *hajiyyat* dan *tahsiniyat* bila memusnahkan kebutuhan *daruriyat*. Adapun kelompok *hajiyyat* yang tidak termasuk kepada satuan pokok dalam kehidupan melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Jika kebutuhan peringkat kedua ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia, tetapi akan membawa kesulitan dan kesempitan. Kelompok *hajiyyat* ini berkaitan erat dengan rukhsah (keringanan) dalam ilmu fiqh.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Shaipudin Shidiq, *op.cit.*, hlm. 226

Adapun kelompok *tahsiniyat* yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah SWT dalam batas kewajaran dan kepatutan. Apabila kebutuhan tingkat ketiga ini tidak terpenuhi, maka tidak akan menimbulkan kemusnahan hidup manusia sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *daruriyat* dan tidak akan membuat kehidupan manusia menjadi sulit sebagaimana kebutuhan *hajiyyat*, akan tetapi kehidupan manusia dianggap tidak layak menurut akal dan fitrah manusia. Perkara yang terkait dengan kebutuhan *tahsiniyat* ini terkait dengan akhlak mulia dan adat yang baik.<sup>74</sup>

Abdul Wahab Khallaf menyatakan apabila tiga peringkat kebutuhan diatas masing masing *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat* telah dipenuhi secara sempurna berarti telah teralisasi kemaslahatan manusia yang merupakan tujuan hukum syariat.<sup>75</sup>

Berikut ini akan adalah kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing, sebagaimana disebutkan oleh Fathurrahman Djamil. Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhan masing-masing.

#### a. Memelihara agama (*Hifz al-Din*)

Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ataupun agama-agama sebelumnya.<sup>76</sup> Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjamin hal itu antara lain Q. Al Baqarah ayat 256 yang berbunyi sebagai berikut :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bahu tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS Al Baqarah [2] : 256)<sup>77</sup>

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.

- 1) Memelihara agama dalam tingkat *daruriyat* (pokok), yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk tingkat primer seperti melaksanakan solat lima waktu, kalau solat ini diabaikan maka mengancam keutuhan agama.
- 2) Memelihara agama dalam tingkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan keutuhan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti solat jama'qashar bagi orang yang bepergian, kalau ketentuan itu tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 227

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 226

<sup>76</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2019) hlm. 58

<sup>77</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, (Semarang:Toha Putra Semarang, 1996) hlm. 33

eksistensi agama melainkan hanya akan mempersulit orang yang sedang dalam bepergian.

- 3) Memelihara agama dalam tingkat *tahsiniyat* yaitu mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya menutup aurat baik di dalam solat maupun di luar solat, membersihkan pakaian dan badan. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan mengancam keutuhan agama dan tidak mempersulit orang yang melakukannya. Artinya jika tidak ada penutup aurat maka seseorang boleh saja solat jangan sampai meninggalkan solat yang termasuk kebutuhan *daruriyat*.<sup>78</sup>

#### b. Memelihara jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan nyawa orang kafir atau orang jahat. Adanya ancaman hukum qisash menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.<sup>79</sup>

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” ( Q.S Al Maidah [5] : 32)<sup>80</sup>

Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam tingkat *daruriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. Kalau kegiatan ini dibiarkan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja.
- 3) Memelihara agama dalam tingkat *tahsiniyat* seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia maupun mempersulit kehidupan manusia.<sup>81</sup>

#### c. Memelihara akal (*Hifz al-Aql*)

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 228

<sup>79</sup> Ahmad Sarwat, *Op.Cit.*, hlm. 59

<sup>80</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, (Semarang:Toha Putra Semarang, 1996) hlm. 90

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 228

Syariat Islam sangat menghagai akal manusia, sehingga diharamkan manusia meminum khamar agar tidak mabuk lantaran menjaga akalnya tetap waras. Selain itu juga syariat Islam sangat menghargai nilai orang yang berilmu.<sup>82</sup>

Memlihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara agama dalam tingkat *daruriyat* seperti diharamkannya meminum minuman keras. Jika hal ini tidak diindahkan maka akan berakibat rusaknya akal.
- 2) Memelihara akal dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti anjuran menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya aktivitas ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, namun akan mempersulit diri seseorang, terutama dalam kaitannya pengembangat ilmu pengetahuan
- 3) Memelihara akal dalam tingkatan *tahsiniyat*, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Hal ini hanya berkaitan dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung<sup>83</sup>

#### d. Memelihara Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Syariat Islam sangat menjaga urusan nasab lewa diharamkannya perzinaan, dimana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam.<sup>84</sup>

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS An Nur [24] : 2)<sup>85</sup>

Memlihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu :

- 1) Memelihara keturunan dalam tingktan *daruriyat*, seperti pensyariatan hukum perkawinan dan larangan melakukan perzinahan. Apabila ketentuan ini diabaikan maka eksistensiketurunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada saat akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar tidak disebutkan pada saat akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar misl*, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi dan kondisi rumah tidak harmonis lagi
- 3) Memelihara keturunan dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti disyariatkannya *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Jika diabaikan maka tidak akan

<sup>82</sup> Ahmad Sarwat, *Op.Cit.*, hlm. 60

<sup>83</sup> H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007) hlm. 125

<sup>84</sup> Ahmad Sarwat, *Op.Cit.*, hlm. 61

<sup>85</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, (Semarang:Toha Putra Semarang, 1996) hlm. 272

mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan, ia hanya berkaitan dengan etika atau martabat seseorang<sup>86</sup>

**e. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)**

Syariat Islam sangat menghargai harta seseorang, sehingga mengancam pelaku pencuri harta dengan hukuman potong tangan.<sup>87</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS Al Maidah [5] : 38)<sup>88</sup>

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu :

- 1) Memelihara harta dalam tingkatan *daruriyyat*, seperti pensyariaan aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang ilegal. Apabila aturan itu dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit seorang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari penipuan. Karena hal itu berkaitan dengan moral atau etika dalam bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh pada keabsahan jual beli tersebut, sebab pada tingkatan ketiga ini juga merupakan syarat adanya tingkatan kedua dan pertama.<sup>89</sup>

Urutan peringkat maslahat seperti diatas adalah penting, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya. Jika terjadi kontradiksi penerapannya maka tingkatan pertama (*daruriyyat*) harus didahulukan dari pada tingkatan kedua (*hajiyyat*), dan tingkatan ketiga (*tahsiniyyat*). Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk tingkatan kedua dan ketiga, manakala kemaslahatan yang masuk tingkatan pertama terancam eksistensinya. Misalnya seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan) untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan tersebut harus merupakan makanan yang halal. Jika pada suatu saat ia tidak mendapatkan makanan yang halal, padahal ia akan mati jika tidak makan, maka dalam kondisi tersebut ia dibolehkan mengonsumsi makanan yang diharamkan, demi menjaga eksistensi jiwanya. Makanan dalam hal ini termasuk menjaga jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, sedangkan memakan makanan yang halal termasuk memelihara nyawa dalam tingkatan *hajiyyat*. Jadi memelihara jiwa dalam

<sup>86</sup> H. M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta:Gaung Persada Press, 2007) hlm. 124

<sup>87</sup> Ahmad Sarwat, *Op.Cit.*, hlm. 62

<sup>88</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, (Semarang:Toha Putra Semarang, 1996) hlm. 90

<sup>89</sup> H. M. Hasbi Umar, *op.cit.*, hlm. 126

tingkatan *daruriyyat* harus lebih didahulukan daripada tingkatan *hajiyyat*. Begitulah seterusnya jika terjadi pertentangan dalam penerapan tingkatan masalah, maka prioritas sesuai dengan urutannya.<sup>90</sup>

### C. TINJAUAN UMUM PERTIMBANGAN HAKIM DAN PENAFSIRAN HUKUM

#### 1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>91</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan pengadilan yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>92</sup>

Selain itu pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>93</sup>

Pertimbangan hakim mengenai pokok perkara yang ditangani akan dituangkan dalam sebuah putusan. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>94</sup> Pembukaan sidang dan sidang untuk amar putusan wajib dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dikategorikan sebagai tindakan yang lalai memnuhi syarat yang digariskan undang-undang yang oleh undang-undang sendiri mengancam dengan batalnya putusan

<sup>90</sup> Shaipuddin Shidiq, *op.cit.*, hlm. 230

<sup>91</sup> Mukti Arto, *op.cit.*, hlm. 140

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 141

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 142

<sup>94</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty, 1993) hlm. 174

demi hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menyatakan :

- (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>95</sup>

## 2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 Ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>96</sup> Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>97</sup>

Kebebasan hakim juga perlu dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) mengemukakan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>98</sup>

## 3. Pengertian Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

<sup>95</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta:PrenadaMedia Group:2015) hlm. 43

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 142

<sup>97</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1996) hlm. 94

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 95



Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Disini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.<sup>99</sup>

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara kongkrit.<sup>100</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengadili perkara, hakim bukan hanya sebagai mulut atau corong undang-undang, melainkan selalu harus menafsirkan atau fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, diterapkan dengan ketentuan undang-undang, sehingga mendapatkan keyakinan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Disamping itu menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sebagai berikut :

- a. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- c. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.<sup>101</sup>

Hakim dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara harus berdasarkan hukum dan juga keyakinannya, bukan berdasarkan logika hukum. Purwoto S. Gondosubroto yang ditulis oleh P. Wignyosumarto menyatakan sebagai berikut :

- a. Dalam kasus yang hukumnya, atau undang-undang-undangnya sudah jelas, hakim hanya menerapkan hukumnya (hakim menjadi terompet undang-undang).
- b. Dalam kasus yang hukum dan undang-undangnya tidak atau belum jelas, hakim harus menafsirkan hukum atau undang-undang, melalui cara-cara metode yang berlaku dalam ilmu hukum.
- c. Dalam kasus dimana terjadi pelanggaran/penerapan hukum yang bertentangan dengan hukum/undang-undang yang berlaku, hakim akan menggunakan hak mengujinya berupa *formeietoetsingrecht* atau *meteriele teotsingrecht*.<sup>102</sup>

<sup>99</sup> Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Al-Adl*, Vol. VI, No. 11, Januari-Juni 2014., hlm. 10

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 11

<sup>101</sup> Agus Priono, Widodo T. Novianto, I Gusti Ayu Ketutu Rachmi Handayani, "Penerapan Teori Penafsiran Hukum oleh Hakim sebagai Upaya Perlindungan hukum, Hlm. 120

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 120

Berkaitan dengan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka pemakaian teori-teori penemuan dan penafsiran hukum dapat dilakukan dalam memutuskan sesuatu perkara untuk kasus-kasus hukum/undang-undang yang tidak/belum jelas. Namun pemakaian teori penemuan dan penafsiran hukum harus dilakukan dengan cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum. Alasan digunakannya teori penafsiran hukum oleh hakim dalam mengadili suatu perkara disebabkan hampir tidak mungkin hukum bisa dijalankan tanpa membuka pintu bagi penafsiran. penafsiran hukum merupakan aktifitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis, dimana sebuah adagium yang menyebutkan bahwa membaca hukum adalah menafsirkan hukum. Teks hukm sudah jelas adalah satu cara saja bagi pembuat hukum untuk bertindak pragmatis seraya diam-diam mengakui bahwa ia mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan.<sup>103</sup>

Adapun asas yang mewadahi hakim di dalam menemukan hukum itu adalah sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Melalui asas-asas hukum tersebut menjadi jelas bahwa tidak ada suatu persoalan atau permasalahan hukum yang tidak ada hukum yang mengaturnya. bagi Hakim selalu ada dasar dan alasannya di dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Persoalan bukan lagi kepada ada tidaknya atau jelas tidaknya hukum bagi hakim di dalam memutus suatu perkara, melainkan bagaimana hakim dalam memutus itu.<sup>104</sup>

Realitas menunjukkan bahwa seringkali terjadi pertentangan antara nilai-nilai yang satu dengan yang lainnya, misal antara keadilan dan kepastian hukum atau antara kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini menyebabkan tiga unsur esensial hukum tersebut sulit terwujud secara bersama-sama, dan bahkan lebih sering terjadi konflik antara ketiganya, dimana pada kenyataan hal ini disebabkan peraturan undang-undang cenderung mengabaikan realitas sosial dan bahkan adanya ketentuan undang-undang yang tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat.

Disisi lain kualitas keputusan yang diambil oleh hakim mempunyai pengaruh yang penting pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga peradilan. Sehingga rendahnya keputusan atau vonis hakim jelas akan menurunkan wibawa dan kredibilitas pengadilan, namun hakim adalah manusia yang resistensinya terbatas bila menghadapi pengaruh-pengaruh yang senantiasa berada di sekelilingnya, sehingga hal ini seringkali menyebabkan hakim tidak bisa berpikir obyektif dan bebas ketika hendak mengambil suatu keputusan atas suatu perkara.

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 120

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 120

Kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia bukan keadilan subyektif menurut pengertian atau kehendak hakim semata. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya kebebasan dan kemandirian yang diberikan lembaga peradilan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena dalam menjalankan kemandiriannya hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi serta peraturan perundang-undangan yang mengatur kemerdekaan tersebut.<sup>105</sup>

Menurut Van Doom, dalam kedudukannya sebagai pemegang fungsi dalam rangka suatu organisasi, seorang penegak hukum cenderung menjalankan fungsinya itu menurut penafsirannya sendiri yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, misalnya kepribadiannya, ekonominya, pandangan hidupnya, dan sebagainya. Disisi lain karena rutinitas pekerjaannya membuat keputusan atau vonis seringkali hakim mengabaikan standar normatif yang harus ditempuh untuk membuat suatu keputusan yang terkesan asal jadi/asal-asalan, apalagi kalau hal tersebut hanya menyangkut perkara-perkara yang rutin setiap hari ditanganinya, padahal kekuatan moral suatu keputusan hakim terletak pada pertimbangan-pertimbangannya itu. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dapat menggunakan teori penemuan hukum.<sup>106</sup>

#### 4. Macam-macam Penafsiran Hukum

Keputusan hakim atau yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum. Hakim memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya kepastian hukum. Namun dalam beberapa hal undang-undang tidak menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai perkara yang ditanganinya. Untuk itu hakim wajib melakukan penafsiran guna menangani perkara yang ditanganinya tersebut.<sup>107</sup> Penafsiran hukum (*legal interpretation*) senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan untuk memperjelas tentang ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang sudah ada, yang dapat diberlakukan bagi suatu aspek kehidupan tertentu. Pembentukan hukum bertujuan untuk membentuk, menyusun, atau membangun hukum bagi aspek kehidupan tertentu yang belum ada hukumnya.<sup>108</sup> Macam-macam penafsiran hukum antara lain :

##### a. Penafsiran Tata Bahasa (Gramatikal)

Penafsiran gramatikal adalah penafsiran hukum berdasarkan tata bahasa yang dilakukan terhadap konservasi tersebut tidak hanya mencakup proteksi dan preservasi, namun juga termasuk kegiatan pemanfaatan lestari yang berkelanjutan dengan berbasis pada konservasi.<sup>109</sup> Penafsiran gramatikal ketentuan yang terdapat di peraturan

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 121

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 121-122

<sup>107</sup> Wibowo T. Tunardy, "Penafsiran Hukum/Interpretasi Hukum", <https://www.jurnalhukum.com> diakses pada 13 Mei 2020

<sup>108</sup> Tommy Hendra Purwaka, "Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum yang Rasional", *MMH*, Jilid 40, No. 2, (April 2011), *ejournal.undip*, hlm. 117

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 117-118

perundang-undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan.<sup>110</sup> Penafsiran gramatikal merupakan penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku. Menurut Vissert't Hoft di negara-negara yang menganut tertib hukum kodifikasi, makna teks harfiah undang-undang sangat penting. Namun, penafsiran gramatikal saja dianggap tidak mencukupi, apalagi jika mengenai norma yang hendak ditafsirkan itu sudah jadi perdebatan.<sup>111</sup>

#### **b. Penafsiran Komparatif**

Penafsiran komparatif adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan membandingkan hasil penafsiran dari suatu peraturan dengan hasil penafsiran lainnya, sehingga dapat diperoleh suatu kejelasan tentang hukum yang perlu dibentuk untuk diberlakukan. Sebagai contoh adalah upaya untuk membandingkan hasil penafsiran dari suatu peraturan-peraturan perlindungan hak paten yang berlaku di beberapa negara dengan tujuan untuk memperoleh materi hukum bagi penyusun RPP bagi pelaksanaan UU Paten.<sup>112</sup>

#### **c. Penafsiran Futuristis**

Penafsiran futuristis adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan mengacu pada rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan di masa yang akan datang. Sebagai contoh adalah penafsiran terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memperhatikan beberapa RPP dari kedua UU yang akan diterbitkan.<sup>113</sup>

#### **d. Penafsiran Analogis**

Penafsiran analogis adalah penafsiran hukum yang dilakukan terhadap isi peraturan perundang-undangan yang memiliki kemiripan (analog) dengan perbuatan hukum, hubungan hukum, dan peristiwa hukum tertentu yang belum ada aturannya. Hasil penafsiran analogis kemudian diterapkan sebagai landasan hukum bagi perbuatan hukum, hubungan hukum, dan peristiwa hukum yang memiliki kemiripan tersebut. jadi landasan hukum tersebut merupakan hukum yang dibentuk melalui penafsiran analogis.<sup>114</sup>

#### **e. Penafsiran Historis (Sejarah)**

Penafsiran sejarah adalah penafsiran hukum yang dilakukan terhadap sejarah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, mulai dari munculnya gagasan sampai dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>115</sup> Penafsiran historis dilakukan berdasarkan :

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 117

<sup>111</sup> Afif Khalid, *op.cit.*, hlm. 12

<sup>112</sup> Tommy Hendra Purwaka, *op.cit.*, hlm. 119

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 119

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm. 118

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 118

- 1) Sejarah hukumnya, yaitu berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut. penafsiran ini memfokuskan diri pada latar belakang sejarah perumusan naskah. Bagaimana perdebatan yang terjadi ketika naskah itu hendak dirumuskan. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah kajian mendalam tentang notulen-notulen rapat, catatan-catatan pribadi peserta rapat, tulisan-tulisan peserta rapat yang tersedia baik dalam bentuk tulisan ilmiah maupun komentar tertulis yang pernah dibuat, otobiografi yang bersangkutan, hasil wawancara yang dibuat oleh wartawan dengan yang bersangkutan, atau wawancara khusus yang sengaja dilakukan untuk keperluan menelaah peristiwa yang bersangkutan.
- 2) Sejarah undang-undangnya, yaitu dengan menyelidiki maksud pembentuk undang-undang pada saat membentuk undang-undang tersebut. penafsiran ini mencari makna yang dikaitkan dengan konteks kemasyarakatan masa lampau. Dalam pencarian makna tersebut juga kita merujuk kepada norma-norma hukum masa lalu yang masih relevan.<sup>116</sup>

Menurut Sclthen, bagi hakim makna penafsiran historis berdasarkan kebutuhan praktik. Pada umumnya bagi hakim ialah mengetahui maksud pembuat naskah hukum yang ditetapkan. Hukum bersifat dinamis dan perkembangan hukum mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, makna yang dapat diberikan kepada suatu kata dalam naskah hukum positif sekarang berbeda dengan maknanya pada waktu ditetapkan oleh karena sebab itu pula, penafsiran menurut sejarah hakikatnya hanya merupakan pedoman saja. Akan tetapi penafsiran historis tidak hanya menelaah risalah sebagai *story* perumusan naskah, tetapi menelaah sejarah sosial, politik, ekonomi, dan *social event* lainnya ketika rumusan naskah tersebut dibahas.<sup>117</sup>

#### **f. Penafsiran Sistematis**

Penafsiran sistematis adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan memberi arti dan makna isi suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan tata urutan materi peraturan perundang-undangan, yaitu mulai dari judul, menimbang, mengingat, memutuskan, bunyi pasal demi pasal, penjelasan umum, penjelasan pasal demi pasal. Gabungan dari hasil penafsiran sistematis ini akan memberi pemahaman tentang hukum yang berlaku bagi bidang kegiatan tertentu.<sup>118</sup>

#### **g. Penafsiran Teleologis (Sosiologis)**

Penafsiran sosiologis merupakan penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut. penafsiran sosiologis dilakukan karena terdapat perubahan di masyarakat, sedangkan bunyi undang-undang tidak berubah.<sup>119</sup> Penafsiran ini difokuskan pada penguraian kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa pada kaidah hukum terkandung tujuan atau asas dan bahwa tujuan dan atau asas tersebut

<sup>116</sup>Afif Khalid, *op.cit.*, hlm. 13

<sup>117</sup>Afif Khalid, *op.cit.*, hlm. 17

<sup>118</sup>*Ibid.*, hlm. 118

<sup>119</sup>Wibowo T. Tunardy, *op.cit.*

mempengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kemasyarakatan yang aktual.<sup>120</sup>

#### **h. Penafsiran Ekstensif**

Penafsiran ekstensif adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk memperluas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.<sup>121</sup>

#### **i. Penafsiran Restriktif (Penghalusan Hukum)**

Penafsiran restriktif adalah penafsiran hukum yang dilakukan terhadap untuk mempersempit berlakunya peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penetapan Kawasan Konservasi jo. adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk mempersempit berlakunya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 hanya bagi pengelola kawasan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>122</sup>

#### **j. Penafsiran A Contrario (Menurut Peringkaran)**

Penafsiran a contrario adalah penafsiran hukum yang dilakukan secara berlawanan untuk dapat mengetahui hukum yang berlaku.<sup>123</sup>

### **D. TINJAUAN UMUM TEORI KEADILAN**

#### **1. Pengertian Teori Keadilan**

Istilah keadilan (*iustisia*) berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, sepatutnya tidak sewenang-wenang.<sup>124</sup> Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang menjadi tuntutan persamaan hak dalam pemenuhan kewajiban. Hal tersebut dalam rangka menjaga kelestarian dan kebahagiaan kehidupan umat manusia.<sup>125</sup>

Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada masa itu, bersalah dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya, pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filosof.<sup>126</sup>

#### **2. Keadilan Menurut Para Tokoh**

Berikut ini adalah konsep mengenai keadilan menurut beberapa tokoh

##### **a. Aristoteles**

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutny di dalam suatu negara segala sesuatunya harus diarahkan apda cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus dilihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles,

<sup>120</sup> Afif Khalid., *op.cit.*, hlm. 14

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm. 118

<sup>122</sup> *Ibid.*, hlm. 118

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 118

<sup>124</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pustaka Pelajar, 2001) hlm. 517

<sup>125</sup> Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam" *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Mazahib*, Vol. XIV, No. 2, Desember 2015., hlm. 262

<sup>126</sup> Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 2, Mei- Agustus 2014, hlm. 119

dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama. Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksetaraan hak. Teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.<sup>127</sup>

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.<sup>128</sup> Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, apa arti keadilan, dan adiantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.<sup>129</sup>

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai unit ayau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.<sup>130</sup>

### 1) Keadilan dalam Arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap atau karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.<sup>131</sup>

Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap objek tertentu yang berisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu :

- a) Jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui.
- b) Kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”.

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih , diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan mematuhi hukum adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka,

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 120

<sup>128</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachean.html>. Diakses pada 12 Mei 2020

<sup>129</sup> *Ibid*

<sup>130</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Prespektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004) hlm. 24

<sup>131</sup> Aristoteles, *Nicholam....*, *op.cit*

tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.<sup>132</sup>

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan terhadap diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan bagi sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.<sup>133</sup> Bagi Aristoteles keutamaan yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum.<sup>134</sup>

## 2) Keadilan dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu :

- a) Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan dan kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.<sup>135</sup>
- b) Perbaikan suatu bagian dalam transaksi  
Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik

<sup>132</sup> *Ibid*

<sup>133</sup> *Ibid*

<sup>134</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Yogyakarta:Universitas Atma Jaya, 2015) hlm. 241

<sup>135</sup> *Ibid*



(*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dus keadilan adalah ketidaksetaraan. Ketidakadilan terjadi jika suatu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungannya yang dibuat secara sederajat. Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman. Hal ini berbeda apabila terjalim bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan berlaku keadilan korektif. Yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengijinkan orang yang dilukai untuk melukai balik. Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan adil dan diperlakukan tidak adil.<sup>136</sup>

Keadilan bagi Aristoteles merupakan keutamaan yang sempurna. Di dalam keadilan segala keutamaan ditemukan sepenuhnya. Keadilan dianggap lebih baik dari keutamaan yang lain karena dilakukan demi kebaikan hidup banyak orang. Konteks keadilan Aristoteles adalah di dalam suatu *polis*. Dalam keadilan politik Aristoteles menampilkan otoritas yang berwajib. Otoritas ini harus ditaati oleh setiap warga *polis* guna mencapai kebaikan bersama.<sup>137</sup> Keadilan menurut Aristoteles dibedakan menjadi :

### 1) Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah dilakukannya. Keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk ke dalam keadilan komutatif. Objek dari hak pihak lain dalam keadaan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Objek hak milik ini bermacam-

<sup>136</sup> *Ibid*

<sup>137</sup> Pinsensius Meji, "Konsep Keadilan Menurut Aristoteles dalam Buku *Nicomachean Ethics* Buku Lama, *skripsis* Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya, 2019., hlm. ix

macam mulai dari kepentingan fisik dan normal, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>138</sup>

## 2) Keadilan distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, dan sifatnya proporsional. Disini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*divided goods*) yaitu kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, dimana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadilan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.<sup>139</sup>

### b. John Rawl

Keadilan menurut John Rawl adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapa elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapa pun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. John Rawl mendefinisikan keadilan sebagai *fairness*, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. dalam keadilan sebagai *fairness* posisi kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam tradisional kontrak sosial. John Rawl mengasumsikan bahwa posisi asali ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai

<sup>138</sup>Bahder Johan Nasution, *op.cit.*, hlm. 121

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm. 121

kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati kepada konsepsi keadilan tertentu.<sup>140</sup>

### c. Plato

Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan diluar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber keadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:

- 1) Pemilihan kelas-kelas yang tegas, misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia.
- 2) Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya, perhatian khusus terhadap kelas ini ada persatuannya., dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.
- 3) Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan, dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas pengguna ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan.
- 4) Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyengkrum pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.
- 5) Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri jadi pedagang. Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.<sup>141</sup>

Untuk mengembalikan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antar individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana Individu melayani negara.<sup>142</sup>

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaanya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak bisa diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, diluar

<sup>140</sup> John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2011) hlm. 13

<sup>141</sup> Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya (The Open Society and Its Enemy)*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hlm. 110

<sup>142</sup> *Ibid.*, hlm. 110

pengalaman manusia, dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.<sup>143</sup> Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*.<sup>144</sup>

---

<sup>143</sup> W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum (Legal Theory)*, Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan Kedua, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1993) hlm. 117

<sup>144</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Cetakan II Edisi Revisi, (Bandung:Pustaka Mizan, 1997) hlm. 1

### BAB III

## PROFIL PENGADILAN AGAMA KENDAL DAN PUTUSAN PERKARA GUGATAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

#### A. Profil Pengadilan Agama Kendal

##### 1. Sekilas Sejarah Pengadilan Agama Kendal

Peradilan atau *rechtspraak* dalam bahasa Belanda *judiciary* dengan bahasa Inggris adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Dapat juga diartikan badan yang melakukan peradilan yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Peradilan berasal dari kata adil yang artinya proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum dihadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku. Peradilan merupakan suatu pengertian umum yang artinya proses mengadili dan proses mencari keadilan. Pengadilan merupakan pengertian khusus yaitu suatu lembaga tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kekuasaan absolut dan relatif sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>145</sup>

Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan kewenangan mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Khususnya dalam hal peradilan agama terdiri dari Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding.<sup>146</sup>

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan yaitu badan peradilan agama, peradilan militer, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara. Berlakunya prinsip satu atap, organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, termasuk didalamnya pengawasan dan pembinaan teknis, akan tetapi pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>147</sup>

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama disebutkan bahwa Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, sedangkan pengertian Pengadilan disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 bahwa pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan peradilan agama. Pengertian tersebut menggambarkan seolah-olah Peradilan Agama sebagai peradilan Islam yang bersifat universal. Menurut konsep Islam secara universal

<sup>145</sup> Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta, Kencana:2005) hlm. 5-6

<sup>146</sup> *Ibid.*, hlm. 6

<sup>147</sup> Mardani., *Op.cit.*, hlm. 66

Peradilan Agama adalah peradilan Islam karena jenis-jenis perkara yang menjadi kompetensinya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Namun Peradilan Agama merupakan peradilan yang bersifat limitatif sebagaimana ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga kompetensi peradilan agama tidak mencakup kompetensi menurut peradilan Islam secara universal.<sup>148</sup>

Pengadilan Agama Kendal pada awalnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang berada di belakang Masjid Agung Kendal. Kemudian pada tahun 1977 Pengadilan Agama Kendal membeli tanah milik H. Muchtar Chudlori yang berada di Jalan Laut No. 17A seluas 750 m<sup>2</sup>, dan dalam pembuatan sertifikatnya baru terlaksana pada tahun 1980, diatas tanah inilah dibangun kantor Pengadilan Agama Kendal. Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153 m<sup>2</sup> dimulai pada 1979.<sup>149</sup>

Semakin berkembangnya Pengadilan Agama Kendal, maka pada tahun anggaran 1982/1982 diadakan perluasan tahap kedua dengan luas 120 m<sup>2</sup>, selanjutnya pada tahap ketiga tahun 1989 dilaksanakan perluasan gedung seluas 77 m<sup>2</sup> dengan menggunakan anggaran DIPA tahun 1988/1989. Tahun 2012 Pengadilan Agama Kendal menempati gedung seluas 420 m<sup>2</sup> dengan luas tanah 750 m<sup>2</sup>. Pada tahun 2011 telah dimulai pembangunan gedung kantor baru diatas tanah milik Pengadilan agama kendal seluas 1000 m<sup>2</sup> dengan luas tanah sekitar 7.902 m<sup>2</sup> di kecamatan Brongsong. Tahun 2012 dilanjutkan tahap kedua untuk penyelesaian pembangunan gedung pengadilan agama kendal.<sup>150</sup>

Pengadilan Agama Kendal menempati kantor baru yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Km. 4 Brongsong, Kabupaten Kendal pada bulan Januari 2013, dan dibangun pula musola yang pembangunannya dimulai pada bulan Maret tahun 2013 dan telah diresmikan pada bulan Juni tahun 2014 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H., M.H., yang diberi nama mushola al-Hikmah. Adapun pembangunan tersebut menghabiskan biaya Rp. 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dalam pendanaan tersebut, sebagian besar berasal dari swadaya pegawai Pengadilan Agama Kendal.<sup>151</sup>

Pengadilan Agama Kendal merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah yang berada di Kota Semarang dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menjadi wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Agama kelas IA Kendal yang terdiri dari Kecamatan sebagai berikut:

- a. Wilayah Radius I : Kota Kendal
- b. Wilayah Radius II : Brongsong, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Patebon, Cepiring, Gemuh, Pegandon, Weleri, Rowosari, Kangkung, Ringinarum, Ngampel
- c. Wilayah radius III : Sukorejo, Pageruyung, Plantungan, Patean, Boja, Singorojo, Limbangan

<sup>148</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali, 1990) hlm. 6

<sup>149</sup> [www.pa-kendal.go.id](http://www.pa-kendal.go.id) diakses pada 5 Maret 2020

<sup>150</sup> [www.pa-kendal.go.id](http://www.pa-kendal.go.id) diakses pada 6 Maret 2020

<sup>151</sup> [www.pa-kendal.go.id](http://www.pa-kendal.go.id) diakses pada 6 Maret 2020

d. Wilayah Radius LK : Luar Kota/Luar Wilayah<sup>152</sup>

Secara resmi Pengadilan Agama dibentuk pada tahun 1950, adapun nama-nama yang pernah dan sedang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kendal adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 1950-1959 diketuai oleh KH. Abdurahman Iman;
- b. Tahun 1965-1975 diketuai oleh Kiai Achmad Slamet;
- c. Tahun 1975-1977 diketuai oleh KR. Moh. Amin;
- d. Tahun 1980-1990 diketuai oleh Drs. H. Asy'ari;
- e. Tahun 1990-1997 diketuai oleh Drs. Ahmad Mustofa, S.H.
- f. Tahun 1997-1999 diketuai oleh Drs. Muh Hazin;
- g. Tahun 1999-2000 diketuai oleh Drs. J. Thantowie Ghani, S.H.
- h. Tahun 2000-2002 diketuai oleh Drs. Yasmidi, S.H.
- i. Tahun 2002-2004 diketuai oleh Drs. H. Izzudin M., S.H.
- j. Tahun 2004-2007 diketuai oleh Drs. A. Agus Bahauddin, M. Hum.
- k. Tahun 2007-2011 diketuai oleh Drs. Yusuf Buchori, S.H., M.Si
- l. Tahun 2011-2013 diketuai oleh Drs.H.A. Sahal Maksun, M.Si
- m. Tahun 2013-2015 diketuai oleh H. Samidjo, S.H., M.H.
- n. Tahun 2015-2016 diketuai oleh Drs. H. Kaharrudin, S.H., M.H.
- o. Tahun 2016-2020 diketuai oleh Drs. H. Sarmin, M.H.
- p. Tahun 2020-sekarang diketuai oleh Drs. Kholis, M.H.

Pemaparan diatas merupakan sekilas sejarah Pengadilan Agama Kelas 1A kendal yang merupakan pengadilan tingkat pertama bagi orang islam yang berada di kabupaten Kendal.

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal

Berdasarkan tugas dan fungsi Pengadilan Agama sebagaimana tela ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka visi Pengadilan Agama kendal Kelas I-A yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung”.<sup>153</sup>

Visi tersebut dijabarkan kedalam misi yang merupakan acuan utama setiap kebijakan yang akan diambil yaitu:

- a. Menyelenggarakan pelayanan yutisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat
- b. Menyelenggarakan pelayanan yutisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme
- c. Mengembangkan penerapan management modern dalam kepengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana, rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan

<sup>152</sup> [www.pa-kendal.go.id](http://www.pa-kendal.go.id) diakses pada 6 Maret 2020

<sup>153</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A Tahun 2018, hlm. 6

- d. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan<sup>154</sup>

### 3. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Kendal

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>155</sup>

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama disebutkan bahwa Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, sedangkan pengertian Pengadilan disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 bahwa pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan peradilan agama. Pengertian tersebut menggambarkan seolah-olah Peradilan Agama sebagai peradilan Islam yang bersifat universal. Menurut konsep Islam secara universal Peradilan Agama adalah peradilan Islam karena jenis-jenis perkara yang menjadi kompetensinya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Namun Peradilan Agama merupakan peradilan yang bersifat limitatif sebagaimana ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga kompetensi peradilan agama tidak mencakup kompetensi menurut peradilan Islam secara universal.<sup>156</sup>

Kewenangan peradilan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materiil hukum. Kompetensi absolut Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syariah<sup>157</sup>

Secara rinci kewenangan Peradilan Agama sebagai berikut :

- a. Perkara perkawinan, meliputi :
  - 1) Izin beristeri lebih dari satu orang (poligami)

<sup>154</sup> *Ibid.*, hlm. 6

<sup>155</sup> Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perdata pada Peradila Agama*, (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2008) hlm. 14

<sup>156</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali, 1990) hlm. 6

<sup>157</sup> Mardani, *Op.cit.*, Hlm. 54



- 2) Izin melakukan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
  - 3) Dispensasi kawin
  - 4) Pencegahan kawin
  - 5) Penolakan kawin oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah)
  - 6) Pembatalan perkawinan
  - 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri
  - 8) Perceraian karena talak
  - 9) Gugatan perceraian
  - 10) Penyelesaian harta bersama (gono-gini)
  - 11) Pengasuhan anak
  - 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila Bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya
  - 13) Ketentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan kewajiban bagi bekas istri
  - 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
  - 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
  - 16) Pencabutan kekuasaan wali
  - 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
  - 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
  - 19) Pembebanan kewajiban ganti rugi terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya
  - 20) Putusan asal-usul anak
  - 21) Putusan tentang pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
  - 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain
  - 23) *Wali adhal*, yaitu wali yang enggan atau menolak menikahkan anak perempuannya dengan pria pilihan anaknya itu.<sup>158</sup>
- b. Perkara kewarisan, wasiat, dan hibah, meliputi;
- 1) Siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang meliputi penentuan kelompok ahli waris, siapa yang berhak mewarisi, siapa yang terhalang menjadi ahli waris, dan penentuan hak dan kewajiban ahli waris
  - 2) Penentuan mengenai harta peninggalan, antara lain tentang penentuan *tirkah* yang dapat diwarisi dan penentuan tentang besarnya harta warisan;
  - 3) Penentuan bagian harta waris

---

<sup>158</sup> *Ibid.*, hlm. 55

- 4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan
- 5) Penentuan kewajiban ahli waris terhadap pewaris<sup>159</sup>
- 6) Pengangkatan wali bagi ahli waris yang tidak cakap bertindak;

c. Perkara Zakat, Infaq, Shadaqah

Hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam hal zakat, infak, dan shadaqah adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan zakat, infak, shadaqah bertentangan dengan asas dan tujuan zakat;
- 2) Organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, dan pendayagunaan zakat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam hal wakaf adalah sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan harta wakaf bertentangan dengan tujuan dan fungsi wakaf;
- 2) Sengketa harta benda wakaf;
- 3) Sah atau tidaknya wakaf/sertifikasi harta wakaf;
- 4) Pengalihan fungsi harta wakaf/perubahan status harta benda wakaf;
- 5) Ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam buku III Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

d. Perkara-Perkara Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi:

- 1) Bank Syariah
- 2) Asuransi Syariah
- 3) Reasuransi Syariah
- 4) Reksadana Syariah
- 5) Obligasi Syariah Dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah
- 6) Sekruitas Syariah
- 7) Pembiayaan Syariah
- 8) Pegadaian Syariah
- 9) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
- 10) Lembaga Keuangan Mikro Syariah<sup>160</sup>

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal

Peradilan agama sebagai peradilan tingkat pertama adalah peradilan yang memelihara, memeriksa, dan memutus setiap perkara yang diajukan pencari keadilan di tahap awal. Peradilan agama pada tingkat pertama dan peradilan tinggi agama pada tingkat banding

---

<sup>159</sup> *Ibid.*, hlm. 56

<sup>160</sup> *Ibid.*, hlm. 56

<sup>163</sup> [www.pa-kendal.go.id](http://www.pa-kendal.go.id) diakses pada 6 Maret 2020

## B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl

Kasus atau masalah harta bersama dalam skripsi ini diambil dari Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl yang terjadi pada tahun 2008 dan terdaftar pada buku register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal. Adapun yang menjadi alasan gugatan harta bersama ini adalah Penggugat sudah berulang kali berusaha menyelesaikan persoalan harta gono gini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Sehingga Penggugat membawa kasus ini ke ranah litigasi dan memohon kepada majelis hakim untuk membagi harta gono-gini sebesar 2/3 untuk Penggugat dan 1/3 untuk Tergugat, dikarenakan semua objek sengketa yang ada dalam gugatan tersebut adalah hasil kerja Penggugat selama bekerja sebagai TKW.<sup>164</sup>

### 1. Keterangan Penggugat

#### a. Pengakuan dan Tuntutan Penggugat

Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl identitas Penggugat adalah sebagai berikut:

Nama	: Purwati binti Sumadi
Umur	: 41 tahun,
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: pekerjaan mengurus rumah tangga,
Alamat	: semula bertempat tinggal di Desa Pucangrejo, RT 010, RW 003, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan sekarang bertempat tinggal di Karangayu, RT 004, RW 003, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal

Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya Moh. Arifin, S.Ag., M. Hum., Ashari, S.Ag., M.H., dan Moh Nur Abidin, S.H.I., para advokat dari Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang sesuai surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2019 sebagai berikut :

Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl tanggal 02 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari sabtu tanggal 05 Desember 1998, sesuai hukum Islam yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, dan sejak 02 April 2019 telah terjadi perceraian berdasarkan putusan pengadilan agama kendal No. 199/Pdt.G/2019/PA.Kdl tanggal 11 Maret 2019;
- b. Penggugat dan Tergugat selama membangun kehidupan rumah tangga Penggugat bekerja menjadi TKW di Singapura dari tahun 2000 sampai dengan 2001 dan di

<sup>164</sup> Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl hlm. 2

Hongkong dari tahun 2002 sampai sekarang, sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;

- c. Bahwa hasil kerja Penggugat selama menjadi TKW digunakan untuk membeli barang-barang rumah tangga (mebeler), membuat rumah, membeli pekarangan dan sawah, yaitu :
  - 1) Sebidang sawah SHM Nomor 73, atas nama Muslikun Sumai Purwati, luas 1950 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - a) Sebelah utara : tanah milik Semi
    - b) Sebelah selatan : tanah milik Sarinah
    - c) Sebelah barat : jalan
    - d) Sebelah timur : kalen air
  - 2) Sebidang tanah pekarangan seluas ± 90 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pucangrejo RT 010, RW 003, Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - a) Sebelah utara : tanah pekarangan Rakan
    - b) Sebelah selatan : rumah Purwati dan Muchlisun
    - c) Sebelah barat : tanah Kamijan
    - d) Sebelah timur : tanah Rakan dan Solekan
  - 3) Sebuah bangunan rumah luas ± 104 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pucangrejo RT 010, RW 003, Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - a) Sebelah utara : tanah Purwati dan Muchlisun
    - b) Sebelah selatan : jalan kampung
    - c) Sebelah barat : tanah Kamijan
    - d) Sebelah timur : tanah Solekan
  - 4) Perabot rumah tangga, antara lain:
    - a) Almari kayu jati 4 (empat) buah;
    - b) Almari bifet besar 1 (satu) buah;
    - c) Almari bifet tanggung kaca 1 (satu) buah;
    - d) Almari sepatu dan isinya 1 (satu) buah;
    - e) Almari belajar tempat buku 1 (satu) buah;
    - f) Almari rak piring 1 (satu) buah;
    - g) Hiasan dinding 4 (empat) buah;
    - h) Peralatan dapur (kulkas, mesin cuci);
    - i) Meja kursi tamu satu set<sup>165</sup>

Dalam kasus ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal agar berkenan dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

- a. Meminta dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

---

<sup>165</sup> Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl hlm. 2-3

- b. Menyatakan objek sengketa diatas adalah harta gono gini Penggugat dan Tergugat
- c. Menentukan dan menetapkan bagian masing-masing pihak, untuk Penggugat 2/3 dan untuk Tergugat 1/3 dari semua harta gono gini
- d. Membagi harta gono gini secara natural, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, mohon dibagi dan dijual melalui lelang
- e. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan 2/3 harta gono gini kepada Penggugat
- f. Menetapkan biaya menurut hukum

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et Bono*).

## 2. Keterangan Tergugat

Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl identitas Penggugat adalah sebagai berikut:

Nama : Muchlisun bin Matari  
 Umur : 49 tahun  
 Agama : Islam  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : karyawan pabrik  
 Alamat : Desa Pucangrejo, RT 010, RW 003, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah

Tergugat diwakili oleh Nur Chozin, S.H., Mashadi, S.Ag., S.H., M.h., Faqih Khoironi, S.H., M. H., dan Muhammad Ainul Fuad, S.H.I., para advokat dari Kantor AdvBokat Lawyersantun Nur Chozin, S.H., dan Partner berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2019 telah memberikan jawaban tertulis pada tanggal 20 November 2019 yang dalam pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- 1) Semua objek sengketa yang disampaikan Penggugat tidak disebutkan kapan memperolehnya apakah dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atau tidak, dalam gugatan a quo tidak disebutkan Penggugat
- 2) Posita 3 huruf b gugatan Penggugat objeknya tidak jelas karena Penggugat menyebutkan status tanah pekarangan objek sengketa II, apakah sudah bersertifikat hak milik ataukah belum, atas nama siapa tanah objek sengketa tersebut semuanya tidak jelas
- 3) Posita 3 huruf c gugatan Penggugat objeknya juga tidak jelas karena Penggugat tidak menyebutkan rumah objek sengketa III itu diatas tanah milik siapa, rumahnya permanen atau kayu, sehingga tidak jelas (*obscur libel*), dengan demikian sangat beralasan hukum apabila dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini
- 2) Tergugat mohon agar yang termuat dalam eksepsi dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini
- 3) Benar posita 1 dan 2 gugatan Penggugat
- 4) Tergugat membantah posita 3 gugatan Penggugat, karena untuk membeli harta bersama Tergugat juga ikut andil mengeluarkan uang bahkan Tergugat juga andil besar untuk mengelola serta merawat harta bersama tersebut, jadi tidak sepenuhnya dari hasil Penggugat bekerja

Selanjutnya terhadap objek sengketa sebagaimana disampaikan Penggugat dengan ini Tergugat memberi tanggapan sebagai berikut :

- 1) Tergugat mengakui adanya objek sengketa berupa sebidang sawah SHM. Nomor 73
- 2) Objek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 90 m<sup>2</sup> perkara a quo tidak jelas, sehingga Penggugat tidak menanggapinya
- 3) Objek sengketa berupa bangunan rumah seluas kurang lebih 104 m<sup>2</sup>, tidak jelas bangunan rumah mana yang dimaksud Penggugat. Hal ini perlu Tergugat sampaikan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada harta bersama berupa rumah, namun yang ada hanyalah Penggugat dan Tergugat hanya merenovasi rumah milik orang tua Tergugat untuk dijadikan kediaman bersama.
- 4) Objek sengketa berupa perabot rumah tangga yang masih ada hingga saat ini hanya :
  - a) Almari kayu 2 buah
  - b) Almari bifet 1 buah
  - c) Almari sepatu 1 buah
  - d) Almarihias 1 buah
  - e) Almari belajar 1 buah
  - f) Almari rak piring 1 buah
  - g) Hiasan dinding 4 buah
  - h) Peralatan dapur (kulkas) 1 buah
  - i) Selebihnya sudah tidak layak pakai sehingga sekarang tidak ada
- 5) Tergugat membantah posita 4 gugatan Penggugat, karena untuk membeli harta bersama Tergugat juga ikut andil mengeluarkan uang bahkan Tergugat juga andil besar dalam mengelola serta merawat harta bersama, jadi tidak sepenuhnya dari hasil Penggugat bekerja
- 6) Tergugat sangat keberatan kalau penyelesaian harta bersama Tergugat hanya mendapat 1/3 bagian, karena itu sangat bertentangan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, apalagi selama ini Tergugat telah merawat dan mengelola dengan baik atas harta bersama tersebut diatas, dan untuk itu

kalau Penggugat menginginkan pembagian harta maka sangatlah adil kalau dibagi 2 (1/2 bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat)

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohon agar yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1) Menerima eksepsi Tergugat
- 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

### **3. Bukti dan Saksi Penggugat**

#### **1) Bukti**

Bukti-bukti yang diajukan Penggugat adalah berupa :

- a) Fotokopi akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendal Nomor 0789/AC/2019/PA. Kdl, tanggal 02 April 2019
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3324105003790001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal Tanggal 06 Agustus 2019
- c) Fotokopi Sertifikat SHM Nomor 73 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kendal Tanggal 04 Februari 2015
- d) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat nomor 0609 tanggal 20 November 2005
- e) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 09 Juli 2006, sebesar Rp 5.800.000
- f) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 01 Februari 2007 sebesar Rp 5.112.800 dan tanggal 26 Juni 2007 sebesar Rp 18.034.500
- g) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 22 Mei 2009 sebesar Rp 3.552.128 dan tanggal 06 Juli 2009 sebesar Rp 1.537.801
- h) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 03 Juli 2009 sebesar Rp 2.099.359 dan tanggal 10 Agustus 2009 sebesar Rp 2.160.602
- i) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 26 November 2009 sebesar Rp 1.324.700 dan tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp 1.179.400



- j) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 06 Desember 2009 sebesar Rp 3.105.600
- k) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 27 Januari 2010 sebesar Rp 1.165.000 tanggal 26 Februari 2010 sebesar Rp 2.118.700, tanggal 28 Maret 2010 sebesar Rp 1.252.800 dan tanggal 01 April 2010 sebesar Rp 1.126.500
- l) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 27 April 2010 sebesar Rp 1.000.000 dan tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp 1.217.000, tanggal 26 Agustus 2010 sebesar Rp 1.115.80, tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp 505.200, tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp 1.300.000 dan tanggal 24 November 2010 sebesar Rp 542.400
- m) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp 16.077.100
- n) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp 542.300 dan tanggal 14 April 2011 sebesar Rp 2.510.000
- o) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp 1.152.200, tanggal 05 Juni 2011 sebesar Rp 1.084.400, tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp 328.600 dan tanggal 6 Juli 2011 sebesar Rp 325.100, tanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp 509.100 dan tanggal 08 Agustus 2011 sebesar Rp 316.000
- p) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal
- q) 18 Agustus 2011 sebesar Rp 1.052.300, dan tanggal 28 November 2011 sebesar Rp 46.378.100
- r) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 5.787.300 dan tanggal 06 Desember 2011 sebesar Rp 9.235.900
- s) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 04 Juli 2012 sebesar Rp 563.700 dan tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp 1.173.900
- t) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 22 Juli 2012 sebesar Rp 1.176.700, tanggal 06 Agustus 2011 sebesar Rp 1.055.000, dan tanggal 09 September 2012 sebesar Rp 1.556.200
- u) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 24 Februari 2013 sebesar Rp 709.800 dan tanggal 24 Maret 2013 sebesar Rp 5.560.800 dan Rp 1.558.100 dan tanggal 25 April 2013 sebesar Rp 535.800, tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp 2.529.700 tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp 2.198.100, tanggal 09 Juli 2013 sebesar Rp 1.514.600 dan tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp 5.233.200
- v) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 31 Agustus 2013 sebesar Rp 15.435.800, tanggal 15 September 2013 sebesar Rp 1.134.000, tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp 2.166.400,

tanggal 04 November 2013 sebesar Rp 539.900, tanggal 20 November 2013 sebesar Rp 552.500, dan tanggal 04 Desember 2013 sebesar Rp 504.100

- w) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 07 Desember 2013 sebesar Rp 527.200 dan tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp 3.545.500
- x) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 03 Januari 2014 sebesar Rp 5.413.400, tanggal 13 Januari 2014 sebesar Rp 2.500.000, dan tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp 1.046.300, tanggal 05 Februari 2014 sebesar Rp 6.233.200, tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp 1.112.400, dan tanggal 25 Februari 2014 sebesar Rp 3.693.300, tanggal 30 Maret 2014 sebesar Rp 1.573.700, tanggal 19 April 2014 sebesar Rp 1.019.100, tanggal 10 Mei 2014 sebesar Rp 3.031.300, tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp 1.037.100, tanggal 03 Juni 2014 sebesar Rp 1.650.100, tanggal 18 Juni 2014 sebesar Rp 3.747.300, tanggal 19 Juni 2014 sebesar Rp 1.027.110, tanggal 15 Juli 2014 sebesar Rp 718.300, tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp 1.505.800
- y) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp 1.044.100 dan tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp 20.015.460
- z) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp 2.528.700
- aa) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 21 Desember 2014 sebesar Rp 10.290.500
- bb) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 01 Februari 2015 sebesar Rp 2.119.200 dan tanggal 16 Februari 2015 sebesar Rp 1.044.900
- cc) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 21 Februari 2015 sebesar Rp 3.235.300, dan tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp 3.628.200, tanggal 11 April 2015 sebesar Rp 535.700, tanggal 06 Juni 2015 sebesar Rp 11.077.900, tanggal 27 Juni 2015 sebesar Rp 4.594.400, dan tanggal 11 Juli 2015 sebesar Rp 2.060.300
- dd) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 01 Agustus 2015 sebesar Rp 1.689.200, tanggal 15 Agustus 2015 sebesar Rp 5.270.900, tanggal 22 Agustus 2015 sebesar Rp 3.066.800, tanggal 17 Oktober 2015 sebesar Rp 3.066.800, dan tanggal 17 Oktober 2015 sebesar Rp 3.581.500, tanggal 03 Oktober 2015 sebesar Rp 1.084.300, dan tanggal 05 Desember 2015 sebesar Rp 2.624.000
- ee) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 05 Januari 2016 sebesar Rp 3.022.600, dan tanggal 23 Januari 2016 sebesar Rp 1.062.600

- ff) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 24 April 2016 sebesar Rp. 2.071.700, tanggal 11 Juni 2016 sebesar 3.034.000, tanggal 25 September 2016 sebesar Rp 2.118.200
- gg) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp 9.059.400, tanggal 31 desember 2016 sebesar Rp 10.382.200
- hh) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 03 Januari 2017 sebesar Rp 10.8228.700
- ii) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 05 Januari 2017 sebesar Rp 10.199.400, dan tanggal 04 Januari 2017 sebesar Rp 10.783.000, tanggal 03 Maret 2017 sebesar Rp 1.044.700, dan tanggal 01 April 2017 sebesar Rp 9.996.210
- jj) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 02 April 2017 sebesar Rp 10.324.200, tanggal 06 April 2017 sebesar Rp 2.512.200, tanggal 04 Agustus 2017 sebesar Rp 1.032.400, dan tanggal 14 Mei 2017 sebesar Rp 1.028.000
- kk) Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 22 April 2017 sebesar Rp 1.046.900, dan 29 April 2017 sebesar Rp 3.545.300, tanggal 06 Agustus 2017 sebesar Rp 3.064.400, dan tanggal 25 Juni 2017 sebesar Rp 712.100

## 2) Saksi

Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yakni Ahmad Samsi bin Sutriyono dan Rosidi bin Repan. Saksi Ahmad Samsi bin Sutriyono dibawah sumpahnya memberikan kesaksian antara lain :

- a) Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena sebagai teman kerja
- b) Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri belum punya anak namun sejak April 2019 telah bercerai
- c) Bahwa seingat saksi Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada Desember 1998
- d) Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat
- e) Bahwa ketika masih menjadi suami istri, pada tahun 2001 Penggugat bekerja di Hongkong, pada tahun 2003 cuti di rumah sekitar 1 bulan kemudian pulang lagi pada tahun 2006 karena cuti dan berangkat lagi pulang pada 2009, setelah cuti 2009 Tergugat berangkat lagi dan sampai sekarang sedangkan Tergugat bekerja di pabrik kayu lapis Indonesia sampai sekarang
- f) Bahwa selama Penggugat bekerja di Hongkong uang hasil/gaji selalu dikirimkan kepada Tergugat
- g) Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama tanah dan sawah sebanyak 3 objek yaitu:

- h) Sebidang sawah luas sekitar 1.950 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal
- i) Sebidang tanah pekarangan luas sekitar 90 m<sup>2</sup> terletak di RT 010 RW 003, Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal
- j) Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya luas sekitar 104 m<sup>2</sup> yang terletak di di RT 010 RW 002, Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal
- k) Perabot rumah seperti almari pakaian, buffet, meja kursi tamu, kulkas, televisi, dan lain-lain
- l) Bahwa harta bersama tersebut diperoleh sekitar tahun 2003 ketika Penggugat bekerja di Hongkong
- m) Bahwa sethu saksi, membeli tanah-tanah tersebut dari uang hasil bekerja Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat
- n) Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah-tanah itu sebelumnya
- o) Bahwa saat ini harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi sejak sengketa ini sawah sudah tidak dikelola
- p) Bahwa rumah bersama tersebut diabngun pada tahun 2002 ketika Penggugat bekerja di luar negeri (Hongkong)

Selanjutnya, saksi atas nama Rosidi bin Repan juga memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya antara lain :

- a) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga
- b) Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri namun sejak April 2019 keduanya telah bercerai
- c) Bahwa seingat saksi Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan Desember 1998
- d) Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat
- e) Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan KLI (Kayu Lapis Indonesia)
- f) Bahwa ketika masih suami istri, pada tahun 2001 Penggugat bekerja di Hongkong pulang cuti 1 bulan pada 2003, berangkat lagi ke Hongkong dan pulang pada tahun 2006 karena cuti dan berangkat lagi tahun itu dan pulang pada tahun 2009, berangkat lagi dan terakhir pulang pada tahun 2018 untuk mengurus perceraian
- g) Bahwa setahu saksi Penggugat selalu mengirim uang hasil bekerja kepada Penggugat
- h) Bahwa setahu saksi Penggugat berhasil menjadi TKI dan mengirimkan hasilnya kepada Penggugat setelah tahun 2005
- i) Bahwa selama perkawinan mereka mempunyai harta bersama berupa :
- j) Sebidang sawah luas sekitar 1.950 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal

- k) Sebidang tanah pekarangan luas sekitar 90 m<sup>2</sup> terletak di RT 010 RW 003, Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal
- l) Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya luas sekitar 104 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 010 RW 002, Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal
- m) Perabot rumah seperti almari pakaian, buffet, meja kursi tamu, kulkas, televisi
- n) Bahwa saksi tidak tahu pembelian harta tersebut hanya harta itu selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat
- o) Bahwa pembelian harta bersama tersebut dari hasil kerja Penggugat di luar negeri
- p) Bahwa untuk tanah seluas 90 m<sup>2</sup> dan 104 m<sup>2</sup> dibeli dari orang tua Tergugat, tanah yang luasnya 104 m<sup>2</sup> yang kemudian dibangun rumah bersama mereka
- q) Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2001 ketika Penggugat bekerja di luar negeri karena saksi yang membeli materialnya
- r) Bahwa saksi tidak tahu menghabiskan biaya berapa rupiah, yang saksi tahu kalau membangun hasil dari uang kiriman Penggugat bekerja di luar negeri
- s) Bahwa saat ini harta bersama tersebut dikuasai Tergugat namun sejak sengketa ini sawah sudah tidak dikelola.

**b. Bukti dan Saksi Tergugat**

1) Bukti

Bukti yang Tergugat gunakan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu fotokopi akta kelahiran atas nama Septia Nofita Vebriyanti, Nomor 3324-LT-28112011-0128 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tanggal 28 November 2011, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai Rp 6000.

2) Saksi

Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pernyataan majelis masing-masing bernama Ahmad Suwardi bin Kasmani dan Subari bin Kemin. Saksi atas nama Ahmad Suwardi bin Kasmani memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga
- b) Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami istri dan mempunyai 1 orang anak perempuan namun keduanya telah bercerai
- c) Bahwa saksi tidak ingat kapan tepatnya mereka bercerai tetapi setahu saksi pada tahun 2019
- d) Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Tergugat
- e) Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Desember 1998
- f) Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan pada tahun 2001 mempunyai rumah sendiri

- g) Bahwa rumah bersama tersebut pemberian orang tua Tergugat kemudian dibangun kembali oleh keduanya
- h) Bahwa ketika mereka masih menjadi suami istri, pada tahun 2001 Penggugat bekerja di luar negeri tetapi 1 tahun kemudian pulang dan tidak berhasil dan baru berhadil pada tahun 2005 dan sampai sekarang masih bekerja di Hongkong sedangkan Tergugat bekerja di Kayu Lapis Indonesia
- i) Bahwa saksi melihat sendiri ketika Penggugat pulang sebelum tahun 2005 tidak membeli apa-apa
- j) Bahwa rumah tersebut direnovasi secara bertahap dari hasil kerja Tergugat di Pabrik Kayu Lapis dan bekerja di sawah
- k) Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mengirimkan uang hasil bekerja
- l) Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya mempunyai harta bersama sawah seluas 1.950 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal
- m) Bahwa rumah beserta isinya itu pemberian orang tua Tergugat
- n) Bahwa setahu saksi dalam rumah bersama terdapat almari, kulkas, dan televisi akan tetapi saksi tidak tahu jumlah detailnya
- o) Bahwa ketika membeli sawah pada tahun 2005 dari hasil Penggugat bekerja di luar negeri
- p) Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sawah sebelumnya
- q) Bahwa tanah pekarangan tersebut pemberian orang tua Tergugat
- r) Bahwa harta bersama hanya sawah dan sejak sengketa ini sawah sudah tidak dikelola oleh Tergugat
- s) Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah beserta rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat karena itu pemberian dari orang tua Tergugat

Saksi kedua yang dihadirkan Tergugat yakni Subari bin Kemin, di bawah sumpah memberi kesaksiannya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga
- b) Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami istri, namun pada tahun 2019 keduanya sudah bercerai
- c) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan ikut Tergugat
- d) Bahwa seingat saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1998
- e) Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan pada tahun 2001 mempunyai rumah sendiri
- f) Bahwa rumah bersama tersebut pemberian orang tua Tergugat kemudian dibangun kembali oleh keduanya

- g) Bahwa ketika masih menjadi suami istri Penggugat bekerja sebagai TKI dan Tergugat bekerja di Pabrik Kayu Lapis Indonesia sampai sekarang
- h) Bahwa Penggugat menjadi TKI sejak tahun 2001 akan tetapi berhasil sejak tahun 2005
- i) Bahwa ketika pulang tidak membeli apa-apa dan sejak tahun 2005 Penggugat bisa dikatakan berhasil
- j) Bahwa rumah tersebut direnovasi sevara bertahap dari hasil bekerja Tergugat di KLI dan sawah
- k) Bahwa setahu saksi selama dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya mempunyai harta bersama sebidang tanah sawah yang luasnya sekitar 1.950 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pucang rejo, kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal
- l) Bahwa ketika sawah dibeli pada tahun 2015 dari hasil Penggugat bekerja di luar negeri
- m) Bahwa harga sawah tersebut Rp 140 juta lewat perantara saksi
- n) Bahwa awalnya sawah tersebut milik Hj. Mulyati oleh orang dari Bojonggede lalu dijual lagi kepada Penggugat dan Tergugat
- o) Bahwa rumah bersama beserta tanahnya itu adalah pemberian dari orang tua Tergugat
- p) Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah pekarangan itu dibeli oleh Penggugat dan Tergugat
- q) Bahwa saksi tidak tahu tentang perabot rumah mereka
- r) Bahwa harta bersama berupa sawah dikuasai oleh Tergugat dan sejak sengketa ini sawah sudah tidak dikelola
- s) Bahwa tanah, rumah, dan tanah pekarangan adalah pemebrian dari orang tua Tergugat
- t) Bahwa rumah pemberian Tergugat lalu direnovasi Penggugat dan Tergugat dan dibangun dengan batu bata sedangkan kayu bekas rumah untuk kusen-kusen rumah tersebut.

#### 4. Pertimbangan Hukum

Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah penyelesaian perkara harta bersama. Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator bersertifikat non hakim Mohammad Abrori Setyangraha, S.H.I. sesuai dengan laporannya tanggal 05 November 2019 tidak berhasil untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak secara damai. Sehingga perkara ini dilanjutkan ke agenda persidangan selanjutnya.

Dalam penyelesaian sengketa ini majelis hakim menetapkan bagian goni masing-masing pihak untuk Penggugat 2/3 dan Tergugat 1/3 bagian sesuai dengan petitum Penggugat poin 3, dalam hal ini majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa secara normatif, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan
- 2) Nahwa ketentuan tersebut dapat saja disampingi manakala dalam hal kontribusi terhadap perolehan/saham harta bersama terjadi perbedaan yang nyata besarnya antara suami dengan istrinya
- 3) Bahwa berkaitan dengan harta Penggugat dan Tergugat sesuai bukti P-4.2 sampai dengan P-4.34, dalam kurun waktu antara tanggal 09 Juli 2006 hingga Agustus 2017, Penggugat telah mengirimkan gaji/ hasil bekerja sebagai TKI di Hongkong kurang lebih sebesar Rp 399.615.960,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), walaupun Tergugat juga bekerja sebagai karyawan Kayu Lapis Indonesia dan mengelola tanah pertanian sebagai petani
- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan teori keadilan distributif yang memberikan kepada setiap orang porsi menurut prestasinya maupun kontribusinya. Jika suami atau istri berkontribusi lebih besar dalam mengumpulkan harta bersama, maka adalah lebih memenuhi rasa keadilan apabila salah satu pihak memperoleh bagian yang lebih dibandingkan yang lain.

## 5. Amar Putusan

Majelis hakim Pengadilan Agama Kendal memberikan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menetapkan :
  - a) Tanah sawah SHM Nomor 73 atas nama Muslikhun suami Purwati seluas 1.950 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal dengan batas-batas:  
Sebelah utara tanah pekarangan rakan, sebelah selatan rumah Purwati dan Muslikhun, sebelah barat tanah Kamijan, dan sebelah timur tanah Rakan dan Solekan;
  - b) Perabot rumah tangga yang terdiri dari :
    - 1) Almari kayu jati 2 (dua) buah;
    - 2) Almari bufet besar 1 (satu) buah;



- 3) Almari bufet tanggung kaca 1 (satu) buah;
- 4) Almari sepatu dan isinya 1 (satu) buah;
- 5) Almari belajar tempat buku 1 (satu) buah;
- 6) Almari rak piring 1 (satu) buah;
- 7) Hiasan dinding 4 (empat) buah;
- 8) Kulkas;

Adalah sebagai Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat;

- c) Menghukum Tergugat untuk memagi dan menyerahkan harta bersama masing-masing  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) menjadi bagian Tergugat;
- d) Apabila harta bersama tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan melalui Kantor Lelang Negara dan sisanya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi biaya lelang;
- e) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{2}{3}$  bagian harta bersama kepada Penggugat;
- f) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlijke verklaard*) untuk selebihnya;
- g) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

## BAB IV

### ANALISIS *MAQASHID AL SYARIAH* TERHADAP GUGATAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

Penelitian skripsi ini menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam perkara gugatan harta bersama antara mantan pasangan suami istri yang mana pihak istri bekerja keras sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan berkontribusi lebih banyak dalam hal pembelian harta bersama dalam rumah tangga, sedangkan pihak suami bekerja sebagai buruh serabutan yang tidak andil dalam pembelian harta bersama, namun pihak Tergugat (suami) berperan dalam penjagaan dan perawatan harta bersama tersebut. Sehingga dalam amar putusannya majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama dengan ketentuan diluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu 2/3 bagian untuk pihak Penggugat (istri) dan 1/3 bagian untuk pihak Tergugat (suami). Hukum positif di Indonesia menetapkan pembagian harta bersama dalam rumah tangga yakni dibagi dua antara suami dan istri yang telah pisah oleh sebab perceraian, Sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Penulis dalam penelitian skripsi kali ini menganalisis dalam hal pertimbangan hakim dari segi pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan, pertimbangan hakim dalam hal keadilan, serta dari segi penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus gugatan harta bersama pada putusan nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl. selain itu penulis juga menganalisis tinjauan *masaqhid al syariah* dari ketentuan pembagian harta bersama tersebut. Hal-hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim dan juga tinjauan *maqashid al syariah* dalam putusan tersebut akan diuraikan dalam pembahasan dibawah ini.

#### **A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Gugatan Harta Bersama Nomor: 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal**

##### **1. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Fakta-Fakta Persidangan**

Hakim sebagai salah satu instrumen penegak hukum bertugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>166</sup> Dalam pengambilan putusan, hakim tentunya akan melakukan pertimbangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.<sup>167</sup>

<sup>166</sup> Tugas Pokok dan Fungsi, diakses dari pn-serui.go.id pada 3 Juni 2020

<sup>167</sup> Mukti Arto, *op.cit.*, hlm. 140

Pertimbangan hakim mengenai pokok perkara yang ditangani akan dituangkan dalam sebuah putusan. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>168</sup> Pembukaan sidang dan sidang untuk amar putusan wajib dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dikategorikan sebagai tindakan yang lalai memenuhi syarat yang digariskan undang-undang yang oleh undang-undang sendiri mengancam dengan batalnya putusan demi hukum.<sup>169</sup>

Penelitian yang penulis lakukan adalah putusan mengenai gugatan harta bersama. Gugatan harta bersama masuk dalam kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana ketentuan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Harta bersama merupakan harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud harta bersama atau harta gono-gini adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri.<sup>170</sup>

Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl adalah gugatan Penggugat dikabulkan sebagian oleh hakim karena alasan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan serta menimbang dari fakta-fakta persidangan yang ada.

Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dan telah bercerai sesuai dengan putusan pengadilan agama kendal nomor 199/Pdt.G/2019/PA. Kdl. Pernikahan Penggugat dan Tergugat menghasilkan harta bersama sebagaimana yang Penggugat sebutkan dalam gugatannya yakni berupa :

- a. Sebidang sawah SHM Nomor 73, atas nama Muslikun Suami Purwati, luas 1950 m<sup>2</sup> yang terleltak di Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - 1) Sebelah utara : tanah milik Semi
  - 2) Sebelah selatan : tanah milik Sarinah
  - 3) Sebelah barat : jalan
  - 4) Sebelah timur : kalen air
- b. Sebidang tanah pekarangan seluas  $\pm 90$  m<sup>2</sup> terletak di Desa Pucangrejo RT 010, RW 003, Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - 1) Sebelah utara : tanah pekarangan Rakan
  - 2) Sebelah selatan : rumah Purwati dan Muchlisun
  - 3) Sebelah barat : tanah Kamijan
  - 4) Sebelah timur : tanah Rakan dan Solekan

<sup>168</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 174

<sup>169</sup> Syarif Mappiasse, *op.cit.*, hlm. 43

<sup>170</sup> Happy Susanto, *op.cit.*, hlm. 2

- c. Sebuah bangunan rumah luas  $\pm 104 \text{ m}^2$  terletak di Desa Pucangrejo RT 010, RW 003, Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut :
- 1) Sebelah utara : tanah Purwati dan Muchlisun
  - 2) Sebelah selatan : jalan kampung
  - 3) Sebelah barat : tanah Kamijan
  - 4) Sebelah timur : tanah Solekan
- d. Perabot rumah tangga, antara lain:
- 1) Almari kayu jati 4 (empat) buah;
  - 2) Almari bifet besar 1 (satu) buah;
  - 3) Almari bifet tanggung kaca 1 (satu) buah;
  - 4) Almari sepatu dan isinya 1 (satu) buah;
  - 5) Almari belajar tempat buku 1 (satu) buah;
  - 6) Almari rak piring 1 (satu) buah;
  - 7) Hiasan dinding 4 (empat) buah;
  - 8) Peralatan dapur (kulkas, mesin cuci);
  - 9) Meja kursi tamu satu set<sup>171</sup>

Setelah terjadi perceraian, antara Penggugat dan Tergugat hendak membagi harta bersama, namun tidak menemukan kesepakatan hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ke pengadilan yang berhak menangani penyelesaian perkara ini yakni di Pengadilan Agama Kendal. Hal tersebut didasarkan pada landasan untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan agama merujuk pada ketentuan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kompetensi relatif ini bertitik tolak dari ketentuan yang menetapkan ke pengadilan agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 Ayat (1) HIR menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat. asas ini dalam bahasa latin disebut *actor sequitur forum rei*.<sup>172</sup>

Penggugat dalam gugatannya telah menuangkan macam-macam harta bersama yang diperolehnya selama dalam masa perkawinan dengan Tergugat, serta dalam agenda sidang pembuktian Penggugat telah membuktikan dengan membawa alat-alat bukti dan dua orang saksi. Namun tidak semua harta bersama yang dicantumkan Penggugat dalam gugatannya ditetapkan sebagai harta bersama.

Tergugat juga mengajukan eksepsi, namun karena eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, maka majelis berpendapat eksepsi tersebut harus ditolak.<sup>173</sup> Pertimbangan hakim ini berdasarkan pada Pasal 136 HIR, eksepsi berdasarkan Pasal 136 HIR merupakan perlawanan tergugat yang tidak mengenai pokok perkara, melainkan hanya mengenai soal acara belaka, dengan demikian jawaban yang berupa tangkisan atau eksepsi itu tidak memnyinggung soal pokok perkara. Jawaban seperti ini harus diputus terlebih dahulu sebelum

<sup>171</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl hlm. 2-3

<sup>172</sup> Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2004) hlm. 100

<sup>173</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl hlm. Hlm. 21

hakim mengarahkan pemeriksaan kepada pokok perkara. Jadi tidak perlu harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara menurut Pasal 136 HIR.<sup>174</sup>

Pertimbangan hakim lainnya adalah mengenai alat-alat bukti dan saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan tersebut berupa bukti fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendal Nomor 0789/AC/2019/PA.Kdl, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Fotokopi Sertifikat SHM Nomor 73 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kendal, serta fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat selama Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup dan sesuai aslinya, maka semua alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Pertimbangan hakim juga meliputi bukti Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat. Bukti tersebut berupa bukti autentik maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, sehingga secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Majelis hakim juga menimbang terhadap bukti berupa sertifikat SHM nomor 73 atas nama Muslikhun suami Purwati yang dibeli oleh kedua pihak pada tahun 2005, bukti mana tidak dibantah Tergugat, oleh karenanya alat bukti tersebut dinilai sebagai alat bukti yang sah dan mengikat.

Majelis hakim juga menimbang terhadap bukti transfer uang hasil Penggugat bekerja di Hongkong kepada Tergugat sejak tahun 2006 sampai 2017 yang totalnya berjumlah Rp 399.615.960,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima belas sembilan ratus enam puluh rupiah). Bukti tersebut berupa fotokopi bukti transfer sebagaimana yang Penggugat ajukan dalam sidang pembuktian.

Pertimbangan majelis hakim juga meliputi dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan masing-masing bernama Achmad Samsi bin Sutriyono dan Rosidi bin Repan, kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah membeli harta bersama pada tahun 2003 dari hasil kiriman uang Penggugat bekerja di Hongkong. Padahal secara bukti transfer yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat baru mengirimkan gajinya secara rutin pada tahun 2006 sampai 2017.

Pertimbangan majelis hakim pada saat pembuktian dari pihak Tergugat yakni meliputi bukti surat dan penilaian pembuktian dari dua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dalam persidangan. Bukti surat yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa akta kelahiran atas nama Septia Nofita Vebriyanti, yang lahir pada 23 September 1999 yang merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat. dua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat masing-masing adalah bernama Ahmad Suwardi bin Kasmani dan Subari bin Kemin. Kedua saksi Tergugat telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya yang menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat membeli sawah seluas 1.950 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal pada tahun 2015 dari hasil Penggugat

---

<sup>174</sup> Bambang Sugeng A.S, Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta:Kencana, 2012) hlm. 51

bekerja di luar negeri, sedangkan tanah pekarangan dan rumah bersama adalah pemberian ayah kandung Tergugat yang kemudian direnovasi.

Penggugat memohon kepada majelis hakim pada petitumnya yang menyatakan agar objek sengketa I sampai IV agar dapat ditetapkan oleh majelis sebagai harta gono gini Penggugat dan Tergugat.

Objek sengketa I yang berupa sebidang sawah seluas 1.950 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal atas nama Muslikhun yang dibeli pada tahun 2015 saat Penggugat terikat dalam perkawinan yang berasal dari hasil kiriman bekerja di Hongkong, demikian juga Tergugat dalam jawabannya telah mengakui jika sawah tersebut menjadi harta bersama Penggugat dengan Tergugat. mengenai objek sengketa berupa tanah pekarangan luas sekitar 90 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pucangrejo, RT 010, RW 003, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal yang dibeli dari orang tua Tergugat pada tahun 2006 seharga Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Tanah tersebut tidak disertai dengan bukti surat atau saksi yang dapat menguatkan gugatannya, demikian juga dalam pemeriksaan setempat Kepala Desa Pucang Rejo tidak dapat menunjukan buku induk letter C karena Penggugat tidak ada bukti atau bukti letter C dimaksud, sehingga dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan objek sengketa berupa tanah pekarangan luas sekitar 90 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pucangrejo, RT 010, RW 003, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal tersebut adalah kabur oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Majelis hakim juga menimbang mengenai objek sengketa berupa bangunan rumah luas 104 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pucangrejo, RT 010, RW 003, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal yang saat ini dikuasai Tergugat, di mana Penggugat mendalilkan bangunan rumah mulai dari nol asalnya adalah tanah kosong bekas langgar/mushola, di lain pihak saksi-saksi Tergugat dan Kepala Desa di lokasi tersebut menyatakan sebelumnya sudah ada bangunan rumah pemberian orang tua Tergugat selanjutnya direnovasi dengan sebagian masih menggunakan kayu-kayu bekas bangunan lama sebagai kusen rumah, demikian juga sampai sekarang belum diketahui siapa pemiliknya oleh karena SPT tanah dan rumah tersebut masih atas nama Matari (ayah kandung Tergugat). dalam hal ini majelis hakim menimbang oleh karena objek sengketa tersebut masih atas nama Matari sehingga belum menjadi milik sempurna (*milkul taam*) Penggugat dengan Tergugat disebabkan masih terikat dengan pihak ketiga yaitu Matari, dengan demikian majelis berpendapat gugatan Penggugat mengenai objek sengketa berupa rumah tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlijke verklaard*).

Pertimbangan majelis hakim juga meliputi perabot rumah tangga sebagaimana yang tercantum pada gugatan Penggugat, maka majelis memberi pertimbangan bahwa harta bersama berupa perabot rumah tangga tersebut diperoleh pada saat Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu sudah sepatutnya ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat.

Majelis hakim memberikan pertimbangan sesuai dengan petitum Penggugat angka 3 agar majelis hakim menetapkan bagian gono-gini masing-masing pihak untuk Penggugat 2/3 dan Tergugat 1/3 bagian, maka majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa secara normatif sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan: Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan
- b. Bahwa ketentuan tersebut dapat pula disampingi manakala dalam hal kontribusi terhadap perolehan /saham harta bersama terjadi perbedaan yang nyata besarnya antara suami dengan istrinya
- c. Bahwa berkaitan dengan harta Penggugat dan Tergugat sesuai bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat selama Penggugat bekerja di luar negeri , dalam kurun waktu antara tanggal 09 Juli 2006 hingga 06 Agustus 2017, Penggugat telah mengirimkan gaji/hasil bekerja sebagai TKI di Hongkong kurang lebih sebesar Rp 399.615.960,00 (tig ratus sembilan puluh sembilan enam ratus lima belas sembilan ratus enam puluh rupiah), walaupun Tergugat juga bekerja sebagai Karyawan Kayu Lapis Indonesia dan mengelola tanah sebagai petani
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan teori keadilan distributif yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya maupun kontribusinya. Jika suami atau istri berkontribusi besar dalam mengumpulkan harta bersama, maka adalah lebih memenuhi rasa keadilan apabila salah satu pihak memperoleh bagian yang lebih dibandingkan yang lain

Majelis hakim menetapkan apabila harta bersama tersebut tidak bisa dibagi secara in natura maka harus dijual melalui lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan 2/3 dan 1/3 setelah dikurangi dengan biaya lelang.

Majelis hakim menimbang bahwa Tergugat dihukum untuk menyerahkan 2/3 bagian kepada Penggugat, oleh karena harta berupa sawah dan perabot rumah tangga dikuasai oleh Tergugat maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan 2/3 bagian goni tersebut kepada Penggugat.

Majelis hakim juga menimbang bahwa atas dasar pertimbangan dan dasar-dasar yang dikemukakan diatas, maka petitum gugatan Penggugat dan posita angka 3 huruf (a) objek sengketa I dan huruf (d) objek sengketa IV harus dikabulkan sebageian posita 3 huruf (b) objek sengketa II dan (c) objek sengketa III dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*).

## 2. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Keadilan

Konsepsi mengenai keadilan adalah memahami kebutuhan akan prinsip untuk memberikan hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban dasar serta kebutuhan untuk menentukan bagaimana keuntungan dan beban masyarakat didistribusikan, jika demikian kepentingan individu berbenturan dengan institusi-institusi yang mendapat keadilan pula, dikatakan adil jika sebuah institusi tersebut tidak ada pembeda yang sewenang-wenang antara orang dalam memberikan hak dan kewajiban, dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang pas antara sengketa demi kemaslahatan kehidupan sosial.<sup>175</sup> Dalam konteks Pengadilan Agama yang menangani masalah perdata bagi orang-orang Islam yang ada di Indonesia, Pengadilan Agama

<sup>175</sup> John Rawls, *Teori Keadilan* Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2006) hlm. 3-4

harus menjadi institusi penegak hukum yang adil dalam memberikan hak dan kewajiban para pihak pencari keadilan. Majelis hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang dalam memeriksa, memutus, dan mengadili setiap perkara yang masuk ke pengadilan dituntut untuk memberikan keadilan secara seimbang demi terciptanya kemaslahatan dan terciptanya tujuan dari hukum yakni kemaslahatan, keadilan, dan kemanfaatan.

Salah satu kompetensi absolut pengadilan agama adalah mengenai penyelesaian sengketa harta bersama, ketentuan mengenai harta bersama telah diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Namun seringkali pihak yang berperkara mengenai harta bersama dalam petitumnya meminta majelis hakim untuk memutuskan diluar ketentuan Pasal KHI tersebut, hal ini dikarenakan para pihak bersengketa berdalih akan lebih memenuhi rasa keadilan jika pertimbangan majelis hakim lebih mengedepankan penggalan lebih dalam terhadap permasalahan yang sesungguhnya yang terjadi dan tidak hanya menjadi corong undang-undang.

Tujuan dari para pihak mengajukan gugatan terhadap sengketa harta bersama ini adalah menemukan titik terang terhadap penyelesaian pembagian harta bersama yang sebelumnya telah diselesaikan melalui jalur kekeluargaan namun tidak berhasil. Sehingga para pihak membawa permasalahan ini ke ranah litigasi dengan tujuan mendapatkan penyelesaian yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan. Setelah melakukan pertimbangan terhadap kasus harta bersama pada perkara nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl, hakim memutus sengketa harta bersama tersebut dengan besaran untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing 2/3 bagian dan 1/3 bagian, ketentuan ini tidak sama dengan ketentuan Pasal 97 KHI.

Dalam penggalan kasus mengenai sengketa harta bersama ini hakim harus berani berijtihad di luar ketentuan UU agar keadilan bisa ditemukan untuk bahan putusan. Hal ini dinamakan dengan keadilan substantif. Keadilan substantif adalah keadilan yang diciptakan oleh hakim dalam putusan-putusannya berdasar hasil galiannya atas rasa keadilan di dalam masyarakat, tanpa dibelenggu bunyi pasal undang-undang yang berlaku.<sup>176</sup> Berdasarkan pertimbangan hakim yang berani melakukan trobosan hukum berupa membagi harta bersama dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta memutus tidak hanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, namun mendasarkan pertimbangannya pada rasa keadilan dalam putusan nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl membuktikan bahwa hakim telah menerapkan keadilan substantif dalam perkara ini.

Majelis hakim pada pertimbangan hukum putusan ini menggunakan keadilan distributif. Keadilan distributif adalah keadilan yang dikemukakan Aristoteles, yang merupakan keadilan yang adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, dan sifatnya proporsional.<sup>177</sup> Putusan hakim dalam perkara harta bersama yang penulis bahas dalam skripsi ini membagi harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dengan besaran masing-masing 2/3 untuk Penggugat (istri), dan 1/3 bagian untuk Tergugat (suami). Menurut hemat penulis hal ini sesuai dengan keadilan distributif, dikarenakan dalam perkara ini pihak

<sup>176</sup> Moh Mahfud MD, “Keadilan Substantif”, diakses dari <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com> pada 5 Juni 2020

<sup>177</sup> Bahder Johan Nasution, *op.cit.*, hlm 119



istri yang lebih berkontribusi dalam pengumpulan harta bersama dari hasil kerjanya sebagai TKI di luar negeri, sedangkan pihak suami berperan dalam hal penjagaan dan perawatan harta. Sehingga pembagian yang tidak sama rata sebagaimana putusan tersebut mencerminkan proporsionalitas.

Penilaian keadilan pada keadilan distributif adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warga negaranya.<sup>178</sup> Menurut hemat penulis pembagian harta bersama dalam putusan ini telah memenuhi kriteria penilaian pada keadilan distributif, karena majelis hakim membagi sesuai dengan sisi proporsionalitas dan memepertimbangkan bagaimana perolehan harta bersama tersebut.

Majelis hakim mendasarkan pertimbangannya menggunakan teori keadilan distributif pada putusan harta bersama nomor 2374/Pdt.G.2019/PA.Kdl. Hal ini dikarenakan pada sengketa harta bersama pada putusan tersebut, majelis hakim tidak membagi separoh harta bersama kepada Penggugat dan Tergugat, namun membagi 2/3 bagian untuk Penggugat (istri) dan 1/3 bagian untuk Tergugat (suami). Menurut pandangan majelis hakim setiap orang diberikan porsi menurut prestasinya maupun kontribusinya. Jika suami atau istri berkontribusi lebih besar dalam mengumpulkan harta bersama, maka adalah lebih memenuhi rasa keadilan apabila salah satu pihak memperoleh bagian yang lebih dibandingkan dengan yang lain.

Pembagian harta bersama pasca putusnya perkawinan merupakan hal yang baru dalam wacana hukum Islam (fikih), hal ini disebabkan karena konsep harta bersama tidak dikenal dalam kitab-kitab fikih klasik karya ulama-ulama mazhab pada masanya, yang senantiasa dijadikan rujukan dalam pengambilan hukum hingga masa sekarang.<sup>179</sup> Dalam kitab-kitab fikih hanya dijelaskan mengenai *syirkah*. Abdul Manan menyatakan bahwa “Harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.”<sup>180</sup> Ada Macam-macam *syirkah* yang disebutkan oleh Imam Syafi’i diantaranya *syirkah inan*, *syirkah abadan*, *syirkah muafadlah*, dan *syirkah wujuh*. Mengenai harta bersama ini termasuk dalam kategori *syirkah abadan*, yakni dua orang yang berserikat dan mengerjakan suatu pekerjaan lalu hasilnya dibagi berdasarkan perjanjian yang mereka buat.

Di Indonesia pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan aturan tentang distribusi/pembagian harta bersama bagi suami istri yang putus perkawinan akibat perceraian. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut sebenarnya memberikan fleksibilitas pembagian atas harta bersama termasuk pada kasus-kasus tertentu karena pasal tersebut bersifat mengatur (*regelen*) bukan memaksa (*dwigen*), sehingga pembagian tersebut tidak mutlak dibagi dua sama rata antara suami istri, dan secara kasuistik ketentuan dalam pasal tersebut dapat dikesampingkan.<sup>181</sup> Hal tersebut dikarenakan dalam pengambilan keputusan pembagian harta bersama harus dilihat dan diteliti kembali kasusnya

<sup>178</sup> Bahder Johan Nasution, *op.cit.*, hlm. 121

<sup>179</sup> Siah Khosyi’ah, “Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim di Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahij*, Vol. XI, No. 1, Juni 2017., hlm. 35

<sup>180</sup> Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 109

<sup>181</sup> Siah Khosyi’ah, *op.cit.*, hlm. 35

sehingga pembagian tersebut mencerminkan rasa keadilan. Dalam hal ini majelis hakim dalam mengambil putusannya pada perkara nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl tetap mengedepankan hukum positif yang ada di Indonesia dan tidak mengesampingkannya. Selain itu pertimbangan hakim juga dilihat bagaimana kontribusi dari pihak suami dan istri dalam pengumpulan harta bersama, yang mana dalam putusan tersebut lebih banyak kontribusi dari pihak Penggugat (istri), sehingga majelis hakim memutuskan bagian yang lebih banyak pada pihak Penggugat (istri).

Pada pembahasan sebelumnya telah penulis kemukakan putusan tentang pembagian harta bersama akibat perceraian. Pada putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl yang pada intinya seorang mantan istri meminta kepada majelis hakim agar membagi harta bersama yang kini masih dikuasai oleh mantan suami, dan mantan istri meminta kepada majelis hakim membagi harta bersama tersebut dengan pembagian 2/3 bagian untuk istri dan 1/3 bagian untuk suami karena selama perkawinan mantan istri bekerja sebagai TKW di luar negeri dan berkontribusi lebih besar dalam pembagian harta bersama, sedangkan suami bekerja sebagai buruh pabrik dan tidak berkontribusi dalam pembelian harta bersama.

Hal ini dapat dikaji dari segi hukum positif, hukum Islam, dan teori keadilan. Dasar hukum yang digunakan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dalam putusan Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl, para pihak telah berusaha membagi harta bersama melalui musyawarah secara kekeluargaan, namun tidak menemukan titik temu. Sehingga para pihak membawa perkara tersebut ke ranah litigasi. Pada amar putusannya majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama tidak sesuai dengan ketentuan pembagian yang ada pada Pasal 97 KHI, hal tersebut dikarenakan majelis hakim berpandangan pembagian tersebut lebih mencerminkan rasa keadilan apabila pembagian tersebut didasarkan pada kontribusi perolehan harta bersama.
- b. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Hakim mengartikan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat saja disimpangi manakala dalam hal kontribusi terhadap perolehan/saham harta bersama terjadi perbedaan yang nyata besarnya antara suami dengan istrinya.<sup>182</sup> Hal yang sama terjadi pada putusan Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl majelis hakim membagi harta bersama dengan ketentuan 2/3 bagian untuk Penggugat (istri) dan 1/3 bagian untuk Tergugat (suami) dikarenakan perbedaan porsi untuk perolehan harta bersama. Dalam perkara tersebut pihak Penggugat (istri) yang lebih banyak berkontribusi dalam pengumpulan harta bersama.
- c. Dalam kitab-kitab fikih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain

---

<sup>182</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl

disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an Surat an Nisa ayat 32 :

الرِّجَالُ قَوَمُونَ عَلَى الْكَسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”(QS An-Nisaa’ [4] : 32)<sup>183</sup>

Ayat tersebut diatas mengemukakan bahwa semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.<sup>184</sup>

- d. Plato mengkonsepipkan keadilan sebagai “*giving each man his due*” yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.<sup>185</sup> Majelis hakim pada perkara pembagian harta bersama ini telah berusaha membagi harta bersama agar mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak. Dalam putusannya majelis hakim tidak mendasarkan argumennya pada ketentuan pembagian harta bersama sebagaimana pada Pasal 97 KHI, majelis hakim mencoba menggali lebih dalam permasalahan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan konsep-konsep keadilan dan memutuskan pembagian harta bersama dengan mengedepankan porsi perolehan masing-masing pihak. Menurut hemat penulis putusan majelis hakim ini sesuai dengan konsep “*giving each man his due*” sebagaimana yang diungkapkan oleh Plato.
- e. Aristoteles menekankan keadilan berdasarkan perimbangan atau proporsi, hal tersebut dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Sedangkan keadilan komutatif adalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara.<sup>186</sup> Pada pertimbangan hakim yang tercantum pada putusan nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl majelis hakim mendasarkan pertimbangan mengenai perkara harta bersama ini berdasarkan keadilan distributif, sebagaimana yang disampaikan oleh Aristoteles. Majelis hakim membagi harta bersama pada perkara ini mengesampingkan ketentuan pembagian sebagaimana yang tercantum pada Pasal 97 KHI. Hal ini dilakukan majelis

<sup>183</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI, op.cit.*, hlm. 66

<sup>184</sup> Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 109

<sup>185</sup> Bahder Johan Nasution, *op.cit.*, hlm. 120

<sup>186</sup> *Ibid.*, hlm. 119

hakim dengan tujuan memberikan bagian kepada para pihak sesuai dengan porsi perolehannya, sehingga lebih mencerminkan rasa keadilan.

Melihat dan memperhatikan putusan pengadilan agama kendal nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl. hakim memutuskan perkara menggunakan teori keadilan distributif, hakim membagi harta bersama tersebut sesuai dengan teori keadilan distributif yang memberikan kepada setiap orang menurut kontribusinya. Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada Penggugat (istri) telah mengirimkan gaji/hasil bekerja sebagai TKI di Hongkong kurang lebih sebesar Rp. 399.615.960,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan enam ratus lima belas sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dalam kurun waktu 9 Juli 2006 hingga 6 Agustus 2017, dan Tergugat (suami) bekerja sebagai karyawan kayu lapis Indonesia dan mengolah tanah pertanian sebagai petani. Dalam pertimbangannya majelis hakim menetapkan 2/3 bagian kepada Penggugat (istri) dan 1/3 bagian kepada Tergugat (suami), dan apabila harta bersama tidak bisa dibagi secara *in natura* maka harus dijual melalui lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan diatas.

Berdasarkan putusan pengadilan agama kendal nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl tidak semua harta yang diajukan pada objek sengketa oleh Penggugat (istri) ditetapkan sebagai harta bersama, merujuk pada ketentuan amar putusan majelis hakim, menetapkan harta bersama sebagai berikut:

- a. Tanah sawah SHM Nomor 73 atas nama Muslikhun suami Purwati seluas 1.950 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas:
  - 1) Sebelah utara : tanah pekarangan Rakan
  - 2) Sebelah selatan : rumah Purwati dan Muslikhun
  - 3) Sebelah barat : tanah Kamijan
  - 4) Sebelah timur : tanah Rakan dan Solekan
- b. Perabot rumah tangga yang terdiri dari:
  - 1) Almari kayu jati 2 buah.
  - 2) Almari bufet besar 1 buah.
  - 3) Almari bufet tanggung kaca 1 buah.
  - 4) Almari sepatu dan isinya 1 buah.
  - 5) Almari belajar tempat buku 1 buah.
  - 6) Almari rak piring 1 buah.
  - 7) Hiasan dinding 4 buah.
  - 8) Kulkas.

### 3. Penafsiran Hukum oleh Hakim

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus.<sup>187</sup> Dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengadili perkara, hakim

---

<sup>187</sup> Afif Khalid, *op.cit.*, hlm. 110

bukan hanya sebagai mulut atau corong undang-undang, melainkan selalu harus menafsirkan atau fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, diterapkan dengan ketentuan undang-undang, sehingga mendapatkan keyakinan berdasarkan ketentuan yang berlaku.<sup>188</sup>

Majelis hakim dalam perkara harta bersama ini tidak lantas menjatuhkan putusannya hanya berdasarkan ketentuan hukum positif yang ada namun juga melihat aspek sosiologis serta memperhatikan fakta-fakta persidangan yang ada. Ketentuan pembagian harta bersama dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Namun majelis berpendapat ketentuan tersebut dapat dikesampingkan apabila dalam hal kontribusi atau perolehannya terjadi perbedaan yang nyata antara suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim memberikan penafsiran yang berbeda dari apa yang telah digariskan oleh undang-undang.

Pada putusan pengadilan agama kendal nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl menurut hemat penulis majelis hakim menggunakan penafsiran sosiologis. Penafsiran sosiologis adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat atau penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan sosial dalam masyarakat agar penerapan hukum sesuai dengan tujuannya yaitu kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat. Penafsiran ini bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat.<sup>189</sup>

Prof. Dr. Bagir Manan dalam bukunya hukum Positif Indoensia (Suatu Kajian Teoritik) mengemukakan bahwa hakim bukanlah mulut undang-undang atau mulut undang-undang atau mulut hukum positif pada umumnya, melainkan hakim adalah mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Apabila penerapan aturan hukum akan bertentangan dengan kepatutan, keadilan, kepentingan umum atau ketertiban umum, hakim wajib memilih kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum.<sup>190</sup>

Meski demikian, tidaklah dapat diartikan, hakim boleh seenaknya melanggar atau menerobos ketentuan undang-undang. Untuk mewujudkan keadilan substantif, diperlukan kemampuan menafsirkan ketentuan hukum. Menurut Bagir Manan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penafsiran, yaitu:

- a. Dalam hal kata atau kata-kata dan susunan kaidah sudah jelas, hakim wajib menerapkan undang-undang menurut bunyi dan susunan kaidah kecuali didapati hal-hal seperti inkonsistensi, pertentangan, atau tidak dapat menjangkau peristiwa hukum yang sedang diadili, atau dapat menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan tujuan hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum, bertentangan dengan keyakinan yang hidup dalam masyarakat, kesusilaan, atau kepentingan umum yang lebih besar.
- b. Wajib memerhatikan maksud dan tujuan pembentukan undang-undang, kecuali maksud dan tujuann sudah usang, terlalu sempit sehingga perlu ada penafsiran yang lebih longgar.

<sup>188</sup> Agus Priono, Widodo T. Novianto, I Gusti Ayu Ketutu Rachmi Handayani, *op.cit.*, Hlm. 120

<sup>189</sup> Penafsiran Sosiologis, diakses dari <http://www.coursehero.com>, pada 19 Mei 2020

<sup>190</sup> Anwar C., *op.cit.*, hlm. 132

- c. Penafsiran semata-mata dilakukan demi memberi kepuasan kepada pencari keadilan. Kepentingan masyarakat diperhatikan selama tidak bertentangan dengan kepentingan pencari keadilan.
- d. Penafsiran dilakukan semata-mata dalam rangka aktualisasi penerapan undang-undang, buka untuk mengubah undang-undang.
- e. Mengingat hakim hanya memutus menurut hukum, maka penafsiran harus mengikuti metode penafsiran menurut hukum dan memerhatikan asas-asas hukum umum, ketertiban hukum, kemaslahatan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- f. Dalam penafsiran, hakim dapat mempergunakan ajaran hukum sepanjang ajaran tersebut relevandengan persoalan hukum yang akan diselesaikan dan tidak dirugikan pencari keadilan.
- g. Penafsiran harus bersifat progresif, yaitu berorientasi ke masa depan (*future oriented*), tidak menarik mundur keadaan hukum di masa lalu yang bertentangan dengan keadaan yang hidup dan perkembangan hukum.<sup>191</sup>

Dalam putusan harta bersama ini hakim tidak berdasar ketentuan undang-undang yang ada namun melihat dinamika sosiologis serta fakta-fakta persidangan yang ada sehingga dapat menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Dinamika sosiologis yang dipandang dalam putusan perkara harta bersama ini adalah berupa putusan yang melihat latar belakang perolehan harta bersama, dimana pihak istri berkontribusi dalam pembelian keseluruhan harta bersama, dibuktikan dengan fakta persidangan yang dengan alat bukti berupa bukti transfer hasil kerja Penggugat (istri) dan uang tersebut digunakan untuk pembelian harta bersama. Sehingga menurut hemat penulis putusan nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl menunjukkan adanya penggunaan penafsiran sosiologis karena disesuaikan dengan keadaan sosial dalam masyarakat agar putusan yang dihasilkan sesuai dengan tujuannya yaitu kepastian hukum berdasarkan asas keadilan.

#### **A. PERTIMBANGAN *MAQASHID AL SYARIAH* TERHADAP PUTUSAN NOMOR 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl**

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, maksudnya harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>192</sup> Perkara harta bersama merupakan jenis perkara gugatan, perkara gugatan merupakan perkara yang diajukan oleh penggugat atau kuasa hukumnya ke pengadilan yang di dalamnya terdapat konflik atau sengketa, untuk meminta hakim mengadili dan memutus siapa yang benar dari pihak-pihak yang bersengketa atau berkonflik.<sup>193</sup>

Gugatan harta bersama yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kendal pada Putusan Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl tentunya memberikan jalan keluar bagi para pihak yang bersengketa, setelah sebelumnya para pihak menyelesaikan melalui jalur kekeluargaan dan tidak

<sup>191</sup> *Ibid.*, hlm. 133-134

<sup>192</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Press, 2015)., hlm. 161

<sup>193</sup> Irene Svinarky, *Bagian-Bagian Penting yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Batam: CV. Batam Publisher, 2019) hlm. 1

menemukan titik temu. Majelis hakim memutuskan pada Putusan Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl menetapkan pembagian 2/3 bagian untuk Penggugat (istri) dan 1/3 bagian untuk Tergugat (suami). Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pihak istri lebih banyak berkontribusi untuk pembelian harta bersama dari hasil kerja pihak istri yang bekerja sebagai TKI (tenaga kerja Indonesia) di luar negeri. Majelis hakim dalam pertimbangannya juga mendasarkan putusannya pada teori keadilan distributif yang memberikan kepada setiap orang porsi menurut prestasinya maupun kontribusinya. Jika suami atau istri berkontribusi lebih besar dalam mengumpulkan harta bersama, maka adalah lebih memenuhi rasa keadilan apabila salah satu pihak memperoleh bagian yang lebih besar dalam mengumpulkan harta bersama, maka adalah lebih memenuhi rasa keadilan apabila salah satu pihak memperoleh bagian yang lebih dibandingkan yang lain.<sup>194</sup>

Analisis yang penulis gunakan adalah menggunakan pendekatan teori *maqashid al-syariah* yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi. Syatibi menyatakan bahwa kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima perkara (*hifz al-din, hifz al-nasl, hifz al-'aql, hifz al-nafs, hifz al-mal*) memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan *daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat*.<sup>195</sup>

Perkara harta bersama pada putusan nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl termasuk dalam *maqashid al syariah* pada tingkatan *maqashid al-daruriyyat* dalam hal menjaga harta (*hifzh al-mal*). *maqashid al-daruriyyat* Imam Juwayniy telah mengemukakan, yang kemudian dikembangkan oleh Al-Ghozali dan Asy-Syatibi untuk memelihara *al-Umurudh-dharuriyah* dalam kehidupan manusia, yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada kemaslahatan pada mereka. Dalam hal *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta), dalam memelihara harta Islam mengharamkan mencuri, menipu, menyalakan dan memakan riba, merusak harta milik sendiri maupun milik orang lain. Dalam memperoleh harta disyariatkan usaha-usaha yang halal.<sup>196</sup> pembagian harta bersama melalui jalur litigasi oleh pengadilan itu memiliki tujuan utama yakni menjaga eksistensi harta yang kepemilikannya terjadi permasalahan, karena pada dasarnya harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami), setelah terjadi perceraian yang seharusnya harta tersebut dibagi oleh kedua belah pihak namun pembagian tersebut tidak berhasil. Sehingga adanya putusan pengadilan nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl memberikan manfaat karena penyelesaian pembagian harta bersama melalui jalur kekeluargaan tidak menemukan titik temu, apabila pembagian itu tetap tidak bisa diselesaikan maka akan menimbulkan masalah misalnya salah satu pihak menggunakan harta bersama secara sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak yang lain. Serta apabila ditinjau dari amar putusan majelis hakim yang membagi 2/3 bagian untuk pihak istri dan 1/3 bagian untuk pihak suami, pembagian tersebut mencerminkan keadilan distributif yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan prestasinya. Apabila pembagian ini tidak dapat diselesaikan dengan baik dan adil, maka akan mengancam eksistensi kepemilikan harta.

<sup>194</sup> Salinan Putusan Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl

<sup>195</sup> Atika Rkminasiti Masrifah dan Achmad Firdaus, "The Framework of Maslahah Performa as Wealth Management System and its Implication for Public Policy Objectives", *op.cit.*, hlm.

<sup>196</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah Penerjemah Khikmawati (kuwais)*, (Jakarta:Amzah, 2009) hlm. 15

Putusan pengadilan agama kendal nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl juga masuk dalam kategori *maqashid al- hajiyyat* (kebutuhan dalam tingkatan *hajiyyat*). Kebutuhan dalam tingkatan *hajiyyat* dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.<sup>197</sup> Dilihat dari segi tingkatan *hajiyyah*, pembagian harta bersama pada putusan tersebut adalah memiliki manfaat dalam hal mempermudah para pihak (suami dan istri yang telah bercerai) untuk lebih leluasa mempergunakan haknya pada harta bersama, dan apabila harta bersama tersebut sudah dibagi maka akan mempermudah para pihak dalam mengaplikasikannya sesuai kehendaknya masing-masing.

*Maqashid al syariah* secara istilah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Imam Asy-Syatibi mengungkapkan tentang syariah dan fungsinya dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab al-Muwafaqat :

هذه الشريعة....وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

“Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.<sup>198</sup> Jika dikaitkan dengan penelitian penulis maka pembagian harta bersama secara adil sesuai dengan kontribusinya dalam pengumpulan harta bersama adalah sudah mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya, karena pembagian tersebut tidak hanya dibagi sama rata tanpa melihat keadaan yang ada namun juga melihat dari aspek-aspek yang lain.

Harta bersama dalam hukum Islam terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa dalam kitab-kitab fikih tradisional harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain harta bersama itu harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.<sup>199</sup> Perkara harta bersama ini masuk dalam kategori *syirkah abadan* dan *mufawadlah*.<sup>200</sup> *Syirkah abadan* atau *syirkah al-a'mal* adalah persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan, hasil atau upah dari hasil pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Sedangkan *syirkah muwafadlah* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal resiko kerugian.<sup>201</sup>

Pendapat pakar hukum Islam yang kedua menyatakan bahwa Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-Qur'an, oleh karena itu diserahkan kepada mereka sepenuhnya yang mengaturnya.<sup>202</sup> Hukum Islam sendiri mengatur pembagian harta bersama pada Kompilasi Hukum Islam serta pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

<sup>197</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 382

<sup>198</sup> Sudirman Suparmin, “Peran Maqasid Syariah dalam Kehidupan”, <http://respository.uinsu.ac.id>, 21 Mei 2020

<sup>199</sup> Abdul Manan, *Op.Cit.*, hlm. 109

<sup>200</sup> *Ibid.*, hlm. 111

<sup>201</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2010) hlm. 348

<sup>202</sup> *Ibid.*, hlm. 109



atau dengan kata lain KHI mengamanatkan pembagian harta bersama sebesar setengah, atau dibagi dua.

Putusan pengadilan agama kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl yang pada amarnya menentukan pembagian harta bersama sebesar 2/3 bagian untuk Penggugat (istri) dan 1/3 bagian untuk tergugat (suami) menurut hemat penulis sudah mencerminkan nilai keadilan dan berorientasi pada *maqashid al syariah* dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*), karena pembagian tersebut hakim mempertimbangkan siapa yang lebih berperan dalam pembelian harta bersama, dalam hal ini adalah pihak istri yang membeli seluruh harta bersama tersebut dari hasil kerjanya sebagai tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri, serta pihak suami berperan dalam hal perawatan harta bersama tersebut saja. Selain itu, permasalahan harta bersama pada putusan ini sudah dibawa ke ranah pengadilan oleh para pihak, sehingga sudah barang tentu permasalahan ini sudah tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan, maka putusan harta bersama ini termasuk bentuk *maqashid al syariah* dalam hal menjaga harta (*hifz al-mal*) dan apabila majelis hakim tidak menyelesaikan dan memberi amar putusan secara adil, maka akan mengancam eksistensi dari harta bersama tersebut dan memungkinkan menimbulkan masalah baru yaitu timbulnya konflik dari para pihak. Putusan hakim dalam hal ini mencerminkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

Secara umum kaidag tersebut dpat diartikan bahwa segala tindakan atau kebijakan seorang imam (pemimpin) terhadap orang yang berada dibawah kepemimpinannya harus mengacu pada terwujudnya manfaat duniawi maupun manfaat ukhrowi yang diraih atau berupa bahaya dan kerusakan yang terhindarkan dari orang-orang yang berada dibawah kepemimoinannya. Menurut Abdul Mujib tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan golongan atau sendiri.<sup>203</sup> Dalam putusan tersebut kebijakan imam (dalam hal ini majelis hakim) mengambil kebijakan yang didasarkan demi terwujudnya kemaslahatan para pihak yang bersengketa dengan amar putusannya yang membagi harta bersama sesuai porsi perolehan masing-masing pihak.

Jenis kemaslahatan dalam putusan ini adalah *maslahah mu'tabaroh*. *Maslahah mu'tabaroh* adalah kemaslahatan yang mendapatkan dukungan oleh syara'. Baik jenis ataupun bentuknya, artinya ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.<sup>204</sup> majelis hakim dalam putusan harta bersama nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl menetapkan pembagian harta bersama menetapkan pembagian harta bersama tersebut diluar dari ketentuan hukum positif yang ada, yakni membagi 1/3 bagian untuk Tergugat (suami) dan 2/3 bagian untuk Penggugat (istri) hal didasarkan pada besaran perolehan harta bersama tersebut. sehingga putusan hakim tersebut disebut dengan *maslahah mu'tabaroh* karena sesuai dengan ayat :

<sup>203</sup> Ahmad Rifai, "Implikasi kaidah تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ terhadap Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia", *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial islam*, diakses dari <http://jurnalstaialhidayahbogor> pada 14 Juli 2020, hlm. 296-297

<sup>204</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam* (cet, I: Jakarta : Ikhtiar Baru van Hoeve, 1984) h. 1109

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyarankan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati (Q.S. An-Nisa’ (4) : 4)”

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penulis telah melakukan pembahasan dan analisis dalam skripsi yang berjudul Analisis Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl Ditinjau dari Prespektif *Maqashid Al-Syariah*, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl adalah menimbang dari fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, baik itu dari saksi-saksi, bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan. Majelis hakim memutuskan pembagian harta bersama sebesar 2/3 bagian untuk Penggugat dan 1/3 bagian untuk Tergugat, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada teori keadilan distributif. Dalam hal pembelian harta bersama berasal dari hasil kerja Penggugat selama menjadi TKI di luar negeri, sehingga Penggugat memiliki andil yang lebih besar dari pada Tergugat. Walaupun Tergugat ikut serta dalam hal penjagaan dan perawatan harta bersama tersebut dan Tergugat pun bekerja sebagai buruh di pabrik Kayu Lapis Indonesia.
2. Tinjauan *maqashid al-syari'ah* dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl adalah termasuk dalam menjaga harta (*hifz al mal*) dalam hal *daruriyyat* dan *hajiyyat*. Dilihat dari tingkatan *daruriyyat* pembagian harta bersama pada putusan ini memiliki tujuan yakni menjaga eksistensi harta yang kepemilikannya terjadi permasalahan, karena pada dasarnya harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami), setelah terjadi perceraian yang seharusnya harta tersebut dibagi oleh kedua belah pihak namun pembagian tersebut tidak berhasil. Sehingga adanya putusan pengadilan nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl memberikan manfaat karena penyelesaian pembagian harta bersama melalui jalur kekeluargaan tidak menemukan titik temu, apabila pembagian itu tetap tidak bisa diselesaikan maka akan menimbulkan masalah misalnya salah satu pihak menggunakan harta bersama secara sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak yang lain. Selain itu, dilihat dari segi tingkatan *hajiyyah*, pembagian harta bersama pada putusan tersebut adalah memiliki manfaat dalam hal mempermudah para pihak (suami dan istri yang telah bercerai) untuk lebih leluasa mempergunakan haknya pada harta bersama, dan apabila harta bersama tersebut sudah dibagi maka akan mempermudah para pihak dalam mengaplikasikannya sesuai kehendaknya masing-masing.

#### B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagi majelis hakim yang memutus sengketa harta bersama lebih bersifat kontekstual dan megedepankan pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak hanya pada sisi

normativitasnya, tetapi juga melihat sisi sosiologi dan moral filosofis pada konsep keadilan, sehingga putusan yang diberikan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

2. Bagi pihak yang mempunyai masalah mengenai harta bersama, hendaknya sengketa harta bersama dalam perkawinan diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan (*non litigasi process*), karena penyelesaian melalui upaya musyawarah lebih memungkinkan terjadinya kesepakatan yang menghasilkan menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*).
3. Bagi pihak yang berberkara, hendaknya penyelesaian sengketa harta bersama melalui ranah litigasi di Pengadilan hendaknya diletakan sebagai opsi/pilihan terakhir, dan lebih mengutamakan penyelesaian melalui jalur non litigasi seperti mediasi atau musyawarah oleh pihak keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Erfani Aljan, *Pembaruan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, Yogyakarta: UII Press, 2017
- Abdullah, Erfani Aljan, *Pembaruan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, Yogyakarta: UII Press, 2017
- Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Al-Adl*, Vol. VI, No. 11, 2014
- Agus Priono, dkk., "Penerapan Teori Penafsiran Hukum oleh Hakim sebagai Upaya Perlindungan hukum" *Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 5, No. 2, 2017
- Ali Mutakin, "Teori Maqashid al Syariah dan hubungannya dengan metode istinbath hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 19, No. 3, 2019
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Arto, Mukti, *Praktek-Praktek Perdata pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Atika Rkminasiti Masrifah dan Achmad Firdaus, "The Framework of Maslahah Performa as Wealth Management System and its Implication for Public Policy Objectives", *Jurnal Media Syariah*, Vol. 18, No. 2, 2016
- Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 2, 2014
- Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama dari Prespektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat", *Jurnal Prespektif*, Vol. XIX, No. 3, 2014
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Efendi, Joenadi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016
- Etti Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28, No. 1, Februari 2013
- Evi Djuniarti, "Hukum Harta bersama Ditinjau dari Prespektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, no. 4, 2017
- Friedmann, W., *Teori dan Filsafat Hukum (Legal Theory)*, Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2007
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Hanna Abdullah, *Kedudukan Harta Bersama Setelah Putus Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah Penerjemah Khikmawati (kuwais)*, Jakarta: Amzah, 2009
- Karim, Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A Tahun 2018

Lubis, Sulaikin, dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2004

Lubis, Sulaikin., Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2004

M. Sapuan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk.) *Skrpsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2006

Mappiasse, Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta:PrenadaMedia Group, 2015

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Jakarta:Prenada Media, 2017

Masyitha Putri Awaliyah, Harta Bersama yang Diserahkan kepada Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus No. 346/Pdt.G/2010/PA.Sgm), *Skrpsi* Universitas Hasanuddin Makassar

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty, 1993

Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam" *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Mazahib*, Vol. XIV, No. 2, 2015

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Amzah, 2010

Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana:2005

Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghaila Indonesia, 2003

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2003

Narbuko, Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2003

Noer, Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Cetakan II Edisi Revisi, Bandung:Pustaka Mizan, 1997

Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonrsia*, Jakarta:Kencana, 2004

Pinsensius Meji, "Konsep Keadilan Menurut Aristoteles dalam Buku *Nicomachean Ethics* Buku Lama, *skripsis* Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya, 2019

Popper, Karl R., *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya (The Open Society and Its Enemy)* terj, Cetakan I, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2002

Rabiatul Adawiyah K, Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawan (Studi Kasus Putusan No.871/Pdt.G/2011/PA.Mks), *Skrpsi* Universitas Hasanuddin Makassar, 2014

Rahman, "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Tahun 2008-2014), *Skrpsi* UIN Alauddin Makassar, 2014

Rasyid, Raihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta:Rajawali, 1990

Rawl, John, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2011

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015

S, Bambang Sugeng A., dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta:Kencana, 2012

- Said, Umar, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, Bandung:Mizan, 2010
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl
- Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2019
- Shan'any, (al), *Subul al-Salam*, jus 3, Kairo: Dar Ihya al-Taurats al-Araby, 1379 H/1969 M
- Shidiq, Shaipudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta:Kencana, 2011
- Siah Khosyi'ah, "Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahij*, Vol. XI, No. 1, 2017
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan singkat*. Jakarta:CV. Rajawali, 1985
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia Press, 2012
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta:Intermasa, 2001
- Sugiono, *Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta, 2009
- Sulistiani, Siska Lis, *Hukum perdata Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2018
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Jakarta:Visimedia, 2008
- Svinarky, Irene, *Bagian-Bagian Penting yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Batam: CV. Batam Publisher, 2019
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2010
- Tim Penerjemah, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, Semarang:Toha Putra Semarang, 1996
- Tommy Hendra Purwaka, "Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum yang Rasional", *MMH, ejournal.undip*, Jilid 40, No. 2, 2011
- Umar, H.M. Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007
- Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, Yogyakarta:Medpress Digital, 2014
- Vollmar, H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika, 1991
- Zulfikar Makodompit, "Penerapan Hukum Positif terhadap Harta Gono-Gini dihubungkan dengan Hukum Islam", *Lex Administratum*, Vol. III, No. 6, 2015
- <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicohamean.html>. (Diakses pada 12 Mei 2020)
- <http://pn-serui.go.id> pada 3 Juni 2020
- <http://respository.uinsu.ac.id> (Diakses pada 21 Mei 2020)
- [http://suci\\_k.staff.gunadarma.ac.id](http://suci_k.staff.gunadarma.ac.id) (Diakses 30 April 2020)
- <http://www.coursehero.com> (Diakses pada 19 Mei 2020)
- <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com> (Diakses pada 5 Juni 2020)
- <https://www.jurnalhukum.com> (Diakses pada 13 Mei 2020)

## LAMPIRAN

### SALINAN PUTUSAN

Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

**Purwati binti Sumardi**, Kendal, 10 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal dulu di Desa Pucangrejo RT 010 RW 003, Kecamatan Pgandon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sekarang beralamat di Karangayu RT 004 RW 003, Kecamatan Cepiring, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum., Ashari, S.Ag., M.H., dan Moh Nur Abidin, S.H.I., para Advokat dari Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Km 02, Kampus III Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2019, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

**Muslichun bin Matari**, Kendal, 26 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Pucangrejo RT 010 RW 003, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Nur Chozin, S.H., Mashadi, S.Ag., S.H., M.H., Faqih Khoironi, S.H., M.H., dan Muhammad Ainul Fuad, S.H.I., para Advokat dari Kantor Advokat Lawyर्सantun Nur Chozin, S.H., dan Partner, yang beralamat di Jalan Randu Gembyang Km 1,6, Desa Pesawahan RT 002 RW 002, Kecamatan Pegandon,



Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat KUasa Khusus tanggal 15 Oktober 2019, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 02 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl, pada tanggal 02 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 05 Desember 1998, sesuai dengan hukum Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, dan sejak 2 April 2019 telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kendal No. 199/Pdt.G/2019/PA Kdl. Tanggal 11 Maret 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membangun kehidupan rumah tangga Penggugat bekerja menjadi TKW di Singapura dari Tahun 2000 sampai dengan 2001 dan di Hongkong dari tahun 2002 sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
3. Bahwa hasil kerja Penggugat selama menjadi TKW digunakan untuk membeli barang-barang rumah tangga (mebeler), membuat rumah, membeli pekarangan dan sawah, yaitu:
  - a) Sebidang Sawah SHM. Nomor 73, atas nama Muslikun suami Purwati, luas 1.950 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - sebelah Utara : tanah milik Semi
    - sebelah Selatan: tanah milik Sarinah
    - sebelah Barat : jalan
    - sebelah Timur : kalen air

selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa I. Dan saat ini obyek sengketa I dikuasai oleh Tergugat;

b) Sebidang tanah pekarangan luas  $\pm 90 \text{ M}^2$ , terletak di Desa Pucangrejo RT 010 RW 003, Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : tanah pekarangan Rakan
- sebelah Selatan: rumah Purwati dan Muslichun
- sebelah Barat : tanah Kamijan
- sebelah Timur : tanah Rakan dan Solekan

selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II. Dan saat ini obyek sengketa II dikuasai oleh Tergugat;

c) Sebuah bangunan rumah luas  $\pm 104 \text{ M}^2$ , terletak di Desa Pucangrejo RT 010 RW 003, Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : tanah Purwati dan Muslichun
- sebelah Selatan: jalan kampung
- sebelah Barat : tanah Kamijan
- sebelah Timur : tanah Solekan

selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa III. Dan saat ini obyek sengketa III dikuasai oleh Tergugat;

d) Perabot rumah tangga, antara lain:

- almari kayu jati 4 (empat) buah;
- almari bifet besar 1 (satu) buah;
- almari bifet tanggung kaca 1 (satu) buah;
- almari sepatu dan isinya 1 (satu) buah;
- almari hias 1 (satu) buah;
- almari belajar tempat buku 1 (satu) buah;
- almari rak piring 1 (satu) buah;
- hiasan dinding 4 (empat) buah;
- Peralatan dapur (kulkas, mesin cuci)
- Meja kursi tamu satu set;

selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa IV. Dan saat ini obyek sengketa IV dikuasai oleh Tergugat;

4. Bahwa semua obyek sengketa I sampai dengan IV hampir semuanya adalah hasil kerja Penggugat selama menjadi TKW, maka mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan membagi harta gono-gini di atas, untuk Penggugat 2/3 dari semua harta gono gini dan 1/3 harta gono-gini untuk Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali berusaha untuk menyelesaikan persoalan harta gono gini ini secara kekeluargaan, namun hingga sekarang tidak berhasil;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa I sampai dengan IV adalah harta gono gini Penggugat dan Tergugat;
3. Menentukan dan menetapkan bagian masing-masing pihak, untuk Penggugat 2/3 dan Tergugat 1/3 dari semua harta gono gini;
4. Membagi harta gono gini secara natural dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, mohon dibagi dengan dijual melalui lelang;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan 2/3 harta gono gini kepada Penggugat;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang didampingi kuasanya menghadap sendiri, dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil, maka selanjutnya majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh penyelesaian perkara mereka melalui mediasi dengan mediator non hakim bersertifikat



Mohammad Abrori Setya Nugraha, S.H.I., akan tetapi sesuai laporan mediator bertanggal 05 Növember 2019 usaha mediasi tersebut tidak berhasil menyelesaikan perkara ini secara damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, di mana atas pertanyaan majelis Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 20 November 2019 yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa semua obyek sengketa yang disampaikan Penggugat tidak disebutkan kapan memperolehnya apakah dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atau tidak? Dalam gugatan a quo tidak disebutkan Penggugat;
2. Bahwa posita 3 huruf b gugatan Penggugat obyeknya tidak jelas karena Penggugat tidak menyebutkan status tanah pekarangan obyek sengketa II, apakah sudah sertifikat hak milik ataukah belum, atas nama siapa tanah obyek sengketa II tersebut semuanya tidak jelas;
3. Posita 3 huruf c gugatan Penggugat obyeknya juga tidak jelas karenaa Penggugat tidak menyebutkan rumah obyek sengketa III itu di atas tanah milik siapa, rumahnya permanen apa rumah kayu sehingga kurang jelas dan menimbulkan banyak pertanyaan;

Berdasar dari fakta tersebut di atas makadapat disampaikan bahwa gugatan Penggugat kurang lengkap, kabur dan tidak jelas (*obscuur lilel*), dengan demikian sangat beralasan hukum apabila dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat memohon agar yang termuat dalam eksepsi dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
3. Bahwa benar posita 1 dan 2 gugatan Penggugat;

4. Bahwa Tergugat membantah posita 3 gugatan Penggugat, karena untuk membeli harta bersama Tergugat juga ikut andil mengeluarkan uang bahkan Tergugat juga andil besar untuk mengelola serta merawat harta bersama tersebut, jadi tidak sepenuhnya dari hasil Penggugat bekerja; Selanjutnya terhadap obyek sengketa sebagaimana disampaikan Penggugat dengan ini Tergugat memberi tanggapan sebagai berikut:
- a. Tergugat mengakui adanya obyek sengketa I perkara a quo;
  - b. Obyek sengketa II perkara a quo tidak jelas, sehingga Tergugat tidak menanggapi;
  - c. Obyek sengketa III juga tidak jelas bangunan rumah yang mana yang dimaksud Penggugat. Dalam hal ini perlu Tergugat sampaikan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada harta bersama berupa rumah, namun yang benar adalah Penggugat dan Tergugat hanya merenovasi rumah milik orangtua Tergugat untuk dijadikan kediaman bersama;
  - d. Obyek sengketa IV perkara a quo yang masih ada saat ini hanyalah:
    - Almari kayu 2 buah;
    - Almari buffet 1 buah;
    - Almari sepatu 1 buah;
    - Almari hias 1 buah;
    - Almari belajar 1 buah;
    - Almari rak piring 1 buah;
    - Hiasan dinding 4 buah;
    - Peralatan dapur (kulkas) 1 buah;
    - Selebihnya sudah tidak layak pakai sehingga sekarang tidak ada;
5. Bahwa Tergugat membantah posita 4 gugatan Penggugat, karena untuk membeli harta bersama Tergugat juga ikut andil mengeluarkan uang bahkan Tergugat juga andil besar untuk mengelola serta merawat harta bersama, jadi tidak sepenuhnya dari hasil Penggugat bekerja;

6. Bahwa Tergugat sangat keberatan kalau penyelesaian harta bersama Tergugat hanya mendapat bagian 1/3, karena itu sangat bertentangan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, apalagi selama ini Tergugat telah merawat dan mengelola dengan baik atas harta bersama tersebut di atas, dan untuk itu kalau Penggugat menginginkan pembagian maka sangatlah adil kalau dibagi 2 (1/2 bagian untuk Penggugat dan 1/2 bagian untuk Tergugat);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon agar yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, majelis berpendapat sudah menyangkut kepada pokok perkara di mana tentang obyek harta bersama yang dipersengketakan adalah diperoleh dalam masa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan, dengan batas-batas yang telah disebutkan secara rinci, oleh karena itu eksepsi Tergugat akan diputus sekaligus dalam putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 27 November 2019, yang selengkapnya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan duplik tertanggal 04 Desember 2019, yang isi pokoknya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa:



- Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendal Nomor 0798/AC/2019/PA.Kdl, tanggal 02 April 2019 (Bukti P-1);
- Fotokopi Karta Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3324105003790001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal tanggal 06 Agustus 2019 (Bukti P-2);
- Fotokopi Sertifikat SHM Nomor 73 yang dikelurakan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kendal tanggal 04 Februari 2015 (Bukti P-3);
- Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tegugat dengan nomor 0609 tanggal 20 November 2005, (Bukti P-4.1);
- Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 09 Juli 2006, sebesar Rp 5.800.000,- (Bukti P-4.2);
- Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 01 Februari 2007 sebesar Rp 5.112.800,- dan tanggal 26 Juni 2007 sebesar Rp 18.034.500,- (Bukti P-4.3);
- Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 22 Mei 2009 sebesar Rp 3.552.128,00 dan tanggal 06 Juli 2009 sebesar Rp 1.537.801,00 (Bukti P-4.4);
- Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 03 Juli 2009 sebesar Rp 2.099.359,00 dan tanggal 10 Agustus 2009 sebesar Rp 2.160.602,00 (Bukti P-4.5);
- Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Penggugat tanggal 26 November 2009 sebesar Rp 1.324.700,00 dan tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp 1.179.400,00 (Bukti P-4.6);
- Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 06 Desember 2009 sebesar Rp 3.105.600,00 (Bukti P-4.7);
- Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 27 Januari 2010 sebesar Rp 1.165.000,00, tanggal 26 Februari 2010 sebesar Rp 2.118.700,00, tanggal 28 Maret 2010 sebesar Rp 1.252.800,00 dan tanggal 01 April 2010 sebesar Rp 1.126.500,00 (Bukti P-4.8);
- Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 27 April 2010 sebesar Rp 1.000.000,00 dan tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp 1.217.000,00, tanggal 26 Agustus 2010 sebesar Rp

1.115.800,00, tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp 505.200, tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp 1.300.000,00 dan tanggal 24 November 2010 sebesar Rp 542.400,00 (Bukti P-4.9);

- Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp 16.077.100,00 (Bukti P-4.10);
- Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp 542.300,00 dan tanggal 14 April 2011 sebesar Rp 2.510.000,00 (Bukti P-4.11);
- Fotokopi bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp 1.152.200,00, tanggal 05 Juni 2011 sebesar Rp 1.084.400,00, tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp 328.600,00 dan tanggal 06 Juli 2011 sebesar Rp 325.100,00, tanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp 509.100,00 dan tanggal 08 Agustus 2011 sebesar Rp 316.000,00 (Bukti P-4.12);
- Fotokopi bukti pengiriman uang tanggal 18 Agustus 2011 sebesar Rp 1.052.300,00 dan tanggal 28 November 2011 sebesar Rp 46.378.100,00 (Bukti P-4.13);
- Fotokopi pengiriman uang tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 5.787.300,00 dan tanggal 06 Desember 2011 sebesar Rp 9.235.900,00 (Bukti P-4.14);
- Fotokopi pengiriman uang tanggal 04 Juli 2012 sebesar Rp 563.700,00 dan tanggal 11 Juli 2012 sebesar Rp 1.173.900,00 (Bukti P-4.15);
- Fotokopi pengiriman uang tanggal 22 Juli 2012 sebesar Rp 1.176.700,00, tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp 1.055.000,00 dan tanggal 09 September 2012 sebesar Rp 1.556.200,00 (Bukti P-4.16);
- Fotokopi pengiriman uang 24 Februari 2013 sebesar Rp 709.800,00 dan tanggal 24 Maret 2013 sebesar Rp 5.560.800,00 dan Rp 1.558.100,00 dan tanggal 25 April 2013 sebesar Rp 535.800,00, tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp 2.529.700,00, tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp 2.198.100,00, tanggal 09 Juli 2013 sebesar Rp 1.514.600,00 dan tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp 5.233.200,00 (Bukti P-4.17);
- Fotokopi pengiriman uang tanggal 31 Agustus 2013 sebesar Rp 15.435.800,00, tanggal 15 September 2013 sebesar Rp 1.134.000,00,



- tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp 2.166.400,00, tanggal 04 November 2013 sebesar Rp 539.900,00, tanggal 20 November 2013 sebesar Rp 552.500,00 dan tanggal 04 Desember 2013 sebesar Rp 540.100,00 (Bukti P-4.18);
- Fotokopi pengiriman uang tanggal 07 Desember 2013 sebesar Rp 527.200,00 dan tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp 3.545.500,00 (Bukti P-4.19);
  - Fotokopi pengiriman uang tanggal 03 Januari 2014 sebesar Rp 5.413.400,00, tanggal 13 Januari 2014 sebesar Rp 2.500.000,00, tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp 1.046.300,00, tanggal 05 Februari 2014 sebesar Rp 6.233.200,00, tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp 1.112.400,00 dan tanggal 25 Februari 2014 Rp 3.693.300,00, tanggal 30 Maret 2014 sebesar Rp 1.573.700,00, tanggal 19 April 2014 sebesar Rp 1.019.100,00, tanggal 10 Mei 2014 sebesar Rp 3.031.300,00, tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp 1.037.100,00, tanggal 03 Juni 2014 sebesar Rp 1.650.100,00, tanggal 18 Juni 2014 sebesar Rp 3.747.300,00, tanggal 19 Juni 2014 sebesar Rp 1.027.110,00, tanggal 15 Juli 2014 sebesar Rp 718.300,00, tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp 1.505.800,00 (Bukti P-4.20);
  - Fotokopi pengiriman uang tanggal 07 Agustus 2014 sebesar Rp 1.052.200,00, tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp 9.249.400,00, tanggal 22 Agustus 2014 sebesar Rp 1.578.700,00 dan tanggal 24 September 2014 sebesar Rp 1.531.600,00 (Bukti P-4.21);
  - Fotokopi pengiriman tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp 1.044.100,00 dan tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp 20.015.460,00 (Bukti P-4.22);
  - Fotokopi pengiriman uang tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp 20.000.000,00 dan tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp 2.528.700,00 (Bukti P-4.23);
  - Fotokopi pengiriman uang tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp 10.290.500,00 (Bukti P-4.24);

- Fotokopi pengiriman uang tanggal 01 Februari 2015 sebesar Rp 2.119.200,00, dan tanggal 16 Februari 2015 sebesar Rp 1.044.900,00 (Bukti P-4.25);
- Fotokopi pengiriman uang tanggal 21 Februari 2015 sebesar Rp 3.235.300,00 dan tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp 3.628.200,00, tanggal 11 April 2015 sebesar Rp 535.700,00, tanggal 06 Juni 2015 sebesar Rp 11.077.900,00, tanggal 27 Juni 2015 sebesar Rp 4.594.400,00 dan tanggal 11 Juli 2015 sebesar Rp 2.060.300,00 (Bukti P-4.26);
- Fotokopi pengiriman uang tanggal 01 Agustus 2015 sebesar Rp 1.689.200,00 dan tanggal 15 Agustus 2015 sebesar Rp 5.270.900,00, tanggal 22 Agustus 2015 sebesar Rp 3.066.800,00 dan tanggal 17 Oktober 2015 sebesar Rp 3.581.500,00, tanggal 03 Oktober 2015 sebesar Rp 1.084.300,00 dan tanggal 05 Desember 2015 sebesar Rp 2.624.000,00 (Bukti P-4.27);
- Fotokopi pengiriman uang tanggal 05 Januari 2016 sebesar Rp 3.022.600,00 dan tanggal 23 Januari 2016 sebesar Rp 1.062.600,00 (Bukti P-4.28);
- Fotokopi pengiriman uang tanggal 24 April 2016 sebesar Rp 2.071.700, tanggal 11 Juni 2016 sebesar Rp 3.034.000,00, tanggal 25 September 2016 sebesar Rp 2.118.200,00 (Bukti P-4.29);
- Fotokopi pengiriman uang tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp 9.059.400,00, tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 10.382.200,00 (Bukti P-4.30);
- Fotokopi pengiriman uang tanggal 03 Januari 2017 sebesar Rp 10.285.200,00 dan tanggal 04 Januari 2017 sebesar Rp 10.822.700,00 (Bukti P-4.31);
- Fotokopi pengiriman uang tanggal 05 Januari 2017 sebesar Rp 10.199.400,00 dan tanggal 04 Januari 2017 sebesar Rp 10.783.000,00, tanggal 03 Maret 2017 sebesar Rp 1.044.700,00 dan tanggal 01 April 2017 sebesar Rp 9.996.210,00 (Bukti P-4.32);
- Fotokopi pengiriman uang tanggal 02 April 2017 sebesar Rp 10.324.200,00, tanggal 06 April 2017 sebesar Rp 2.512.200,00, tanggal

- 04 Agustus 2017 sebesar Rp 1.032.400,00 dan tanggal 14 Mei 2017 sebesar Rp 1.028.000,00 (Bukti P-4.33);
- Fotokopi pengiriman uang tanggal 22 April 2017 sebesar Rp 1.046.900,00 dan 29 April 2017 sebesar Rp 3.545.300,00, tanggal 06 Agustus 2017 sebesar Rp 3.064.400,00 dan tanggal 25 Juni 2017 sebesar Rp 712.100,00 (Bukti P-4.34);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas pertanyaan majelis, masing-masing mengaku bernama:

1. **Ahmad Samsi bin Sutriyono**, Kendal, 21 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik Kayu Lapis Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kebonharjo RT 003 RW 002, Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena sebagai teman kerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami istri belum punya anak namun sejak April 2019 telah bercerai;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada Desember 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa ketika masih menjadi suami istri, pada tahun 2001 Penggugat bekerja di Hongkong, pada tahun 2003 cuti di rumah sekitar 1 bulan kemudian pulang lagi pada tahun 2006 karena cuti dan berangkat lagi pulang pada 2009, setelah cuti 2009 Tergugat berangkat lagi sampai sekarang sedangkan Tergugat bekerja di pabrik Kayu Lapis Indonesia sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat bekerja di Hongkong uang hasil/gaji selalu dikirimkan kepada Tergugat;



- Bahwa setahu saksi Selma dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama tanah dan sawah sebanyak 3 obyek yaitu:
    - Sebidang sawah luas sekitar 1.950 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;
    - Sebidang tanah pekarangan luas sekitar 90 m<sup>2</sup> terletak di RT 010 RW 003, Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;
    - Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya luas sekitar 104 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 010 RW 002, Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;
    - Perabot rumah tangga seperti almari pakaian, buffet, meja kursi tamu, kulkas, televisi dan lain-lain;
    - Bahwa harta bersama tersebut diperoleh sekitar tahun 2003 ketika Penggugat bekerja di Hongkong;
    - Bahwa setahu saksi, membeli tanah-tanah tersebut dari uang hasil bekerja Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat;
    - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah-tanah itu sebelumnya;
    - Bahwa saat ini harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi sejak sengketa ini sawah sudah tidak dikelola;
    - Bahwa rumah bersama tersebut dibangun pada tahun 2002 ketika Penggugat bekerja di luar negeri (Hongkong);
2. **Rosidi bin Repan**, Kendal, 23 Maret 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan pabrik, bertempat tinggal di Dusun Karangtengah RT 004 RW 003, Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami istri namun sejak April 2019 keduanya telah bercerai;
  - Bahwa seingat saksi Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan Desember 1998;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan KLI (Kayu Lapis Indonesia);
- Bahwa ketika mereka masih suami istri, pada tahun 2001 Penggugat bekerja di Hongkong pulang cuti 1 bulan pada 2003, berangkat lagi ke Hongkong dan pulang pada tahun 2006 karena cuti dan berangkat lagi tahun itu dan pulang pada tahun 2009, berangkat lagi dan terakhir pulang pada tahun 2018 untuk mengurus perceraian;
- Bahwa setahu saksi Penggugat selalu mengirim uang hasil bekerja kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mulai berhasil sebagai TKI dan mengirimkan hasilnya kepada Penggugat setelah tahun 2005;
- Bahwa selama dalam perkawinan mereka mempunyai harta bersama berupa:
  - Sebidang tanah luas sekitar 1.950 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;
  - Sebidang tanah pekarangan luas sekitar 90 m<sup>2</sup> terletak di RT 010 RW 003, Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;
  - Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya luas sekitar 104 m<sup>2</sup> terletak di RT 010 RW 003, Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;
- Perabot rumah tangga seperti almari pakaian, bufet, meja kursi tamu, kulkas dan televisi;
- Bahwa saksi tidak tahu pembelian harta tersebut hanya harta itu selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pembelian harta bersama tersebut ya dari uang hasil kerja Penggugat di luar negeri;
- Bahwa untuk tanah seluas 90 m<sup>2</sup> dan 104 m<sup>2</sup> dibeli dari orangtua Tergugat, tanah yang luasnya 104 m<sup>2</sup> yang kemudian dibangun rumah bersama mereka;

- Bahwa rumah tersebut dibangun tahun 2001 ketika Penggugat bekerja di luar negeri karena saksi yang membelikan materialnya;
- Bahwa saksi tidak tahu menghabiskan biaya berapa rupiah, yang saksi tahu kalau yang membangun hasil dari uang kiriman Penggugat bekerja di luar negeri;
- Bahwa saat ini harta bersama tersebut dikuasai Tergugat namun sejak sengketa ini sawah sudah tidak dikelola;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Septia Nofita Vebriyanti, Nomor 3324-LT-28112011-0128 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tanggal 28 November 2011, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti-T);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Ahmad Suwardi bin Kamsani**, Kendal, 01 Agustus 1959, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pucang Kowi RT 010 RW 003, Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami istri dan mempunyai 1 orang anak perempuan namun keduanya telah bercerai;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tepatnya mereka bercerai tetapi setahu saksi pada tahun 2019;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Desember 1998;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat dan pada tahun 2001 mempunyai rumah sendiri;
- Bahwa rumah bersama tersebut pemberian orangtua Tergugat kemudian dibangun kembali oleh keduanya;
- Bahwa ketika mereka masih menjadi suami istri , pada tahun 2001 Penggugat bekerja di luar negeri tetapi 1 tahun kemudian pulang dan tidak berhasil dan baru berhasil tahun 2005 dan sampai sekarang masih bekerja di Hongkong sedangkan Tergugat bekerja di pabrik Kayu Lapis Indonesia;
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika Penggugat pulang sebelum tahun 2005 tidak membeli apa-apa;
- Bahwa rumah tersebut direnovasi secara bertahap dari hasil kerja Tergugat di pabrik Kayu Lapis dan bekerja di sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mengirimkan uang hasil bekerja;
- Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya mempunyai harta bersama berupa sawah seluas kira-kira 1.950 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa rumah bersama beserta tanahnya itu pemberian orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dalam rumah bersama terdapat almari, kulkas dan televisi akan tetapi saksi tidak tahu jumlah detailnya;
- Bahwa ketika membeli sawah pada tahun 2005 dari hasil Penggugat bekerja di luar negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah sawah sebelumnya;
- Bahwa tanah pekarangan tersebut pemberian orangtua Tergugat;
- Bahwa harta bersama hanya sawah dan sejak sengketa ini sawah sudah tidak dikelola Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah beserta rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat karena itu pemberian dari orangtua Tergugat;

2. Subari bin Kemin, Kendal, 05 November 1952, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pucang Kowi RT 010 RW 03, Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami istri, namun pada tahun 2019 keduanya sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan ikut Tergugat;
- Bahwa seingat saksi Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orangtua Tergugat dan pada tahun 2001 mempunyai rumah sendiri;
- Bahwa rumah bersama tersebut pemberian orangtua Tergugat kemudian dibangun kembali oleh keduanya;
- Bahwa ketika masih menjadi suami istri Penggugat bekerja sebagai TKI dan Tergugat kerja di pabrik Kayu Lapis Indonesia sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat menjadi TKI sejak tahun 2001 akan tetapi berhasil sejak tahun 2005;
- Bahwa ketika pulang tidak membeli apa-apa dan sejak tahun 2005 Penggugat bisa dikatakan berhasil;
- Bahwa rumah tersebut direnovasi secara bertahap dari hasil bekerja Tergugat di KLI dan di sawah;
- Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya mempunyai harta bersama sebidang tanah sawah yang luasnya sekitar 1.950 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa ketika sawah dibeli pada tahun 2015 dari hasil Penggugat bekerja di luar negeri;
- Bahwa harga sawah tersebut Rp 140 juta lewat perantara saksi;



- Bahwa awalnya sawah tersebut milik Hj. Mulyati dibeli oleh orang dari Bojonggede lalu dijual lagi kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah bersama beserta tanahnya itu adalah pemberian dari orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah pekarangan itu dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perabot rumah mereka;
- Bahwa harta bersama berupa sawah dikuasai oleh Tergugat dan sejak sengketa ini sawah sudah tidak dikelola;
- Bahwa tanah, rumah dan tanah pekarangan adalah pemberian dari orangtua Tergugat;
- Bahwa rumah pemberian orangtua Tergugat lalu direnovasi Penggugat dan Tergugat dan dibangun dengan batu bata sedangkan kayu bekas rumah untuk kusen-kusen rumah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh data tentang obyek sengketa harta bersama Penggugat dengan Tergugat maka majelis memandang perlu untuk melaksanakan sidang di tempat (decente) di Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal pada tanggal 07 Februari 2020, selanjutnya diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Sebidang sawah SHM Nomor 73 atas nama Muslikhun Suami Purwati, dengan luas 1.950 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : tanah milik Semi
  - Sebelah selatan : tanah milik Sarinah
  - Sebelah barat : jalan
  - Sebelah timur : saluran air
- b. Sebidang tanah pekarangan luas 90 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pucangrejo RT 010 RW 003, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : tanah pekarangan Rakan
  - Sebelah selatan : rumah Purwati dan Muslikhun
  - Sebelah barat : tanah Kamijan (mabh To)
  - Sebelah timur : tanah Solekan

c. Sebuah bangunan rumah luas 104 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pucangrejo RT 010 RW 003, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Purwati dan Muslikhun
- Sebelah selatan : jalan kampung
- Sebelah barat : tanah Kamijan (mabh To)
- Sebelah timur : tanah Solekan

d. Perabot rumah tangga yang terdiri dari:

- Almari kayu jati 2 (dua) buah;
- Almari bufet besar 1 (satu) buah;
- Almari bufet kaca tanggung 1 (satu) buah;
- Almari sepatu 1 (satu) buah;
- Almari hias 1 (satu) buah dalam kondisi rusak;
- Meja belajar tempat buku 1 (satu) buah;
- Almari rak piring 1 (satu) buah;
- Hiasan dinding 4 (empat) buah;
- Peralatan elektronik kulkas 1 (satu buah);
- Mesin cuci 1 (satu) buah dalam kondisi rusak;
- Meja kursi tamu 1 (satu) set dalam kondisi rusak;

Bahwa dalam pemeriksaan setempat majelis telah pula mendengarkan keterangan dari Kepala Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, bernama Nur Said yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku Kepala Desa Pucangrejo, saksi sudah pernah mempertemukan Penggugat dengan Tergugat untuk mediasi tetapi belum ada titik temu dan tidak ada penyelesaian lalu Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah merupakan pemberian orangtua Tergugat, tetapi waktu itu rumahnya masih belum bagus kemudian dibangun saat keduanya masih dalam pernikahan;
- Bahwa tanah sawah itu dibeli pada tahun 2015 ketika Penggugat dengan Tergugat masih menjadi suami istri;

- Bahwa rumah dan pekarangan bukti pajaknya atas nama ayah kandung Tergugat yaitu Matari, karena di Desa tidak ada bukti telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sawah tersebut sudah bersertifikat atas nama Muslikhun suami Purwati;

Bahwa di rumah Penggugat dan Tergugat majelis telah pula bertemu dengan anaknya yang bernama Septia Nofia Vebriyanti binti Muslikhun, Kendal 23 September 1999, agama Islam, pendidikan/pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Pucangrejo RT 010 RW 003, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, yang menerangkan:

- Bahwa ia sebagai anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati Tergugat bersamanya;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja di luar negeri sejak ia masih kecil;
- Bahwa ia sudah 5 tahun tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat;

Bahwa baik Penggugat dan Tergugat selanjutnya menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 12 Februari 2020, kemudian kedua belah pihak memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan perkara ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaksanakan mediasi dengan menunjuk mediator bersertifikat non hakim Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.,



sesuai dengan laporannya tanggal 05 November 2019 tidak berhasil untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak secara damai;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa eksepsi Tergugat, namun oleh karena eksepsi tersebut sudah menyangkut kepada pokok perkara, maka majelis berpendapat eksepsi Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan dan menuntut agar pengadilan memberikan putusan tentang pembagian harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat berupa:

- a. Sebidang sawah SHM Nomor 73 atas nama Muslikhun Suami Purwati, dengan luas 1.950 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : tanah milik Semi
  - Sebelah selatan : tanah milik Sarinah
  - Sebelah barat : jalan
  - Sebelah timur : saluran air
- b. Sebidang tanah pekarangan luas 90 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pucangrejo RT 010 RW 003, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : tanah pekarangan Rakan
  - Sebelah selatan : rumah Purwati dan Muslikhun
  - Sebelah barat : tanah Kamijan (mabh To)
  - Sebelah timur : tanah Solekan
- c. Sebuah bangunan rumah luas 104 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pucangrejo RT 010 RW 003, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : tanah Purwati dan Muslikhun
  - Sebelah selatan : jalan kampung
  - Sebelah barat : tanah Kamijan (mabh To)
  - Sebelah timur : tanah Solekan
- d. Perabot rumah tangga, antara lain:
  - almari kayu jati 4 (empat) buah;

- almari bufet besar 1 (satu) buah;
- almari bufet tanggung kaca 1 (satu) buah;
- almari sepatu dan isinya 1 (satu) buah;
- almari hias 1 (satu) buah;
- almari belajar tempat buku 1 (satu) buah;
- almari rak piring 1 (satu) buah;
- hiasan dinding 4 (empat) buah;
- Peralatan dapur (kulkas, mesin cuci)
- Meja kursi tamu satu set;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu Tergugat membenarkan obyek sengketa I dan sebagian obyek sengketa IV dan menolak sebagian obyek sengketa yang lainnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga terjadi perceraian pada tanggal 11 Maret 2019, di Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4.1 sampai dengan P-4.34 yang telah dimeterai cukup dan sesuai aslinya, maka semua alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda P-1, yang merupakan bukti autentik, maka merupakan bukti yang mengikat, sehingga haruslah dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat resmi bercerai pada tanggal 11 Maret 2019 di Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda P-2 berupa bukti autentik, harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, sehingga secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda P-3, maka terbukti sertifikat Nomor 73 atas Muslikhun suami Purwati, yang dibeli oleh kedua belah pihak pada tahun 2005, bukti mana tidak dibantah Tergugat, oleh karenanya alat bukti tersebut dinilai sebagai alat bukti yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-4.1 sampai dengan P-4.34 dapat dibuktikan Penggugat telah mengirimkan uang hasil bekerja di Hongkong kepada Tergugat sejak dari tahun 2006 sampai dengan 2017, dengan jumlah sebagaimana tertera dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Ahmad Samsi bin Sutriyono dan Rosidi bin Repan, kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah membeli harta bersama pada tahun 2003 dari hasil kiriman uang Penggugat bekerja di Hongkong, padahal Penggugat baru mengirimkan gajinya secara rutin pada tahun 2006 sampai 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda T yang bermeterai dicocokkan aslinya, oleh karenanya surat bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti-T, yang merupakan bukti autentik, maka merupakan bukti yang mengikat, sehingga haruslah dinyatakan terbukti dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Septia Nofita Vebriyanti, lahir di Kendal pada tanggal 23 September 1999;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Tergugat yang bernama Ahmad Suwardi bin Kamsani dan Subari bin Kemin yang menyatakan benar Penggugat dan Tergugat membeli sawah seluas 1.950 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon pada tahun 2015 dari hasil Penggugat bekerja di luar negeri, sedangkan tanah pekarangan dan rumah bersama adalah pemberian ayah kandung Tergugat yang kemudian direnovasi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 2 yang menyatakan agar obyek sengketa I sampai dengan IV agar dapat ditetapkan oleh majelis sebagai harta gono gini Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa I posita angka 3 huruf (a) berupa sebidang tanah sawah seluas 1.950 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pucangrejo RT 10 RW 003, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, sertifikat Nomor 73 atas nama Muslikhun (Tergugat) suami Purwati (Penggugat), yang dibeli pada tahun 2015



saat Penggugat terikat dalam perkawinan yang berasal dari uang hasil kiriman bekerja di Hongkong, demikian juga Tergugat dalam jawabannya telah mengakui jika tanah sawah tersebut menjadi harta bersama hal ini sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi kedua Tergugat, oleh karenanya dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa II sebagaimana posita 3 huruf (b) tanah pekarangan luas sekitar 90 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pucangrejo RT 010 RW 003, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, yang dibeli dari orangtua Tergugat pada tahun 2006 seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalil yang menyatakan tanah pekarangan seluas 90 m<sup>2</sup> (obyek sengketa II) yang dibeli dari orangtua Tergugat tersebut tidak disertai dengan bukti surat dan atau saksi yang dapat menguatkan gugatannya, demikian juga dalam pemeriksaan setempat Kepala Desa Pucangrejo tidak dapat menunjukkan buku induk letter C karena Penggugat tidak bukti/bukti letter C dimaksud, sehingga dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan obyek sengketa posita angka 3 huruf (b) adalah kabur oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai posita angka 3 huruf (c) sebuah bangunan rumah luas 104 m<sup>2</sup> (obyek sengketa III) yang terletak di Desa Pucangrejo RT 010 RW 003, Kecamatan Pegandon, yang saat ini dikuasai Tergugat, di mana Penggugat mendalilkan bangunan rumah mulai dari nol, asalnya adalah tanah kosong bekas langgar/musholla di lain pihak saksi-saksi Tergugat dan Kepala Desa di lokasi tersebut menyatakan sebelumnya sudah ada bangunan rumah pemberian orangtua Tergugat selanjutnya direnovasi dengan masih menggunakan sebagian kayu-kayu bekas bangunan lama sebagai kusen rumah, demikian juga sampai sekarang belum diketahui siapa pemiliknya oleh karena SPT tanah dan rumah tersebut masih atas nama Matari (ayah kandung Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa III masih atas nama Matari sehingga belum menjadi milik sempurna (*milik taam*) Penggugat dengan Tergugat disebabkan masih terkait dengan pihak ketiga yaitu Matari, dengan demikian majelis berpendapat gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa III tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 3 huruf (d) atau obyek sengketa IV yang terdiri dari:

- almari kayu jati 4 (empat) buah;
- almari bufet besar 1 (satu) buah;
- almari bufet tanggung kaca 1 (satu) buah;
- almari sepatu dan isinya 1 (satu) buah;
- almari hias 1 (satu) buah;
- almari belajar tempat buku 1 (satu) buah;
- almari rak piring 1 (satu) buah;
- hiasan dinding 4 (empat) buah;
- Peralatan dapur (kulkas, mesin cuci)
- Meja kursi tamu satu set, agar ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa harta bersama yang berupa perabot rumah seperti tersebut di atas, maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa harta bersama yang berupa perabot rumah tangga tersebut diperoleh pada saat Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu sudah sepatutnya ditetapkan sebagai harta gono gini Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai petitum Penggugat angka 3 agar majelis hakim menetapkan bagian gono gini masing-masing pihak untuk Penggugat 2/3 dan Tergugat 1/3 bagian, maka majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- o Bahwa secara normatif sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan: Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
- o Bahwa ketentuan tersebut dapat saja disimpangi manakala dalam hal kontribusi terhadap perolehan/saham harta bersama terjadi perbedaan yang nyata besarnya antara suami dengan istrinya;
- o Bahwa berkaitan dengan harta Pengugat dan Tergugat sesuai bukti P-4.2 sampai dengan P-4.34, dalam kurun waktu antara tanggal 09 Juli



2006 hingga 06 Agustus 2017, Penggugat telah mengirimkan gaji/hasil bekerja sebagai TKI di Hongkong kurang lebih sebesar Rp 399.615.960,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), walaupun Tergugat juga bekerja sebagai Karyawan Kayu Lapis Indonesia dan mengelola tanah pertanian sebagai petani;

- o Bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan *teori keadilan distributif* yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya maupun kontribusinya. Jika suami atau istri berkontribusi lebih besar dalam mengumpulkan harta bersama, maka adalah lebih memenuhi rasa keadilan apabila salah satu pihak memperoleh bagian yang lebih dibandingkan dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis berpendapat bagian harta bersama adalah layak ditetapkan untuk Penggugat adalah 2/3 (dua pertiga) bagian sedangkan Tergugat 1/3 (sepertiga) bagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 agar harta gono gini/harta bersama dibagi dan jika tidak dapat dibagi secara natura harta tersebut dijual melalui lelang dan hasilnya dibagi sesuai ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 majelis menetapkan jika gono gini tidak dapat dibagi secara in natura maka harus dijual melalui lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan 2/3 dan 1/3 setelah dikurangi dengan biaya lelang;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 5 Penggugat agar dihukum untuk menyerahkan 2/3 bagian kepada Penggugat, oleh karena harta berupa sawah dan perabot rumah tangga dikuasai oleh Tergugat maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan 2/3 bagian gono gini tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka petitum gugatan Penggugat posita angka 3 huruf (a) obyek sengketa I dan huruf (d) obyek sengketa IV harus dikabulkan sebagian posita 3 huruf (b) obyek sengketa II dan (c) obyek sengketa III dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut pembagian harta bersama dan termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan:
  - 2.1 Tanah sawah SHM Nomor 73 atas nama Muslikhun suami Purwati seluas 1.950 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Pucangrejo. Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas:  
Sebelah utara: tanah pekarangan Rakan, selatan: rumah Purwati dan Muslikhun, barat: tanah Kamijan, dan timur: tanah Rakan dan Solekan;
  - 2.2 Perabot rumah tangga yang terdiri:
    - a. Almari kayu jati 2 (dua) buah;
    - b. Almari bufet besar 1 (satu) buah;
    - c. Almari bufet tanggung kaca 1 (satu) buah;
    - d. Almari sepatu dan isinya 1 (satu) buah;
    - e. Almari belajar tempat buku 1 (satu) buah;
    - f. Almari rak piring 1 (satu) buah;
    - g. Hiasan dinding 4 (empat) buah;
    - h. Kulkasadalah sebagai Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sebagaimana pada angka 2.1 dan 2.2 masing-masing adalah 2/3 (dua pertiga) menjadi bagian Penggugat dan 1/3 (sepertiga) menjadi bagian Tergugat;

4. Apabila harta bersama sebagaimana pada angka 2.1 dan 2.2 tersebut di atas tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dilakukan penjualan melalui Kantor Lelang Negara dan sisanya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai angka 4 di atas setelah dikurangi biaya lelang;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2/3 bagian harta bersama kepada Penggugat;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) untuk selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh.Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Moh. Istighfari, S.H., dan Drs. H. Shofingi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Musdalifah, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Moh. Istighfari, S.H.

Drs. Muh.Yazid Yosa, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Shofingi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Musdalifah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	204.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-
7. Descente	Rp	1.100.000,-
8. PNBP Descente	Rp	10.000,-
9. Pemberitahuan Descente ke Desa	Rp	90.000,-
<hr/> J u m l a h		Rp 1.520.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendal

ANWAR FAOZI, SH

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Awaliyah Haq

Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 28 Oktober 1998

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Dusun Cikarag, RT 03, RW 05, Desa Cilempuyang, Kecamatan  
Cimanggu, Kabupaten Cilacap

Pendidikan :

- TK Masyitoh Cilempuyang
- MI Ma'arif Cilempuyang
- SMP Negeri 1 Cimanggu
- SMA Negeri 1 Majenang
- UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum

Organisasi :

- Lembaga Riset dan Debat (LRD) FSH UIN Walisongo
- Semaci UIN Walisongo

Semarang, 13 Juni 2020

Hormat Saya,



**Nur Awaliyah Haq**

**NIM. 1602016035**